

80F2009

PSIKOLOGI PARTAI DAKWAH
Studi Kasus Tentang Partai Keadilan Sejahtera

TESIS

Endang Sidik Permana
710409211X



T

24321

UNIVERSITAS INDONESIA
KAJIAN ISLAM DAN PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
JULI 2008

PERPUSTAKAAN.
UNIVERSITAS INDONESIA

**PSIKOLOGI POLITIK PARTAI DAKWAH
Studi Kasus Tentang Partai Keadilan Sejahtera**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)**

**Endang Sidik Permana
710409211X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
KAJIAN ISLAM DAN PSIKOLOGI
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Endang Sidik Permana

NPM : 710409211X

Tanda Tangan :

Tanggal : 25 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Drs. Endang Sidik Permana
NPM : 710409211X
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Psikologi Partai Dakwah :
Studi Kasus Tentang Partai Keadilan
Sejahtera

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Achmad Ramzy Tadjoedin, MPA (.....)
Pembimbing : Prof.Dr.Achmad Mubarak, MA. (.....)
Penguji : Dr.Abdul Mudjib, M.Ag. (.....)
Pembaca Ahli : Dr.A.Hanief Saha Ghafur, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 25 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah Subhanahuwata'ala, Ucapan syukur Alhamdulillah, dengan melalui usaha keras dan sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang disusun untuk melengkapi tugas dan persyaratan untuk penyelesaian studi di Pascasarjana Universitas Indonesia pada program studi Kajian Timur Tengah dan Islam.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah membawa cahaya dalam kegelapan dunia.

Sebagai Insan sosial, yang tidak bisa hidup secara sendiri, banyak sekali bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil untuk penyelesaian penulisan tesis ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam (PSTTI)
2. Bapak Dr.A. Hanief Saha Ghafur, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Timur Tengah dan Islam, dosen dan pembaca ahli yang telah memberikan motivasi dan masukan-masukan dalam rangka penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Mubarak, MA, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dan masukannya dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Achmad Ramzy Tadjoeidin, MPA, selaku dosen sekaligus ketua sidang yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr.Abdul Mujib, M.Ag, selaku dosen sekaligus penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Istriku Laila Fauziah dan anak-anakku Aa Azzam, Abang Hafidz dan Princess Nadya atas kesabarannya menemani penulis dalam suka dan duka serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi S2 ini.

7. Emak Oyoh Komariah dan Mama Emy Muslimah yang senantiasa mendo'akan kesuksesan bagi anaknya.
8. Kakak dan adik penulis dari keluarga besar Abdul Qodir dan H.A.Damanhuri atas bantuan dan motivasinya.
- 4). Teman-teman seperjuangan jurusan Kajian Islam dan Psikologi angkatan VIII, terutama saudaraku Karim Santoso, S.Pd atas motivasinya yang terus-menerus kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya dan memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada yang telah membantu penulis yang tersebut di atas maupun yang tidak tertulis.

Kemudian penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya dengan rasa syukur penulis menyerahkan segalanya kepada Allah SWT atas sebagian Ibadah, Ghairu maghdoh yang sempat penulis selesaikan, mudah-mudahan Dia senantiasa mengampuni segala kesalahan dan membuka kesempatan-kesempatan kepada penulis untuk memperoleh karunia di dalam menyelesaikan ibadah-ibadah lainnya.

Bekasi, Juli 2008

Endang Sidik Permana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Endang Sidik Permana
NPM : 710409211X
Program : Pascasarjana
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Psikologi Politik Partai Dakwah : Studi Kasus Tentang Partai Keadilan Sejahtera

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan , mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Juli 2008

Yang menyatakan

Drs. Endang Sidik Permana

ABSTRAK

Nama : Endang Sidik Permana
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul : Psikologi Politik Partai Dakwah : Studi Kasus Tentang Partai Keadilan Sejahtera

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks perpolitikan di Indonesia . Sebagai partai yang baru apakah Partai Keadilan Sejahtera hanya sebagai pelengkap dunia perpolitikan di tanah air dan terperangkap dalam paradigma politik lama yang dibangun atas dasar keilmuan yang sekularistik, dan terlibat dalam praktek politik yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Ataukah PKS memiliki paradigma baru yang berbeda dengan partai-partai lain termasuk partai Islam

Penelitian ini mempergunakan metode historis dengan langkah-langkah berikut: Pertama heuristik atau pencarian sumber. Kedua, tahap kritik, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Ketiga tahap interpretasi atau penafsiran. Keempat tahap historiografi atau penulisan.

Dari data-data yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki perbedaan yang signifikan dengan partai politik yang lain baik dari segi paradigma maupun aspek politik praktis. Partai ini berhasil lolos dari perangkap ideologis yang ditinggalkan oleh kaum kolonial yang diwariskan kepada bangsa Indonesia pada umumnya dan khususnya ummat Islam, melalui proses edukasi yang sangat lama demi mempertahankan pengaruhnya di Indonesia dan dunia.

Kata kunci : Paradigma, Ideologi, Edukasi

ABSTRACT

Name : Endang Sidik Permana
Study Program : A Study on Islam and Psychology
Title : Political Psychology of Proselytism Party : A Case Study on Partai Keadilan Sejahtera

Study performed by the writer is aimed at identifying existence of Partai Keadilan Sejahtera as a new Party whether it would serve as a complement in political world in the home country and being trapped in former scientific based political paradigm which is secularistic in nature, and engaged in political practice which the end justifies the means, or it has new paradigm differing from other parties including Islamic based parties.

This study used historical method using the following steps: first, heuristic or source search. Second, criticism phase, either it is external or internal. Third, interpretation. Fourth, historiography or writing.

From the exiting data, it can be concluded that Partai Keadilan Sejahtera (PKS) differs significantly from other political parties either from paradigm or practical politic aspect. This party manages to get rid of ideological trap inherited by colonizer to Indonesian nation in general and particularly Islamic followers, through long education process in the interest of maintaining its impact in Indonesia and the world.

Key Words: Paradigm, Ideology, Education

تجريد

إندانغ صديق بيرمانا: X ٧١٠٤٠٩٢١١

نفسية الأحزاب الإسلامية الدعوية

الدراسات الخاصة بحزب العدالة والرفاه المعتمدة علي المنهج الوصفي التاريخي

(٢٠٠٨). البحث. جاكرتا:

الدراسات الإسلامية والنفسية - قسم دراسات الشرق الأوسط والإسلامية

الدراسات العليا بجامعة إندونيسيا

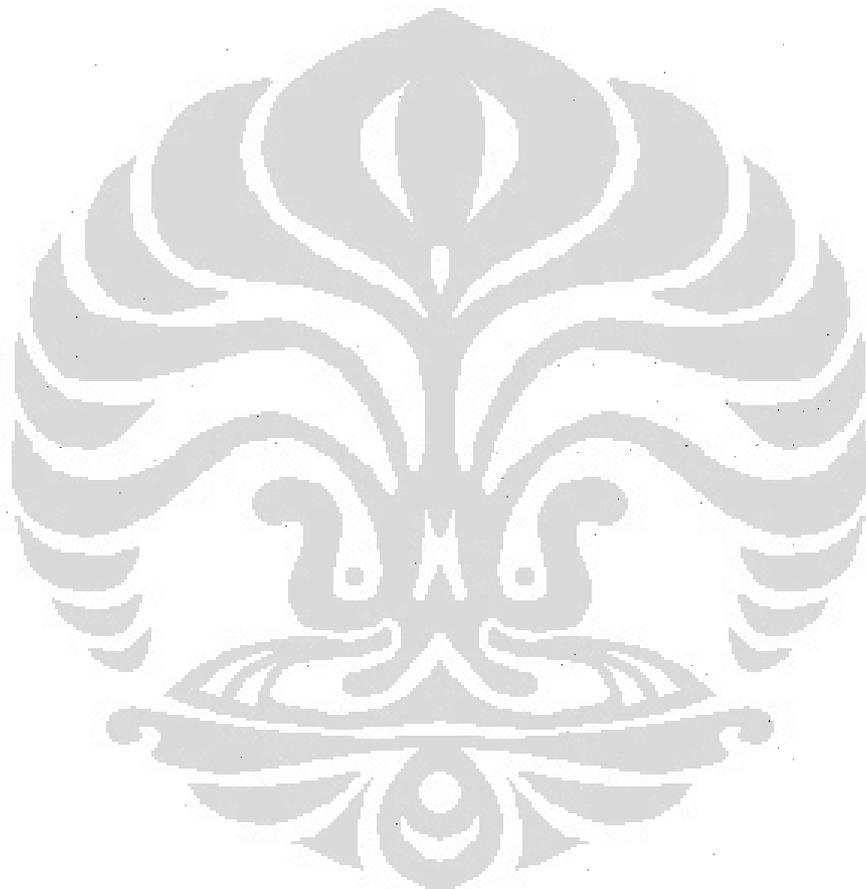
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن وضعية حزب العدالة والرفاه بين الأحزاب السياسية في إندونيسيا. باعتبار الحزب حزب جديد، هل هو فقط مكملًا للأحزاب القائمة، ويتبنى الأفكار السياسية القديمة المبنية علي المبادئ العلمانية والمصالح المحضة، وينغمس في الأساليب السياسية التي تباح استخدام جميع الوسائل لتحقيق الأهداف المطلوبة؟ أو أن لديه الأفكار الجديدة تختلف عن أفكار الأحزاب السياسية الأخرى، بل عن الأحزاب الإسلامية؟ واتبع الباحث في إطار البحث المنهج الوصفي التاريخي من خلال الخطوات التالية: أولاً، البحث عن المصادر. ثانياً، مرحلة تقديم الانتقادات داخليا وخارجيا. ثالثاً، مرحلة التوضيح. رابعاً، مرحلة الكتابة.

من خلال المعلومات الموجودة، يمكن القول أن حزب العدالة والرفاه يختلف اختلافا واضحا عن الأحزاب السياسية الأخرى، سواء من ناحية الأفكار، أو من ناحية الممارسات السياسية الواقعية، حيث تمكن الحزب من الابتعاد والتخلي عن الأيديولوجية القديمة التي تركها الاستعمار الهولندي في البلاد، وذلك من اجل إبقاء تأثيره في إندونيسيا.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	viii
ABSTRAK (BAHASA ARAB)	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metodologi Penelitian	7
BAB II PSIKOLOGI POLITIK PARTAI DAKWAH	8
2.1. Fitrah Manusia Dalam Politik	8
2.2. Hakikat Psikologi	12
2.3. hakikat Psikologi Politik	16
2.4. Hakikat Manusia Dalam Politik Berdimensi Teologis	19
2.5. Hakikat Manusia Dalam Politik Berdimensi Sosiologis	20
BAB III PARADIGMA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	22
3.1. Urgensi Ideologi	24
3.2. Falsafah Dasar Perjuangan.....	29
3.3. Hakikat Dakwah.....	33
3.4. Dialektika Islam dan negara.....	59
3.5. Karakteristik pembangunan	76
BAB IV INDONESIA YANG DICITA-CITAKAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	79
4.1. Visi Indonesia yang dicita-citakan PKS	79
4.2. Misi yang diemban PKS	91
BAB V PLATFORM POLITIK PKS	96
5.1. Umum	97
5.2. Wawasan Politik	99
5.3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Baik	104
5.4. Penegakkan Hukum	108
5.5. Membangun Hankam	110
5.6. Langkah penunjang Umum	113

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	153
	6.1. Kesimpulan	153
	6.2. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA		156



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Al-Hajj : 40)

Apakah politikus dapat menjadi da'i; menegakkan amar makhruf nahi munkar? Atau apakah da'i dapat menjadi politikus? Apakah mungkin, kegiatan dakwah menjadi kegiatan politik? Atau sebaliknya, kegiatan politik menjadi kegiatan dakwah?

Jika merujuk pada persepsi masyarakat tentang dakwah dan politik, menjawab beberapa pertanyaan di atas tidaklah mudah. Karena pemahaman yang sekularistik, bagi sebagian ummat Islam saat ini, dakwah dan politik adalah dua 'kata' yang bertentangan. Politik dipahami sebagai aktivitas dunia, sedangkan dakwah dianggap aktivitas akhirat. Hingga pada gilirannya akan dipahami bahwa dakwah tidak pantas memasuki wilayah politik dan politik haram memasuki wilayah dakwah. Dakwah adalah pekerjaan para ustadz, sedangkan politik adalah pekerjaan politikus. Jika seorang ustadz menjadi politikus, dia harus menanggalkan segala atribut dan perilaku keustadzannya, serta harus mengikuti atau beradaptasi dengan perilaku para politikus. Demikian pula sebaliknya, apabila seorang politikus menjadi ustadz, ia pun harus menanggalkan baju politiknya.

Namun, persoalannya tidak hanya berhenti pada masalah Islam dan politik. Saat ini ketika dakwah bersentuhan dengan aktivitas politik praktis, ia akan dan pasti berhadapan

dengan sistem demokrasi; sebuah sistem yang banyak digugat ketika harus *vis a vis* dengan Islam sebagai ideologi umat. Akibatnya, hingga saat ini, Islam selalu termaginalkan ke dalam percaturan politik formal. Padahal, kenyataannya sadar ataupun tidak, saat ini, umat tengah menghadapi sistem politik yang masih menganggap demokrasi sebagai sarana terbaik dalam merealisasikan keadilan dalam pemerintahan.

Salah satu isu paling populer sejak akhir dasawarsa abad ke-20 adalah demokrasi. Diantara indikator paling jelas dan kepopuleran tersebut adalah berlipatgandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis. Sejak awal 1980-an, banyak negara di kawasan Eropa Selatan, Amerika Latin, Afrika, Eropa Timur, dan Asia mengalami proses transisi ke demokrasi. Sejak akhir 1950-an, satu demi satu, pemerintahan otoriter yang dipraktikkan di kawasan tersebut mulai rontok. Meskipun tertatih-tatih, bahkan terancam gagal, Spanyol, Portugal, Yunani, Brazilia, Argentina, Uruguay, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, dan (akhirnya) Indonesia menjadikan demokrasi sebagai sistem politik pemerintahannya, meskipun ia dikenal sebagai bangsa Muslim terbesar.

Di tengah proses demokrasi yang terjadi di mana-mana, pada mulanya, Dunia Islam tidak menjadi bagian. Alasannya, ia tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak mempunyai pengalaman demokrasi. Ada beberapa penjelasan mengenai 'kelangkaan' demokrasi di dunia Islam. (Mun'im A. Sirry, 2002)

Pertama, pemahaman secara doktrin ia menghambat praktek demokrasi. Teori ini dikembangkan oleh Elie Kedouri, yaitu bahwa gagasan demokrasi masih cukup asing dalam *mind set* dan pola pikir Islam, dimana kebanyakan kaum Muslim masih cenderung

memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Karena itu, hal yang diperlukan saat ini adalah liberalisasi pemahaman keagamaan, termasuk mencari konsensus dengan teori-teori modern seperti demokrasi dan kebebasan.

Kedua, persoalan kultur. Teori ini dikembangkan oleh Bernard Lewis (1998), yaitu keberadaan warisan kultural komunitas Muslim yang sudah terbiasa dengan otokrasi dan kepatuhan pasif atau taklid (*civic culture*) yang ditengarai sebagai yang paling bertanggung jawab kenapa sulit membangun demokrasi di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia.

Ketiga, Lambannya pertumbuhan demokrasi di Dunia Islam sesungguhnya bukan disebabkan oleh adanya hubungan teologi maupun kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah demokrasi itu sendiri. Untuk membangun sentimen demokrasi diperlukan kesungguhan, kesabaran dan – di atas – segalanya- waktu. Sehingga secara jangka panjang terdapat rasa optimisme terhadap masa depan demokrasi di dunia Islam, Eposito adalah di antara pemikir yang memiliki optimisme tersebut.

Semakin berkembangnya umat Islam dan luasnya wilayah geografisnya serta pesatnya perkembangan sains ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut ulama Islam untuk melakukan inovasi teori hukum Islam sehingga mampu merespon segala persoalan yang terus berkembang. Dalam hal ini, hukum Islam dituntut dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan perubahan sosial.

Secara normatif, sebagaimana yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi, hukum Islam (fiqih) mampu beradaptasi dalam keadaan bagaimanapun karena sifat fleksibilitas

dan keluasan hukum Islam. Salah satu faktornya adalah luasnya kawasan ijtihad. Karena itu peranan ajtihad dari para mujtahid adalah sangat penting guna menetapkan hukum tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi yang lebih patut dengan tetap menjaga tujuan syariat islam dan berpegang teguh pada jiwanya. (Al-Qardhawi. 1993)

Di antara alasan yang sering dimunculkan dan menjadi polemik di kalangan umat islam ketika menyikapi demokrasi adalah adanya unsur bahwa keputusan hukum berada di tangan dan kehendak rakyat. Dalam istilah lain, demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat di mana hal ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Sebab, seluruh perkara dalam demokrasi berasal dari (dan ditujukan pada) manusia bukan dari dan bagi Allah Swt.

Usaha penegakkan dakwah (syariat islam) dalam sistem demokrasi yang berdampak pada partisipasi umat, mempunyai pemahaman bentuk aplikasi syariat dalam aktivitas berpolitik, baik dalam bentuk moralitas berpolitik maupun keputusan kebijaksanaan yang dilahirkan. Pada dasarnya pemikiran ini merupakan produk ijtihad siyasi yang ingin memanfaatkan sistem politik demokrasi sebagai suatu realitas (*waqi'iyah*) yang dihadapi umat saat ini dengan tujuan merealisasikan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan terutama aspek hukum dengan perbuatan manusia (*af'al al 'ibadi*) sebagai objeknya, baik berkaitan dengan budaya, sosial, seni maupun politik.

Di era reformasi, wacana penegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara, di mana pada akhirnya menjadi undang-undang, mulai kembali disuarakan bahkan lebih lantang dan berani. Karena, masa ini (reformasi) selalu mengklaim dirinya lebih demokratis dalam melaksanakan sistem pemerintahan, yang berwujud pada kebebasan berpendapat, berekspresi, dan bertindak. Akibatnya, potensi dan keinginan umat dapat

kembali disuarakan. Hal ini terbukti dengan munculnya (sebagian) partai politik yang berazas Islam dan organisasi Islam yang menyuarakan kembali pentingnya penegakkan syariat Islam untuk mengatur semua aspek dalam kehidupan umat Islam.

Diantara partai politik peserta pemilu 1999, terdapat sebuah kekuatan baru politik Islam (lihat Majalah saksi.No.7 Tahun V, 14 Januari 2003.h.17) yang tumbuh dari generasi muda Islam. Fenomena Partai Keadilan (yang kemudaiannya berubah menjadi Partai keadilan Sejahtera) dalam konstelasi politik Islam secara nasional adalah hal yang menarik, karena konsistensi partai pada azas Islam semenjak didirikan, juga konsistensi pendukung dan kadernya terhadap ajaran Islam. Sehingga dapat diperkirakan, partai ini akan terus memperoleh kenaikan dukungan. Karena progresivitasnya, tampak gejala positif bahwa ia merupakan salah satu partai politik Islam masa depan.

Terdapat perbedaan pokok orientasi politik antara PKS dengan partai-partai lain, PKS dalam gerak politiknya selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan Islam. Hal ini terbukti dalam merumuskan visi dan misi perjuangan, yang jauh dari orientasi jabatan dan materi. Dalam visi khususnya, dijelaskan bahwa PKS adalah partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa (AD-ART PKS 2001). Jadi, keberadaan PKS dalam dunia politik di Indonesia merupakan partai dakwah yang menjadikan amar makruh nahi munkar sebagai titik tolak setiap aktivitas politiknya. PKS sebagai partai dakwah akan dapat memunculkan alternatif orientasi berpolitik yang tidak semata-mata bermotif mencari kekuasaan, tapi juga berorientasi pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan.

Dalam berdakwah menegakkan syariat Islam di Indonesia, PKS tidak mengikuti pola pemikiran partai-partai Islam lain yang bersikeras memunculkan kembali Piagam

Jakarta atau kelompok yang bergerak dengan cara-cara ekstrem dan radikal yang justru akan dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap Islam. Sebab, pada awalnya, PKS memandang pembahasan tentang hal-hal yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan konstitusi bukan menjadi agenda pokok umat karena konsolidasi kekuatan umat jauh lebih penting dibandingkan melemparkan sebuah isu yang tidak didukung oleh kekuatan signifikan di MPR dan justru akan membuat kontroversi. (Untung Wahono. 2003)

Bagi PKS, demokrasi sebagai sistem politik dapat memberikan peluang bagi rakyat (umat islam) untuk bebas menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri di mana kemudian akan mampu menyinergikan potensi masyarakat hingga membentuk kekuatan kebersamaan (Satria Hadi Lubis. 2003), termasuk penyampaian keinginan umat untuk menegakkan syariat Islam. Usaha tersebut akan mampu atau dapat terealisasi bila timbul kesadaran umat terhadap pentingnya penegakkan Islam dalam segala aspek kehidupan, dan bila kekuatan umat dalam wadah partai politik Islam secara praktis memenuhi kuota mayoritas di MPR. Oleh karena itu, PKS memandang penting keikutsertaan umat untuk memanfaatkan sistem demokrasi guna mewujudkan kepemimpinan umat dan menggalang kekuatan kebersamaan umat dalam usaha penegakkan syariat Islam di Indonesia.

1.2. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terdapat banyak hal yang dapat dikaji lebih dalam berkaitan dengan persoalan realitas politik di negeri ini. Mulai dari persoalan yang sifatnya konseptual maupun kontekstual atau hal yang praktis mengenai praktek perpolitikan terkait dengan perkembangan kekinian.

Dalam tesis ini, penulis membatasi kajian terhadap eksistensi partai dakwah (Partai Keadilan Sejahtera) dengan paradigmanya serta platform politiknya yang terkait dengan pembangunan politik Indonesia ke depan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan Partai Keadilan Sejahtera dalam konteks perpolitikan di Indonesia .

1.4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis memberikan kontribusi berupa pengetahuan ilmiah bagi Universitas Indonesia pada umumnya dan khususnya Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Indonesia Jurusan Kajian Islam Dan Psikologi tentang Psikologi Politik Partai dakwah, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera.

Secara praktis hasil penelitian ini juga berguna bagi para politisi dan para peminat politik sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memberikan ulasan, penilaian, termasuk dukungan bagi para konstituen.

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, sedangkan sumber yang digunakan adalah sumber kepustakaan atau sumber sekunder.

BAB II

PSIKOLOGI POLITIK PARTAI DAKWAH

2.1. Fitrah Manusia Dalam Politik

Realitas historis menunjukkan bahwa politik dalam Islam tidak tumbuh dari sebuah proses pengalaman, tetapi lahir dari penghayatan muslim terhadap nilai-nilai Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Sementara politik sekular umumnya lahir dari kajian atas pengalaman manusia dalam berpolitik, oleh karenanya biasa bersifat pragmatis. Demikian pula politik Islam bukan hasil pemikiran para filosof sehingga melahirkan teori-teori ideal yang abstrak dan dalam banyak hal sulit dilaksanakan dalam realitas kehidupan.

Politik dalam Islam lahir dari tuntunan dan tuntutan prinsip-prinsip wahyu yang sengaja diturunkan oleh Allah Swt. Untuk dijadikan petunjuk hidup manusia dalam melaksanakan tujuan dan misi penciptaannya di bumi (Abu Ridha, 2004). Oleh karena itu perjalanan politik Islam tidak boleh menyimpang dari sumber Islam, yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Dan harus senantiasa ada dalam koridor "fithrah" manusia yang telah digariskan Allah Swt.

Esensi dan universalitas Islam melahirkan sejumlah konsekuensi dalam pemahaman dan konsep-konsep yang dibangun dari pengertian Islam sendiri terhadap pelaksanaannya. Konsistensi pemahaman terhadap pengertian dan esensi Islam yang benar dapat menjaga orsinalitas pengertian terhadap konsep-konsep Islam mengenai kehidupan yang dibangun

diatasnya. Oleh karenanya, seluruh konsep Islam, termasuk konsep politik atau siasah, melekat dalam esensi dan sifat universalnya.

Selanjutnya, universalitas Islam tersebut menjadi inti pemahaman kaum muslimin terhadap konsep-konsep Islam dalam seluruh dimensinya yang dapat dibuktikan dari empat segi; metafisik, agama, sosiologi, dan politik. Keempat segi itu menurut Marcel A. Boisard tidak menimbulkan konsep yang sangat berbeda karena semuanya berasal dari satu sumber.

Supaya pengertian politik dalam Islam tetap orisinal dan tidak lepas dari akarnya, maka harus selalu diletakkan dalam kerangka pengertian dan konseptualisasi Islam yang benar. Islam yang diyakini sebagai *din* menuntut agar dipahami dan diimplementasikan secara utuh.

2.1.1. Manusia Makhluk Yang Unik

Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa yang disebut dengan manusia adalah “binatang”, ada beberapa sebutan mengenai hal ini, diantaranya: binatang berakal, binatang berpolitik (*zoon politicon*), binatang bermasyarakat (*homo socius*) dan lain sebagainya. Para ahli biologi kedokteran sangat memahami hal tersebut, apalagi bila manusia hanya dilihat dari aspek fisik biologisnya. Voltaire pun menyatakan manusia dari sudut pandang tersebut adalah “binatang”. Dalam hal-hal tertentu para ilmuwan sering melakukan uji coba untuk sesuatu yang akan diberikan kepada manusia, seperti obat, maka terlebih dahulu diujikannya pada binatang. Ini sebagai bukti ada pandangan yang menganalogkan manusia dengan binatang. Hal

tersebut termasuk pada bidang psikologi.. Seperti menurut kaum assosianis, seperti David Hume dan Hartly menyatakan bahwa manusia seperti binatang. Manusia digerakkan oleh mekanisme assosiasi diantara sensasi-sensasi yang telah dipersepsi. Begitu juga Freud, dengan teori psikoanalisisnya ia berpendapat bahwa manusia adalah binatang buas (A.Hanief Saha Ghafur,2005).

Bila manusia dilihat dari aspek organisme fisik/biologisnya bisa dipersamakan dengan binatang dan memiliki kecenderungan kebinatangan dengan karakter yang hedonistik dan amoral, maka rohaniah manusia senantiasa memberikan pancaran ilahiah yang memandu manusia untuk senantiasa ada pada fithrahnya menuju yang hakiki dan illahi. Di sinilah letak perbedaan utama antara manusia dan binatang.

Manusia memiliki kelengkapan instrumen yang lebih baik dari binatang bahkan dibanding malaikat sekalipun oleh karenanya manusia dikatakan sebagai makhluk paling sempurna, baik dalam proses maupun hasil penciptaannya. Malaikat adalah mahluk yang dicipta Allah dari cahaya yang senantiasa tunduk patuh kepada perintah-Nya, selalu bertasbih mensucikan dan memuji-Nya. Tapi malaikat tidak memiliki kemauan bebas (*free will*) sehingga tidak ada yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Ketika malaikat diperintahkan Allah untuk sujud kepada Adam/manusia (Q.S. 2:34), ia pun melakukannya.

Berbeda dengan malaikat dan binatang, sebaliknya manusia harus bertanggung jawab atas segala ide, sikap dan perbuatannya, karena ia telah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidup dan kehidupannya, termasuk mau menjadi manusia yang beriman, yang patuh kepada-Nya atau mau membangkang atas perintah-Nya dan mengambil posisi sebagai orang kafir. Manusia telah dibekali berbagai instrumen untuk menopang amanah yang telah diembankan kepadanya yakni, menjadi hamba (Q.S. 51:56) dan sekaligus khalifah Allah di muka bumi ini (Q.S. 2:30).

Sementara binatang hanya mengikuti insting dan nalurinya semata sebagai sesuatu yang sudah digariskan oleh yang Maha Kuasa, maka tidak ada tanggung jawab pada binatang atas kelakuan ataupun pada akibat dari kelakuannya, karena ia tidak berpikir sebab akibat, yang penting kebutuhan yang hanya berorientasi biologis sesuai dengan kebinatangannya terpenuhi. Dengan demikian, manusia akan dipersamakan dengan binatang bukan hanya pada aspek fisik biologisnya saja bahkan lebih buruk dari padanya manakala dalam tindakannya hanya menuruti tuntutan fisik biologisnya atau mengikuti *nafs al-amarah* dengan tidak memperhatikan tuntutan ruhaniah *nafs al-muthmainnah* yang senantiasa mengindahkan pesan-pesan ilahiah.

Untuk membedakan dirinya dengan binatang, manusia harus bertindak dengan menggunakan semua potensinya, baik *jasad*, *nafs* dan *ruhnya* secara sinergis dan terintegrasi. Manusia mesti mampu

mengontrol semua tindakannya supaya sejalan dengan tata nilai, norma, kaidah, adat istiadat, hukum dan terutama ajaran agama. Karena kalau tidak demikian akan berakibat terhadap sanksi sosial maupun sanksi hukum baik di dunia maupun di akhirat kelak jika bertindak di luar aturan atau melanggarnya.

2.2. Hakikat Psikologi

Bila dikaji secara etimologis, asal kata “psikologi” adalah dari bahasa Yunani Psyche adalah “Jiwa” dan Logos berarti “Ilmu” atau ilmu Pengetahuan”. Jika kita tafsirkan dari arti harfiahnya “psikologi” dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa atau secara singkat bisa disinonimkan dengan istilah “Ilmu Jiwa”. Hanya saja dalam perkembangannya lebih lanjut psikologi tidak menjadikan “jiwa” sebagai objek kajian, mungkin lebih tepat dikatakan sebagai mengkaji gejala-gejala kejiwaan yang muncul dalam tingkah laku manusia. Hal ini karena jiwa dipandang sebagai sesuatu yang abstrak (QS. Al-Isra: 85), sehingga tidak bisa diketahui secara objektif, yang nampak hanya gejala kejiwaan yang termanifestasikan dalam tingkah laku. Dengan demikian jelaslah bahwa manusia hanya dapat memahami jiwa sebatas gejala kejiwaan yang muncul dari tingkah lakunya. Namun para psikolog memiliki berbagai pandangan mengenai hal ini. Misalnya Freud tokoh psikoanalisa lebih menekankan aspek ketidaksadaran manusia sebagai aspek terpenting untuk memahami keadaan jiwa seseorang. Berbeda sekali dengan pandangan Mc Dougall, Pavlov, dan Watson yang sering dikelompokkan sebagai pemikir aliran

behaviorisme, mereka berpandangan bahwa keadaan jiwa seseorang amat ditentukan oleh tingkahlaku yang objektif.

Dari penjelasan singkat diatas, tentunya kita bisa menarik suatu pengertian bahwa “psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari penghayatan dan tingkah laku manusia yang normal, dewasa, dan berbudaya” Maksud dari *penghayatan* disini ialah sekumpulan gejala-gejala berupa pengamatan, tanggapan, kenangan, perasaan yang bersangkutan paut kepada sesama dan saling berkaitan. Maka dari itu gejala psikis dapat diartikan sebagai kejadian rohani yang menunjukkan manifestasi apa yang terjadi. Akan tetapi sebagai catatan penting bahwa fokus kajian psikologi tidak hanya terbatas pada tingkah laku manusia. Beberapa ahli juga mempelajari tingkah laku hewan dengan metode eksperimen. Misalnya Pavlov (Rusia) yang terkenal dengan teorinya conditioning reflek. Sebagai uji cobanya adalah anjing. Begitu pula E.L.Thordike melakukannya pada kucing. (Alwisol, 2004)

Jiwa dalam diri manusia sangatlah urgent, karena dengan jiwa manusia dapat menentukan kedudukan atau derajatnya, baik dalam kehidupan dunia yang sementara ini maupun kehidupannya kelak diakhirat yang kekal abadi Sejak era Thales hingga menjelang era Rasulullah Saw, atau sekitar 1500 tahun, manusia berada dalam kebingungan mencari pegangan hidup, mencari penjelasan tentang jiwa dan tentang hakekat keberadaannya di bumi ini. Sebagian besar diantaranya kesasar ke daerah yang irasional dengan melakukan penyembahan dan pemujaan terhadap berhala atau terhadap obyek-obyek alam. Sebagian lagi ada yang mempertuhankan dan memuja manusia, seperti Paulus. Di saat inilah Muhammad Rasulullah Saw lahir,

yakni di saat peradaban manusia mandeg dan mengalami kekacauan. Keadaan stagnan dalam kekacauan itu bukan hanya di dunia Arab yang dikuasai kaum Quraisy. Begitu juga keadaan jahiliyah juga terjadi di pusat-pusat peradaban pada zaman itu seperti Yunani, Persia dan Mesir. Dalam hal ini spiritualisme dan etika adalah rem yang dapat menghambat dan mengendalikan gerakan kehendak bebas yang liar dan destruktif tersebut.

Kegundahan dan kegelisahan manusia dalam mencari hakekat keberadaannya di dunia dapat dilihat pada perkembangan pemikiran manusia itu sendiri. Paham materialisme, yang hingga kini berkembang terutama didunia Barat, sejak kemunculannya yang dikumandangkan oleh Xenophanes (kurang lebih 570 – 480 SM) menekankan pada upaya manusia untuk meraih kesenangan (kebahagiaan semu) hidup di dunia (*hedonism*). Ini berbeda dengan konsep hidup Islami yang membangun keselarasan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta dijauhkan dari hidup yang hina, untuk meraih kebahagiaan hakiki yang puncaknya adalah perjumpaan mesra dengan Sang Kekasih. Kebahagiaan hakiki, tempatnya ada di dalam jiwa yang terjaga dan terpelihara yang dipandu dan diterangi cahaya hati/qalbu yang bersih dan jernih dan bukan terletak pada sesuatu yang bersifat materi atau kebendaan. Ini menandakan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada potensi akan tetapi pada aktus. Hanya manusia yang kualitas jiwanya telah mencapai derajat taqwa yang akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yakni kemuliaan di sisi Allah.(QS. 49: 13) Kebahagiaan ialah suatu kegembiraan yang sempurna dan abadi bagi jiwa dan badan bersama-sama, karena kebahagiaan yang terbatas bukan kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya. (A.Hanafi,MA, 1983)

Ruh, jiwa hati/qalbu dan raga adalah kata-kata kunci dalam teologi Islam. Filsafat Yunani pada awalnya terfokus pada upaya memahami alam. Baru kemudian merambah kepada upaya memahami manusia, khususnya jiwa manusia. Yang pasti jiwa telah menjadi objek pertanyaan dan penyelidikan manusia. Dizaman Yunani kuno ratusan tahun sebelum tarikh Masehi, ahli-ahli fiksi telah mencoba menyingkap tabir rahasia jiwa yang gaib itu berdasarkan sudut pandang filsafat masing-masing. Pengetahuan tentang hakikat jiwa ditempuh secara filosofis.

Sebagian besar hasil refleksi filosofis tentang jiwa pada masa itu bersifat "atomistis", dimana jiwa manusia dipandang sebagai sesuatu yang *konstan*, tidak berubah-ubah dan dapat dianalisis sebagai memiliki unsur tersendiri dan masing-masing terpisah satu sama lain. Pada zaman itu, pembahasan tentang jiwa benar-benar dipisahkan dari pengetahuan tentang raga. Jiwa dipercayai memiliki daya-daya tertentu yang bekerja sendiri tanpa ada hubungan dengan raga. Jiwa benar-benar didudukan sebagai sebuah substansi imaterial yang terpisah dari raga abstrak. Dan sekali lagi penjelasan mengenai jiwa adalah bagian dari bahasan filsafat, bukan sebagai sains yang otonom dan memiliki metode sendiri. Untuk itu sejarah perkembangan psikologi harus dimulai dari bagaimana psikologi lepas dari filsafat dan menjadi sebuah sains yang otonom, dengan tentunya terlebih dahulu kita perhatikan bagaimana para filosof berefleksi tentang hakikat jiwa.

2.3. Hakikat Psikologi Politik

Andika Matulesy (2005), menyebut bahwa penyelidikan tentang kaitan psikologi dengan politik pertama dikembangkan di University of Chicago oleh ahli politik Charles Merriam, namun demikian tidak banyak penjelasan yang bisa dimunculkan keterkaitan tersebut. Baru setelah itu Harold Dwight Lasswell tahun 1902, mampu menjelaskan lebih cermat kaitan antara psikologi dengan politik, sehingga dia disebut sebagai *grandfather of many of the political psychology and politics* tahun 1930, dengan ungapannya yang terkenal bahwa “political man is the product of private motives, displaced on a public object and rationalized in term of public interest”.

Publikasi berikutnya ditulis bersama Kaplan dengan judul *Power and Society*, yang mengungkapkan hal fundamental dalam menerangkan perilaku politik adalah respon dari penjumlahan/ fungsi dari lingkungan (*environment*) dan Predisposition. Buku berikutnya berjudul *Democratic Character* tahun 1951 yang mengungkapkan pentingnya *power sharing*, respek dan nilai-nilai lain agar sebuah masyarakat demokratis terbentuk.

Setelah munculnya berbagai tulisan Laswell banyak kajian politik yang dilakukan para ilmuwan psikologi, antara lain Lester Milbrath tahun 1925 yang melakukan studi tentang *political participation*. Robert Lane tahun 1959 dalam bukunya *Political Life* yang menjelaskan keterkaitan antara perilaku politik dengan *human needs* seperti ekonomi, afeksi, pemahaman, ketegangan, kekuasaan dan harga diri. Publikasi berikutnya

dari Lane adalah *Political Ideology* tahun 1962 yang menganalisis *political beliefs* dan *political values*.

Selanjutnya Gabriel Almond dan Sydney Verba melakukan survey ke 5 negara, yakni Amerika, Inggris, Jerman, Itali dan Mexico tentang partisipasi politik dan *political efficacy*, yang diterbitkan dalam bukunya *The Civic Culture*. Tulisan-tulisan lain kemudian banyak bermunculan, yakni dari Herbert Hyman dengan buku *Political Socialization*; Theodore Newcomb, Fred I Greenstein, David Easton, Robert Hess, Dawson, Prewitt, Langton, dsb.

Memang tidak dipungkiri peran politik sebagai determinan dari perilaku dan karakteristik psikologis seseorang akan mempengaruhi konteks social politik, seperti yang diungkapkan Berry dalam *ecocultural models* yang berakar dari pandangan Kardiner, Linton, dan J.W. Whiting. Pada model tersebut konteks sosiopolitik bersinergi dengan konsep ekologis akan mengarahkan pada akulturasi, adaptasi biologis, atau adaptasi budaya, sehingga muncul perilaku yang teramati (*observable behavior*) dan ciri-ciri psikologis yang tersimpulkan dari seseorang. Selanjutnya perilaku dan karakteristik perilaku itu akan memberi dampak pada perubahan konteks ekologis dan konteks sosiopolitik.

Lebih jelas lagi Jeanne N. Knutson dalam bukunya *Handbooks of political psychology* (1973) mengungkapkan berbagai keterkaitan psikologi dan politik antara lain bahasan tentang *political attitudes*, *political beliefs*, *political socialization*, *authoritarian personality*, *anomie*, *alienation*,

political behavior, leadership, aggression, violence, revolution, war, psychobiography dll.

Lebih lanjut Barner-Barry dan Rosenwein dalam Hamdi Muluk dan Adrianto Reksodiputro (2005), menyatakan bahwa ada perbedaan mendasar antara ilmu politik konvensional dan ilmu psikologi dalam melihat perilaku politik. Psikologi mengkaji perilaku politik dari sudut pandang dorongan-dorongan non politik yang mendasari perilaku tersebut, yaitu faktor-faktor yang tidak bisa diamati secara langsung seperti: *political tolerance, commitment to democratic values, political efficacy, dan political trust.*

Samin (1996) dalam bukunya *Applied Social Psychology* menguraikan bahwa psikologi politik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang fungsi mental dan aksi dari aktor politik yang terlihat secara potensial atau actual sebagai warga Negara. Pemimpin atau anggota kelompok yang memiliki tujuan untuk bersama dan kepentingan masyarakat. Berbagai persoalan yang dibahas dalam psikologi politik antara lain *psychology and personality, attitudes and voting behavior, political knowledge, perceptions of political issues, political selfconcept, political interest, political activity, attitudes and political belief, Ideological orientational and cognitive style, dan lainnya.* (Sabar Sitanggang, 2006)

kehidupan mempunyai makna yang luas dan komprehensif, yaitu: mengatur dan menyatakan pandangannya terhadap segala urusan kehidupan

2.4. Hakikat Manusia Dalam Politik Berdimensi Teologis

Islam sebagai sistem hidup yang mencakup seluruh aspek serta meletakkan aturan-aturan yang bijak dan teliti. Dengan aturan-aturan itu, Islam selalu dinamis dan aktif menghadapi berbagai persoalan kehidupan manusia di dunia dan dalam membangun peradaban yang telah menjadi misi otentiknya. Dalam kerangka inilah paradigma tentang politik dibangun. Islam adalah din yang secara etimologis memiliki empat makna. Pertama, mempunyai arti hak untuk menguasai, mendominasi, memerintah, dan menaklukkan. Kedua, memberi arti seperti yang pertama tapi lebih menekankan kepada kepatuhan, ketundukkan, kepasrahan, dan kerendahan diri. Ketiga, memberi arti syariah atau jalan hidup yang diikuti, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan. Keempat, memberi arti balasan atas perbuatan, pengadilan, dan perhitungan neraca amal (Abu Ridha, 2004).

Dari keempat arti etimologis tersebut dapat dirumuskan konseptualisasi makna ad-din literalnya sebagai jalan hidup yang telah dijelaskan Allah Swt., yaitu: 1) siap mengakui kekuasaan Allah Swt. Sebagai pemegang otoritas mutlak, 2) siap dan pasrah menerima aturan-aturan hukum syariah-Nya, 3) menerima dan mengakui hanya Allah Swt. Sebagai satu-satunya hakim kelak di hari pengadilan.

Dengan demikian, Islam sebagai din yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka konsep siasah atau politik, menurut pandangan Islam adalah bagian integral dari Islam. Ia menjadi sub-sistem Islam. Demikian juga seharusnya kaum Muslimin memandangnya. Aktivitas politik kaum muslimin harus menjadi bagian aktivitas keislaman mereka. Karakteristik Islam

hendaknya menjadi karakteristik seluruh aktivitas kaum muslimin, termasuk aktivitas politik.

2.5. Hakikat Manusia Dalam Politik Berdimensi Sosiologis

Memisahkan kehidupan manusia dengan politik adalah suatu hal yang mustahil atau tidak mungkin. Sebagai makhluk sosial tidak bisa seseorang hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk dalam bidang politik.

Sejak manusia pertama kali berpikir tentang politik, mereka terombang-ambing dalam dua tarikan interpretasi yang saling bertentangan secara diametrik. Bagi sebagian orang politik secara hakiki adalah pergolakan pertempuran. Kekuasaan memungkinkan kelompok-kelompok dan individu-individu yang memegangnya untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dan untuk mengeksploitasinya; kelompok dan individu lain menentang dominasi dan eksploitasinya dengan berusaha melawan dan membinasakannya. Tafsiran kedua menganggap politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Kekuasaan melindungi kemakmuran dan kepentingan umum dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan yang khusus. Bagi yang pertama, politik bertugas untuk mempertahankan hak-hak istimewa suatu minoritas terhadap mayoritas. Bagi yang kedua, politik adalah alat untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan "kota adil" yang dibicarakan Aristoteles (Duverger, Maurice: 2003).

Mengkaji politik Islam adalah merupakan suatu “kewajiban” dalam agama. Politik Islam mengimpleme perintah Allah di muka bumi sekaligus sebagai medium pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah Allah. Fungsi utama pemerintahan Islam adalah memberdayakan komunitas Muslim sehingga memiliki kesanggupan untuk menduduki posisinya yang hakiki pada titik puncak peradaban manusia (Baqir ash-Shadr:2001). Dalam pada itu, komunitas muslim akan mampu mengelakkan diri dari berbagai penyelewengan, kemunduran, dan berbagai penyakit social lainnya. Singkatnya, tegaknya pemerintahan Islam merupakan satu-satunya cara guna mengaktualisasikan secara optimal segenap kemampuan manusia yang tersembunyi.

BAB III

PARADIGMA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Terminologi yang muncul di tengah kehidupan modern untuk menggambarkan aktivitas perubahan sosial terencana adalah pembangunan. Sejak akhir tahun lima puluhan dan awal tahun enam puluhan, pembangunan disamakan artinya dengan kemajuan dan modernisasi.

Menurut konsep ini, perbaikan lingkungan fisik atau kemajuan material merupakan fokus dari berbagai aktivitas pembangunan. Negara sedang berkembang atau negara terbelakang diartikan sebagai negara yang dalam bidang industri, ekonomi, teknologi, kelembagaan, dan kebudayaan sedang berusaha untuk maju meniru model negara maju di Barat.

Implementasi konsep pembangunan semacam itu akan menihilkan perlindungan terhadap lima aspek utama kebutuhan dasar manusia (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan). Karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam atas konsep pembangunan yang akan diterapkan.

Urbanisasi dan industrialisasi melahirkan masalah kebodohan, kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan rasa tidak tenteram. Berbagai analisis mutakhir atas dampak ideologi *developmentalisme* Barat memperlihatkan suatu simpulan, bahwa pembangunan telah menyeret manusia kepada enam ancaman serius: industri yang tak terkendali; mengeringnya sumber-sumber alam (seperti energi, hutan, pangan dan air); tekanan per kapita yang telah melampaui titik kritis atas tanah dan lingkungan; limbah industri dan rumah tangga yang terus bertambah; perlombaan senjata nuklir, kimia dan biologi; dan pertumbuhan serta

penyebaran penduduk dunia secara tidak terkendali. Dalam semua itu manusia lebih diposisikan sebagai alat pembangunan.

Bangsa Indonesia harus segera merumuskan ulang paradigma pembangunannya dengan menyaring konsep yang datang dari luar secara kritis dan tepat, dan berani mengungkapkan gagasan-gagasan orisinalnya.

Platform Kebijakan Pembangunan versi PK Sejahtera berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku, AD/ART, Renstra, Falsafah Dasar Perjuangan Partai, serta Paradigma Nasional (konsensus nasional), yang mengandung nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid), Demokrasi (syura), Hak Asasi Manusia (maqashid syari'ah), Pluralitas Persatuan dan Kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai tersebut menjadi landasan idiil kehidupan bersama; serta nilai-nilai dalam UUD digunakan sebagai landasan konstitusional Platform Kebijakan Pembangunan versi PKS.

Tujuan didirikannya PK Sejahtera (AD-ART PKS) yaitu :

- (1) *Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan*
- (2) *Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang dilalui garis khatulistiwa.

Renstra PK Sejahtera 2005-2010 menjadi landasan operasional Platform kebijakan pembangunan dalam rentang waktu tersebut. Renstra yang menjadi arah pergerakan PK Sejahtera selama interval waktu 2005-2010 ini mengamanatkan arah perjuangan dalam melipatgandakan aset-aset mobilitas dan pencitraan dalam rangka membangun diri menjadi Partai Dakwah yang kokoh untuk melayani dan memimpin bangsa.

3.1 URGENSI IDEOLOGI

Ideologi sebagai istilah mulai diperkenalkan selama Revolusi Perancis oleh Antoine Destutt de Tracy dan pertama kali digunakan ke publik pada tahun 1796. Bagi Tracy, ideologi dimaksudkan dengan “ilmu tentang ide” yang diharapkan dapat mengungkap asal-muasal dari ide-ide dan menjadi cabang ilmu baru yang kelak setara dengan biologi atau zoologi. Namun, makna ideologi berubah di tangan Karl Mark melalui kerja awalnya dalam buku *The German Ideology* yang ditulis bersama F. Engels.

Sebagaimana penjelasan Frank Bealey (*Blackwell*, 2000), kini ideologi lebih diartikan sebagai sistem berpikir universal manusia untuk menjelaskan kondisi mereka, berkaitan dengan proses dan dinamika sejarah, dalam rangka menuju masa depan yang lebih baik.

Berakar pada kaum liberalis, ideologi diartikan sebagai sistem kepercayaan individu tentang dunia yang lebih baik, sehingga tampak sebagai pola berpikir (*mind-set*) bagi penganutnya. Ideologi pun dapat dilihat sebagai “cara pandang dunia” (*world view*) penganutnya untuk menilai situasi

keseharian mereka dalam rangka mencari jalan untuk mewujudkan kehidupan terbaik di masa yang akan datang.

Namun berdasarkan kecenderungan masyarakat masa kini, ideologi dipandang sebagai kumpulan ide atau konsep mengenai cara hidup (*way of life*) diwarnai oleh budaya dan tatanan masyarakat serta kehidupan politik. Ideologi memiliki unsur konsep atau ide yang diyakini serta diaplikasikan sebagai cara pandang menghadapi masa depan. Ideologi sarat dengan dimensi “keyakinan” dan “utopi”.

Ideologi adalah sistem kepercayaan atau tata nilai yang diperjuangkan dan dijabarkan secara sadar oleh para pemeluknya dalam totalitas kehidupan, terutama dalam jagad sosial-politik.

Ideologi menjadi visi yang komprehensif dalam memandang sesuatu, yang diformulasi secara sistemik dan ilmiah dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dan segala metode pencapaiannya.

Ideologi berisi pemikiran dan konsep yang jelas mengenai Tuhan, manusia dan alam semesta serta kehidupan, dan mampu diyakini menyelesaikan problematika kehidupan. Dalam konsep ini, maka tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa ideologi. Manusia tanpa ideologi hanya akan mengejar kemajuan material, namun mengalami kehampaan dalam aspek emosional dan spiritual, sehingga teralienasi dan kehilangan identitasnya yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup.

Ideologi menyediakan kejelasan arah bagi manusia, dorongan, pembenaran dan dasar bagi aktivis untuk bergerak menggulirkan agenda dan aksi-aksinya.

Karenanya, ideologi menyediakan *elan vital*, *etos*, dan bahkan *militansi* perjuangan. Semangat rela berkorban adalah refleksi keyakinan ideologis.

Dimensi “ide” dari ideologi memberikan bingkai konsepsi bagi pemahaman, arah perjuangan, dan dasar pergerakan bangsa. Sementara dimensi “keyakinan” dan “utopi” memunculkan komitmen, militansi, dan fanatisme positif yang memicu gairah dan darah perjuangan, sekaligus memompakan api semangat rela berkorban. Itulah yang terjadi di awal-awal kemerdekaan atau masa jauh sebelum kemerdekaan di era para pendiri bangsa ini berjuang bahu-membahu merebut kemerdekaan.

Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpin, yang kemudian dilanjutkan Orde Baru dengan pragmatisme politiknya, praktis memandulkan ruh ideologi dari hati manusia-manusia Indonesia. Orde Baru dengan jargon pembangunanisme telah mengarahkan mata bangsa Indonesia hanya pada pembangunan ekonomi. Modernisasi, pasar bebas, hubungan-hubungan pembangunan yang lebih mementingkan tujuan jangka pendek, tumbuhnya elit kelas menengah yang sibuk dengan profesi, serta kompromi-kompromi pragmatis, meminimalkan perhatian orang pada aspek ideologi.

Jargon yang diadopsi adalah seperti apa yang dikatakan Deng Xiao Ping, *“Tidak penting apakah kucing berwarna hitam atau abu-abu, yang penting dapat menangkap tikus.”*

Di sisi lain, asas tunggal Pancasila yang dipaksakan penguasa melalui indoktrinasi, tafsir tunggal dan sakralisasi terbukti tidak membawa kebaikan bagi bangsa ini. Stigma anti-Pancasila sebagai alat penghalau musuh-musuh politik Orde Baru secara represif telah menjadi trauma politis-ideologis yang

masih membekas. Kondisi itu menjadi sangat mengesankan ketika praktek sehari-hari rezim Orde Baru justru sama sekali tidak mencerminkan, bahkan mengingkari jiwa Pancasila.

Pancasila menjadi mantra yang indah diucapkan, namun tidak pernah dipraktikkan. Maka, badai yang dituai kemudian adalah kemunafikan massal yang dipertontonkan penguasa otoritarian-militeristik.

Berbeda dengan China yang merasa sebagai bangsa besar dan dengan budaya kuno tinggi warisan ribuan tahun, atau Jepang yang melalui jalur *terno heika* merasa sebagai bangsa keturunan Dewa Matahari (*Amaterasu*), maka Indonesia kontemporer tampak merunduk lesu secara ideologis. Tidak ada cita-cita besar dan heroisme untuk membangun peradaban adiiuhung sebagai bangsa besar.

Budayawan Koentjaraningrat menyebut kita mengidap budaya “menerabas” budaya potong-kompas, budaya *miopis* (rabun dekat). Ingin cepat sukses, kaya, atau berkuasa dengan usaha sedikit, dan kalau perlu tabrak aturan. Tak mampu melihat masa depan yang jauh, paling banter melihat dalam periode “lima tahunan”. Budaya “menanam jagung” yang tiga bulanan, ketimbang budaya “menanam jati” yang harus menunggu puluhan tahun. Budaya “jalur cepat” menuju sasaran, kalau perlu melangkahi kepala orang. Budaya selebritis instan yang ingin populer dalam sekejap. Atau, budaya “satu hari untung beliung”.

Penyakit kronis yang kita idap adalah kurang menghargai mutu, memburu rente dalam ekonomi, politik uang dalam kekuasaan, gelar palsu dalam

pendidikan, barang tiruan dalam perdagangan, serta budaya judi di kampung-kampung.

Dalam budaya pragmatis dan hedonis itu, ideologi tak mendapat tempat, idealisme hanya tersisa di pojok-pojok sempit ruang kuliah atau kelompok diskusi publik.

Bangsa Indonesia sempat bangga ketika pesawat N-250 diluncurkan, seratus persen buatan anak bangsa, terbang *fly by wire* di atas dirgantara pertiwi. Rasa percaya diri dan nasionalisme produktif menyembul di balik baling-balingnya. Namun, emosi itu segera padam bersama diobralnya industri unggulan Indonesia ke pihak asing serta dicabutnya subsidi bagi berbagai industri strategis. Apakah bangsa ini masih punya "mimpi" untuk menjadi negara besar? Atau sekedar menjadi *soft nation*, bangsa yang lembek tanpa militansi. Atau hari-hari berjalan *business as usual*, rutin, tanpa digerakkan oleh "masa depan" yang menantang.

Bangsa ini perlu kembali menata cara pandang, membiakkan mimpi, menfokuskan masa depan, membangun gairah dan militansi, serta menancapkan cita-cita besar yang hidup dan terasakan di dalam hati. Sehingga energi bangsa ini tidak terbuang dalam gerak *chaotic* melingkar, namun mengalir sinergis dan fokus.

Untuk itu, dibutuhkan kehangatan ideologi. Tanpa ideologi manusia hanya berlari mengejar peradaban materi, namun hampa dalam aspek emosi dan spirit. Secara kolektif jadilah kita bangsa yang *adem-ayem*, miskin romantika—negara besar, namun dipenuhi dengan manusia kerdil yang tidak punya utopi.

3.2. FALSAFAH DASAR PERJUANGAN

PK Sejahtera, sebagai entitas politik nasional, secara subyektif berjuang dengan *dasar aqidah, asas, dan moralitas Islam* untuk mencapai *tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat*. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk *diferensiasi* dan sekaligus *positioning* PK Sejahtera sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Di sisi lain dengan menjadikan Islam sebagai aqidah, asas dan basis moral, maka PK Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-subyektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.

Itulah dasar PK Sejahtera secara internal-subyektif dalam menghimpun kader-kadernya dalam barisan yang rapi untuk memperjuangkan aspirasi umat dan mencapai tujuan nasional. Atas dasar itu pula dibangun elan vital, etos, dan bahkan militansi perjuangan para kader, termasuk semangat rela berkorban. Dengan keyakinan, bahwa aktivitas politik bukan sekedar kegiatan profanduniawi, namun sarat dengan dimensi sakral-religi-usukhrawi yang bernilai ibadah, maka dipercaya, bahwa politik bukanlah alat untuk sekedar mengejar kemajuan material-kekuasaan, tetapi hampa dalam aspek

emosional-spiritual, sehingga para kader teralienasi dan kehilangan identitas diri yang sejati, lalu mereka mengalami disorientasi dan kegersangan hidup.

Sebaliknya, aktivitas politik dapat menjadi ruang ekspresi dan menguak potensi diri, sarana untuk peningkatan kapasitas diri, dan juga sebagai tempat bagi kader untuk berkhidmat kepada publik, sebagai bagian dari bentuk pengkhidmatan mereka terhadap agama yang sarat dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan. Darah pergerakan itu menjadi mungkin dengan menempatkan Islam secara internal-subyektif sebagai aqidah, asas, dan moralitas perjuangan PK Sejahtera. *Substansi moralitas perjuangan PK Sejahtera sendiri adalah bersih, peduli dan profesional.*

Dalam tataran kenegaraan, PK Sejahtera meyakini, bahwa pluralitas etnik dan ideologis masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke—yang melebihi panjang dari pantai barat sampai pantai timur benua Amerika—adalah sebuah realita kebhinekaan yang nyata dan obyektif. Indonesia bagai zamrud khatulistiwa, sebagai benua maritim, paru-paru dunia, dengan biodiversitas yang berlimpah, kekayaan alam di darat maupun di laut, secara geografis dan demografis memperlihatkan fakta empiris kekayaan alam disamping pluralitas kekayaan budaya itu.

Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera didasarkan pada Falsafah Dasar Perjuangan PK Sejahtera. Kondisi “Indonesia Baru” yang sesuai dengan arahan ini adalah kondisi ideal normatif yang menjadi harapan masyarakat, bangsa dan negara dan sesuai dengan cita-cita serta tujuan luhur bangsa, yakni “masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat”.

Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang dicitakan adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai tauhid sebagai landasan tata kehidupan mereka. Di dalamnya terisi dengan individu-individu yang bebas dari sikap menzalimi diri sendiri. Berkumpul dalam keluarga yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai kebaikan dan keimanan. Di antara kaum laki-laki dan perempuan terikat dalam relasi yang

proporsional saling melengkapi dalam rangka merealisasikan “amanah” penciptaan manusia. Hak-hak masyarakat terdistribusi secara proporsional hingga terbangun kesederajatan sosial dan kehidupan yang tenteram dan dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani.

Manusia Indonesia hidup dalam tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh. Di sana tegak persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap orang dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan. Mereka berusaha dalam sistem ekonomi egaliter, sebagai cermin dari ekonomi yang berkeadilan, yang memungkinkan perilaku ekonomi yang adil dan memberikan akses yang sama pada seluruh rakyat sehingga kekayaan tidak menumpuk hanya pada segelintir orang yang memicu jurang kesenjangan. Dimana pemanfaatan dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk kesejahteraan manusia Indonesia dan kemandirian bangsa.

Warna-warni kehidupan mencerminkan pluralitas kebudayaan sebagai entitas yang berinteraksi secara harmonis menuju kemajuan peradaban. Individu dan masyarakat mendapat pendidikan yang integratif untuk membangun manusia yang mampu merealisasikan “amanah” penciptaannya menuju kehidupan sejahtera dan kemajuan bangsa.

Itulah masyarakat yang religius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan, tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil dan makmur, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang hidup berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya takwa. Indonesia yang kita citakan adalah kondisi masyarakat yang hidup penuh dengan kasih sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, laki-laki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada :

- Tauhid sebagai landasan tata kehidupan,
- Lingkungan keluarga yang egaliter yang menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai-nilai
- Tatanan kekuasaan yang demokratis, berjalan dalam koridor hukum dan agama, dan rakyat memperoleh hak-hak politiknya secara penuh

Dakwah Islam pada hakikatnya merupakan aktifitas terencana untuk men-transformasi individu dan masyarakat dari kehidupan jahiliyyah ke arah kehidupan yang mencerminkan semangat dan ajaran Islam. Proses transformasi individu yakni pembentukan pribadi-pribadi muslim sejati (*syakhshiyah islamiyah*) dilakukan dalam kerangka transformasi sosial. Sebab terbentuknya pribadi muslim sejati bukanlah tujuan akhir. Oleh karena itu pribadi-pribadi ini mesti memperkaya kualitas dirinya untuk mengemban

3.3. HAKIKAT DAKWAH

- perindungan atas agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.
- manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni kesejahteraan manusia dan kemandirian bangsa terjaminnya secara etis sebagai modal dasar pembangunan peradaban untuk
- Pemanfaatan dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi dinamis menuju terbentuknya masyarakat madani
 - terbangun kesederajatan sosial dan kehidupan yang tenteram dan
 - Hak-hak sosial masyarakat terdistribusi secara proporsional hingga rangka merealisasikan "amanah" penciptaan manusia
 - Relasi gender yang proporsional yang saling melengkapi dalam sejahtera dan kemajuan bangsa
 - merealisasikan "amanah" penciptaannya menuju kehidupan yang
 - Pendidikan integratif untuk membangun manusia yang mampu dengan prosedur dan mekanisme yudisial yang berkeadilan
 - Tegaknya persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap orang

amanah dakwah (*syakhsyyah da'iyah*), sehingga mampu berperan aktif dalam melakukan transformasi sosial.

Dakwah yang dibutuhkan untuk memperbaiki umat adalah suatu gerakan dakwah yang menyeluruh (*dakwah syamilah*), dakwah yang mampu mempersiapkan segala kekuatan untuk menghadapi segala medan yang berat dan rumit. Kekuatan utama Partai Dakwah adalah para kader dakwah itu sendiri.

Dakwah harus mampu mencetak kader-kader yang handal dari berbagai latar belakang kemampuan dan kemahiran yang saling bertaut memberdayakan umat. Dakwah membangun kekuatan SDM dalam suatu jaringan dan barisan, kesamaan fikrah, kesatuan gerak dan langkah, dan kejelasan visi dan misi yang diembannya melalui suatu orkestra kepemimpinan yang cerdas, tangguh dan amanah.

3.3.1 *Grand Strategy Dakwah*

Strategi PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah (*khuthuth 'aridhah*) dalam transformasi bangsa, adalah *gerakan kultural* (strategi mobilisasi horizontal/*ta'biah al afaqiyah*) dan *gerakan struktural* (strategi mobilitas vertikal/ *ta'biah al amudiyah*). Mobilisasi vertikal adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi *mashadirul qarar* (pusat-pusat kebijakan), agar mereka dapat menterjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Sedangkan mobilisasi horizontal adalah penyebaran

kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islami.

Gerakan kultural (strategi mobilisasi horizontal) dilakukan melalui penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam mentransformasi diri sendiri. Dalam gerakan kultural ini, maka kader secara individual maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, yayasan/ormas, lembaga/organisasi lainnya, melaksanakan pelayanan, penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara *bottom-up*.

PKS bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kependudukan, kewanitaan, kemiskinan, dan sebagainya. Karenanya, dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat.

Dalam menjalankan gerakan kultural penyebaran kader dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, dimungkinkan terbangunnya aliansi strategis antara Partai Dakwah dengan simpul simpul kepemimpinan kantong-kantong kultural masyarakat (*mashadirul quwwah*) sehingga terbangun suatu barisan massa yang menerima dan mendukung nilai-nilai dakwah. Aliansi strategis yang terbangun merupakan bentuk kepercayaan atau mandat yang diberikan

masyarakat kepada Partai Dakwah untuk selalu berjuang membela kepentingan masyarakat.

Gerakan struktural adalah penyebaran kader ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan sektor-sektor lain dalam kerangka *melayani, membangun dan memimpin bangsa*, melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu dan pembinaan profesionalisme kader. Tujuannya adalah untuk :

berkontribusi dalam membangun sistem, membuat kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *topdown* digunakan sebagai pedoman dalam rangka transformasi masyarakat. Gerakan struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.

Dalam menjalankan gerakan struktural, dengan dasar kesamaan falsafah atau platform, dimungkinkan terbangunnya *strategic partnership* antara Partai dakwah dengan lembaga dan tokoh yang mempunyai kekuatan untuk merumuskan kebijakan (*mashahidur qoror*) sehingga terbangunnya suatu lapisan pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang membela rakyat. *Grand Strategy* transformasi bangsa yang diusung PK Sejahtera ini tidak lain dari kombinasi antara gerakan kultural dengan struktural, kombinasi antara perubahan yang bersifat *bottom-up* dengan *topdown* yang merupakan ciri khas PK Sejahtera sebagai Partai dakwah.

Grand Strategy transformasi bangsa PK Sejahtera ini adalah suatu gerakan yang menyeluruh dalam berbagai sektor kehidupan

(sektor publik, sektor swasta, dan sektor ketiga) yang bertumpu pada kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi dengan kekuatan integritas moral-religijs dan kualitas-profesional. PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.

3.3.2 Mobilitas Kader

Dakwah dapat ditegakkan secara utuh bila bertumpu pada dua sayap, yakni sayap *syar'iyah* dan sayap *kauniyah*. Sayap *syar'iyah* bermakna bahwa segala kebijakan dan arah dakwah bersandar kepada aturan-aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan sayap *kauniyah* adalah segala aturan, sifat, tabiat dan ketentuan yang terjadi di alam semesta yang merupakan *sunnatullah*. Dengan sayap *syar'iyah*, amal islami selalu berada pada jalan yang benar dan selalu terjaga asholahnya. Melalui sayap *kauniyah*, amal Islami ini menjadi dinamis dan bersesuaian dengan tabiat *kauniyah*.

Keduanya dilihat sebagai saling melengkapi, Karena efektifitas dan dinamika amal islami akan tidak menentu arah dan tujuannya apabila tidak dipagari oleh rambu-rambu *syar'iyah*. Sebaliknya, amal Islami yang berjalan menuju tujuan yang benar akan terasa monoton dan kurang dinamis tanpa dilengkapi dengan sayap *kauniyah*. Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimasi

potensi dan kemampuan (*istiighathul amsal ilil kaja'ah*) kader, baik yang

berada pada sayap syar'iyah maupun kauniyah, dengan tujuan agar

seluruh potensi kader yang terhimpun dapat berkembang dan berfungsi

optimal, untuk mendukung dan memperkuat gerak dan perkembangan

dakwah. Sasaran mobilitas kader sebagaimana telah dijelaskan adalah

penyebaran kader ke berbagai pusat kekuatan dan kekuasaan dalam

rangka mempengaruhi, merumuskan, menjeremahkan, dan

mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan nilai-nilai

Islam.

tiga tahap dalam strategi mobilitas vertikal, yaitu:

- *Pertama*, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di

berbagai *sektor* kehidupan menuju pusat kekuatan dan kebijakan.

- *Kedua*, penapakkan karir kader dakwah dalam organisasi/lembaga

tersebut.

- *Ketiga*, berperan dalam mempengaruhi, merumuskan,

menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar

sesuai dengan manhaj Islam.

Di dalam negara terdapat tiga jenis organisasi/lembaga yang

menjalankan fungsi dari seluruh bidang kehidupan, yaitu birokrasi

pemerintahan (sektor publik), korporasi swasta (sektor privat) dan

organisasi kemasyarakatan (LSM/sektor ke tiga). Dalam kegiatannya

setiap individu merupakan bagian dari organisasi/lembaga tersebut,

atau berada pada dua sektor atau bahkan ketiganya. Mobilitas kader

perlu diarahkan ke berbagai organisasi sektor kehidupan, kemudian menapaki kurva karir dalam setiap sektor yang digeluti dan bergerak secara vertikal. Sesuai dengan kemampuan, kecenderungan, dan kesempatan yang tersedia.

- *Sektor Publik.* Organisasi sektor pemerintahan bersemangat utama *pelayanan* kepada publik, seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Pada hakekatnya, organisasi sektor publik dibentuk melalui kontrak sosial, dimana masyarakat memberikan mandat kepada sekelompok orang—sebagai bagian dari mereka—untuk mengatur, mengelola kebijakan publik, sebagai juri untuk mencegah diskriminasi, mencegah penindasan antara satu orang atau kelompok dalam masyarakat kepada orang atau kelompok lain, serta mempromosikan ikatan sosial di antara mereka. Dalam negara modern, organisasi sektor ini dibentuk melalui kontrak sosial yang terbuka dan demokratis dalam proses politik. Presiden, menteri dan birokrat negara adalah aparat negara dalam sektor publik. Mereka mendapat mandat dari rakyat dalam suatu periode tertentu untuk melaksanakan layanan publik kepada mereka.

Penyebaran kader dakwah sebagai gerakan struktural ke lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dimaksudkan dalam kerangka partisipasi dalam transformasi bangsa melalui mekanisme konstitusional sebagai partai politik yang ikut pemilu. Tujuannya untuk berkontribusi dalam membangun sistem, kebijakan publik, regulasi dan perundangan yang secara struktural dan *top-down* digunakan sebagai pedoman transformasi masyarakat. Gerakan

struktural ini sekaligus berpartisipasi dalam implementasi dan pengawasan pembangunan bangsa.

- *Sektor Swasta (private sector)*. Organisasi di sektor swasta adalah organisasi sektor kehidupan masyarakat yang semangatnya mencari keuntungan, yang bekerja dalam mekanisme pasar. Karenanya motif yang dikembangkan dalam sektor ini adalah motif ekonomi.

Ukuran-ukuran yang ada serta nilai penting yang dianut adalah efisiensi dan produktivitas yang bermuara pada keuntungan material. Sebagian besar masyarakat suatu negara bergerak di sektor ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup diri mereka secara ekonomi menuju kemandirian. Ini adalah *sunatullah*, karena setiap individu mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Penyebaran kader ke sektor ekonomi, pada prinsipnya adalah perjuangan menuju kemandirian ekonomi yang akhirnya memunculkan kekuatan ekonomi bangsa. Kekuatan ini secara langsung sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik dalam perumusan kebijakan publik.

- *Sektor Ketiga (third sector)*. Organisasi/lembaga sektor ketiga, pada hakekatnya adalah pelengkap dari organisasi kedua sektor sebelumnya. Pemerintah, dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, kadang-kadang dalam batas tertentu, memerlukan bantuan masyarakat. Misalnya, dalam soal pelayanan kesehatan, sosial maupun pendidikan. Peranserta masyarakat ternyata dibutuhkan. Hal ini terjadi bukan saja di negara berkembang, juga di negara-negara maju. Peranserta

masyarakat dalam lapangan sosial ini terbukti sangat tinggi. Semangat utama organisasi sektor ini adalah tanggung-jawab individu untuk mengusung tugas sosial mensejahterakan masyarakat. Istilah NGO (*Non-Governmental Organization*) yang disematkan kepada komponen organisasi sektor ketiga ini membuktikan bahwa organisasi sektor ini adalah komponen nonpemerintah yang mengambil peran komplementatif dalam upaya mensejahterakan masyarakat—sebuah tugas yang secara normatif semestinya dilaksanakan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari masyarakat, organisasi sektor ketiga juga berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi kualitas layanan publik pemerintah, termasuk juga terhadap regulasi yang dikembangkan pemerintah. Karenanya organisasi sektor ini bermata dua. Satu matanya dihadapkan kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas komplementatif pemerintah dalam pelayanan publik. Sedangkan mata lainnya dihadapkan kepada pemerintah untuk mengawasi kualitas pelayanan publik.

Penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat adalah untuk menggerakkan peranserta masyarakat dalam mentransformasi diri mereka sendiri. Dalam gerakan kultural ini, maka kader secara individual maupun institusional melalui yayasan dan ormas yang ada melaksanakan penyuluhan dan perbaikan masyarakat secara *bottom-up*. Kader PK Sejahtera akan bergerak bersama masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Karenanya dibutuhkan dan harus ditumbuhkan kader-kader

yang profesional dalam berbagai bidang kehidupan untuk dapat bergerak bersama masyarakat.

3.3.3 Peluang Mobilitas Vertikal

Secara umum mobilitas vertikal kader sangat ditentukan oleh dua faktor; yakni faktor kualitas dan peluang (jaringan). Kualitas kader berkaitan dengan kredibilitas personal, yakni profesionalitas, integritas moral dan keluwesan sosial. Sedangkan peluang mobilitas vertikal sangat ditentukan oleh kondisi internal dan eksternal. Paling tidak ada empat hal yang berkaitan dengan peluang mobilitas vertikal kader dakwah, yakni perubahan konteks, peran aksi politik, penataan kader dan kondisi obyektif internal.

Perubahan Konteks. Dinamika mobilitas dalam sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh sifat atau jenis masyarakatnya. Secara ekstrim masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis:

a. Masyarakat feodal atau berkasta (*feudal or caste society*)

Dalam masyarakat seperti ini strata sosial ditentukan oleh status bawaan (*ascribed status*) dan bersifat kaku sehingga mobilitas hampir mustahil terjadi. Masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat tertutup (*closed society*). Contoh jenis ini adalah kasta-kasta di India atau pemisahan priyayi-wong cilik di Jawa yang hampir tidak memungkinkan adanya perubahan strata sosial anggotanya.

b. Masyarakat sederajat (*egalitarian society*)

Dalam masyarakat seperti ini strata sosial ditentukan oleh prestasi (*achieved status*) atau meritokrasi dan bersifat cair sehingga mobilitas sangat terbuka lebar. Masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat terbuka (*open society*). Contohnya adalah apa yang terjadi di beberapa negara maju yang memungkinkan perubahan strata sosial lebih mudah terjadi.

Sebelum terjadi reformasi, Indonesia lebih cenderung bersifat feodal, sehingga mobilitas agak sulit terjadi. Kecenderungan ini sebenarnya masih terbawa di era reformasi. Meskipun demikian di era reformasi ini ada kecenderungan positif menuju masyarakat yang lebih egaliter. Bila disimpulkan beberapa indikasi ke arah masyarakat egaliter tersebut adalah:

- a. Adanya tuntutan transparansi dalam berbagai proses politik, sosial, dan ekonomi (*transparency*);
- b. Adanya permintaan pertanggungjawaban publik atas seluruh posisi-posisi penting negara dari sisi profesionalisme dan sisi moralitas (*public accountability*).
- c. Semakin terbukanya peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses politik dan pengambilan kebijakan pembangunan secara umum (*participatory management*).

Dengan adanya kecenderungan positif tersebut, dalam jangka pendek masyarakat akan condong pada pilihan-pilihan

rasional sesuai prinsip meritokrasi. Pada saat inilah peluang-peluang mobilitas vertikal akan terbuka lebar.

Peran Amal Siyasi. Seiring dengan perluasan orbit dakwah (*mahawir ad-dakwah*) dari mihwar tanzhimi (strukturalisasi) dan sya'bi (sosialisasi) ke mihwar muassasi (institusionalisasi) dalam berbagai program politik, maka peluang dakwah berubah secara dinamis. Dengan digulirkannya dakwah melalui kelembagaan formal ini, kapabilitas internal yang terkait dengan keberadaan institusi dakwah beresonansi dengan dinamika sosial politik yang ada, yang kemudian memunculkan peluang untuk masuk ke pusat-pusat kebijakan. Antara lain, masuknya aktivis dakwah ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif.

Kondisi di atas perlu ditindak-lanjuti dalam rangka menciptakan peluang mobilitas vertikal, yakni dengan membangun link-birokrasi melalui kekuatan kader politisi, baik dalam eksekutif maupun legislatif. Meskipun ada kecenderungan pembatasan jabatan politis dalam birokrasi, namun kekuatan link-birokrasi ini dapat memunculkan peluang bagi mobilitas vertikal kader dakwah baik dalam birokrasi maupun lembaga-lembaga negara yang lain.

Agenda mobilitas ini sudah tentu sejalan dengan reformasi birokrasi, dan bukan semata-mata mengejar kekuasaan. Penataan kader. Penataan kader internal lebih tampak sebagai upaya penyiapan kualitas kader, melalui pengembangan dan pemungisian potensi kader. Secara kolektif, upaya ini akan memperlebar

peluang mobilitas vertikal kader dakwah. Karenanya penataan kader adalah bagian vital bagi perencanaan maupun implementasi kebijakan mobilitas vertikal.

Memasuki era pelembagaan kondisi internal ditandai dengan proses akselerasi, baik kader maupun infrastruktur dakwah. Secara umum kader dakwah adalah pemuda dengan intelektualitas tinggi yang berada dan berperan di berbagai sektor. Kebijakan mobilitas vertikal mempunyai peluang yang baik untuk dilaksanakan di berbagai sektor. Karenanya penataan kader dan pemunculan peluang menjadi upaya yang strategis.

Untuk keberhasilan implementasi konsep mobilitas vertikal kader dakwah, perlu dirumuskan strategi pencapaiannya. Strategi tersebut diturunkan berdasarkan realitas kondisi eksternal dan internal dan dibagi menjadi dua, yakni strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum adalah strategi mobilitas vertikal yang berlaku umum untuk seluruh kelompok strategis, sementara strategis khusus adalah strategi yang diaplikasikan secara khusus untuk kelompok strategis tertentu.

Secara umum strategi mobilitas vertikal kader dakwah adalah upaya-upaya strategis dan sistematis berupa kombinasi antara penataan dalam rangka meningkatkan:

a. *kredibilitas individual* dan

b. penciptaan *peluang*.

Upaya membangun kualitas individual diarahkan pada tiga aspek, yakni:

- *kredibilitas profesional (core competence, manajerial, berpikir strategis* sesuai dengan bingkai pengembangan potensi),
- *integritas moral* dan;
- *kredibilitas sosial*.

Hasil pembinaan kader dengan arahan di atas akan mewujudkan kader dakwah yang mempunyai *kredibilitas individual yang profesional, bersih dan peduli*.

Dalam rangka penataan kader dan penciptaan peluang bagi mobilitas vertikal, maka memanfaatkan potensi-potensi yang ada secara harmonis, baik internal maupun eksternal. Pemanfaatan kekuatan eksternal dilakukan dengan cara:

- a. *pemagangan*, yakni bekerja di lembaga-lembaga eksternal untuk menimba pengalaman;
- b. *interaksi positif* dengan pihak-pihak luar;
- c. *outsourcing* terhadap pakar-pakar eksternal, lembaga-lembaga eksternal dan lain-lain.
- d. penataan kader dengan memperhatikan *arus luar*, sehingga program dakwah sejalan perkembangan masyarakat dan memunculkan sinergisme eksternal melalui upaya memperbanyak simpul-simpul kesamaan dengan pihak eksternal.

Perumusan *proyeksi kader* yang memerlukan proteksi, tugas khusus dan evaluasi khusus dalam rangka *targeting* dan *focusing* harus dipertimbangkan. Pemberdayaan kader bukanlah proses yang sekali jadi atau seperti menanam jagung yang hasilnya segera dapat dipanen dalam waktu singkat. Proses pemberdayaan kader dalam bingkai pengembangan potensi adalah proses seperti “menanam jati”, yang hasilnya baru dapat dipanen puluhan tahun mendatang. Sebagai sebuah proses yang bertahap, proses pembinaan kader memerlukan kesabaran dan wawasan. Untuk memunculkan seorang ahli/pakar di bidang tertentu, maka secara kultural kader harus melalui tahapan demi tahapan jenjang karir (*learning curve*).

- Pematangan Diri.

Tahap pertama adalah fase pematangan diri. Pada tahapan ini terjadi proses pematangan segenap aspek kader. Indikator kematangan tersebut adalah:

- a. matang dalam *aspek teknis* di bidangnya;
- b. matang dalam *pilihan profesionalisme*;
- c. mulai menemukan *jatidiri*;
- d. *dikenal di lingkungan profesi* di bidangnya.

- Pematangan Kemampuan.

Tahap kedua adalah fase pematangan kemampuan. Pada tahapan ini terjadi proses pematangan kemampuan pada kader. Indikator kematangan tersebut adalah:

- a. *pemahaman filosofis* bidang profesinya;
- b. *pemahaman multi aspek* pengembangan ilmunya;

c. kemampuan *lobby*;

d. pemikirannya *mulai mempengaruhi kebijakan nasional*.

- Pematangan Peran.

Pada tahap ketiga adalah fase pematangan peran. Pada tahapan ini terjadi proses pematangan peran pada kader. Indikator kematangan tersebut adalah:

a. mulai berperan di *tingkat nasional*;

b. dikenal di tingkat internasional;

c. mengetahui multi aspek profesinya dan kaitannya dengan profesi lain.

- Kearifan Filosofis.

Pada tahap keempat adalah fase kearifan filosofis. Pada tahapan ini telah tercapai dan muncul kearifan pada diri kader. Indikator kearifan tersebut adalah:

a. kaya pengalaman di kancah nasional dan internasional;

b. berperan di *tingkat internasional*;

c. menjadi *rujukan*.

Proses pengembangan karir di atas adalah tahapan-tahapan normal. Namun tidak menutup kemungkinan kondisi khusus, dimana seseorang dapat mencapai kematangan dan kearifan filosofis pada usia yang relatif lebih muda. Masalahnya, sulit merekayasa kondisi khusus itu untuk mengakselerasi kematangan kader secara massal.

Tahapan pematangan kader di atas mirip dengan konsep stratifikasi kompetensi kader (*haramul kafa'ah*). Bersama penambahan pengalaman

dan kedalaman ilmu, maka seseorang akan terus meningkat dan menajam secara vertikal dari basis:

- a. Harakiyah (pergerakan);
- b. Fikriyah (pemikiran);
- c. Siyasiyah (kebijakan).

3.3.4 Orbit Dakwah

Li kulli marhalatin ahdafuha, li kulli marhalatin rijalaha. Dalam setiap tahapan dakwah ada tujuan dan tokohnya masing-masing. Setiap tahap bersifat unik, bukan sesuatu yang bersifat generik. Itu adalah prinsip dakwah yang tidak dapat diingkari. Kader dakwah perlahan tapi pasti melakukan mobilitas ke berbagai lembaga yang menjadi pusat kebijakan, mengaktualisasikan peran secara lebih maksimal serta mengekspresikan diri secara lebih terbuka, terlibat dalam menerjemahkan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan publik.

Kader dakwah juga melakukan mobilitas horizontal ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat, menyiapkan masyarakat agar mereka menerima manhaj Islam serta produk kebijakan yang Islami.

Sebenarnya tak ada yang luar biasa dengan capaian itu, suatu keniscayaan di tengah eksistensi umat yang mayoritas di negeri ini. Bahkan tidak terlalu salah kalau dikatakan, bahwa capaian itu agak terlambat. Namun kita juga tidak bisa menolak argumen, bahwa perubahan itu bukanlah suatu proses yang tiba-tiba atau secara *sim salabim* terwujud, tapi dengan sebuah sebab-musabab dan kerja keras. Setiap pemenuhan

orbit dakwah adalah mukadimah bagi orbit berikutnya. Karenanya *mihwar dakwah* tidak bersifat diskrit tapi kontinyu, dan perubahan dari mihwar yang satu ke mihwarlainnya merupakan perluasan jenjang pelayanan dan kepemimpinan.

Kalau diringkas, aktivitas dakwah kita kini telah melalui tiga fase perjuangannya (*mahawir ad dakwah*). Pertama adalah *mihwar tanzhimi*, pada tahap ini fokus utama dakwah adalah konsolidasi dan pembinaan kader. Tahap ini merupakan suatu keniscayaan dalam membangun kekuatan internal. Karenanya kata kunci gerakan dakwah pada fase ini adalah pengokohan internal, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur dakwah. Pekerjaan kaderisasi (*tajnid*) menjadi penekanan, karena itu prinsip yang sering dikemukakan adalah “tarbiyah/pembinaan bukanlah segalanya, namun segalanya dimulai dari tarbiyah”. Dalam tahap ini yang dibangun adalah kekuatan fondasi internal. Potensi pembina menjadi tulang-punggung gerakan dakwah. Konsolidasi internal dan pertumbuhan bola salju dakwah adalah target-target kuantitatif penting yang dikembangkan. Dalam fase ini yang dibutuhkan

pembentukan kepribadian *Islami* dan *da'iyah*—sebuah proses yang pekat dengan semangat *inward looking* dan relatif terlindungi dari pengaruh dunia luar. Pembeneran tahap dan proses ini dalam sirah nabawiyah adalah pada fase Makkah dalam majelis Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abil Arqam.

Orbit *kedua* dakwah adalah Orbit Masyarakat (*mihwar sya'bi*) dimana aktivitas dakwah mulai mengalirkan energinya untuk kepentingan

masyarakat secara umum melalui gerakan *amar ma'ruf wa nahyi munkar*, yakni layanan dalam berbagai bidang kehidupan—melalui instrumen organisasi keumatan—terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan berbagai kegiatan lainnya. Kata kunci dalam orbit dakwah ini adalah *pelayanan*. Dalam orbit ini tak heran kalau rumah sakit-rumah sakit Islam bermunculan, sekolah-sekolah Islam terpadu dan Universitas Islam, BMT dan bank syariah, serta lembaga layanan umat lainnya berdiri.

Sudah barang tentu ada banyak berkah dalam orbit ini. *Pertama* berdirinya berbagai LSM dakwah sebagai wajah untuk berinteraksi dengan publik. Memang wajah itu sendiri—dalam *mihwar sya'bi*— belum menjadi tujuan dan perhatian utama, namun efek bergandanya tetap ada. Secara sosiologis adanya wajah memudahkan kader dakwah berinteraksi dengan publik. *Kedua*, tokoh-tokoh internal secara tidak langsung lebih berpeluang untuk muncul ke wilayah publik (*syakhsiyah barizah*). *Ketiga*, munculnya peluang menarik tokoh luar untuk berhimpun di sekitar institusi dakwah. *Keempat*, secara kelembagaan institusi dakwah yang dibangun berpeluang menjadi lembaga penekan atau lembaga advokasi masyarakat. *Kelima*, pengelolaan lembaga dakwah secara profesional memungkinkan munculnya optimalisasi potensi dan pengempangan profesi bagi kader dakwah yang mengelola lembaga dakwah tersebut. Ternyata dalam banyak contoh terlihat, bahwa penyatuan antara aspek profesional dan dakwah dalam satu institusi tertentu memunculkan sinergi dan efisiensi yang sangat besar.

Orbit dakwah *ketiga* adalah Orbit Pelembagaan (*mihwar muasasi*) dimana kader dakwah mulai masuk ke dalam lembaga publik, baik di parlemen, birokrasi maupun lembaga-lembaga profesi lainnya. Mereka berkontribusi dalam lembaga-lembaga tersebut dengan menampakkan integritas moral serta kualitas profesional dan kepakarannya. Kata kunci dalam Orbit dakwah ini adalah *kepakaran*. Misi utama kader dakwah naik secara vertikal (*mobilitas vertikal*) dan melakukan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga publik ini adalah untuk mempengaruhi, menerjemahkan, atau merumuskan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakankebijakan publik yang dihasilkan lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjalankan misi ini sudah barang tentu—sekali lagi—menuntut kepakaran kader.

Dakwah dalam sektor publik dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Dakwah Parleментар
2. Dakwah Birokrasi

Dakwah parleментар merupakan perluasan medan dakwah, yakni dakwah dalam mimbar resmi negara untuk berjuang secara konstitusional bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dakwah parleментар adalah salah satu bentuk *amar ma'ruf nahyi munkar* dalam mimbar demokrasi yang mempunyai fungsi kontrol atas pemerintah (*hisbah*) dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dalam mimbar parleментар ini pula

dapat diperlihatkan kepada masyarakat, bahwa Islam adalah agama yang sempurna (*syamil*) dan Islam adalah solusi. Karenanya dakwah parlemen menuntut fungsi:

1. Legislasi (*taquin*);
2. Pengawasan (*hisbah*);
3. Pernyataan publik (*tabligh*).

Dakwah birokrasi adalah dakwah dalam kancah eksekutif dalam upaya untuk menerjemahkan, mempengaruhi, menafsirkan dan melaksanakan agar kebijakan publik sesuai dengan nilai-nilai Islam demi meiyani masyarakat dan dalam rangka mensejahterakan mereka. Program reformasi pemerintahan untuk menegakkan pemerintah yang bersih -- bebas dari virus KKN-- serta terjadinya mobilitas vertikal kader dakwah dalam birokrasi. Fungsi utama dakwah dalam birokrasi adalah:

1. Penerjemahan dan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik yang ada dalam rangka islamisasi kehidupan dan menegakkan nilai-nilai Islam;
2. Pelayanan publik;
3. Reformasi pemerintahan menuju *clean government*;
4. Mobilitas vertikal kader dakwah.

Fase dakwah ke tiga di atas sangat kentara merupakan perluasan dari fase ke dua. Kalau dalam Orbit Masyarakat, mulai muncul institusi dakwah sebagai wajah untuk berinteraksi dengan publik, maka dalam Orbit Lembaga pemikiran untuk mengokohkan institusi yang didirikan mulai mendapat penekanan. Pembelajaran untuk mengelola lembaga

dakwah secara profesional menjadi penting, termasuk juga peran dalam institusi negara. Sehingga, dalam Orbit ini, kader dakwah menyebar secara horizontal ke seluruh lembaga masyarakat, baik di sektor privat, publik maupun sektor ketiga, dan mengokohkan peran mereka dalam lembaga-lembaga tersebut. Pada orbit ini interaksi dengan publik mulai dilakukan secara institusional melalui organisasi politik dengan doktrin *al hizb huwal jama'ah al jama'ah hiyal hizb*—bukan secara individual atau parsial melalui wajah-wajah LSM.

Sampai di sini dapat dipahami kalau kriteria utama dalam Orbit Lembaga adalah *profesionalitas*. Dalam bingkai ini, maka yang perlu diusung adalah kader dakwah yang memahami nilai-nilai Islam dan memiliki komitmen tinggi bagi perwujudannya, yang memiliki kredibilitas moral, kredibilitas sosial dan kredibilitas profesional. Kader yang bukan saja memiliki integritas moral yang tinggi dalam menggusung perubahan serta mampu berinteraksi sosial secara harmonis di dalam lingkungannya, namun juga profesional di bidangnya.

Ada tiga pilar profesionalitas yang diperlukan untuk itu, yakni berkaitan dengan *core competence*, *managerial*, dan *strategic thinking*. Seorang profesional dalam bingkai ini adalah ilmuwan yang manajer, dan manajer yang mampu berpikir strategis (negarawan). Ia bukan hanya unggul dalam kompetensi ilmiahnya, namun juga mampu mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya secara sinergi untuk kepentingan dakwah, dan terbiasa berpikir strategis.

Mungkin ada yang bertanya, mengapa terlalu banyak kualifikasi yang digantungkan pada kader? Tak ada pilihan, karena kini kita memasuki zaman dimana kompetisi ideologis menggunakan bahasa infrastruktur sosial-budaya-politik yang makin canggih. Hanya mereka yang fasih dengan bahasa infrastruktur canggih itu yang dapat menanamkan pengaruh dan meraih kemenangan. Kita memerlukan tokoh yang siap melakukan islamisasi kehidupan dengan mengalahkan pengaruh para kompetitornya.

Pada titik ini para pakar menjadi penting ditumbuhkan dan tampil ke muka untuk menggusung perubahan. Sifat integralitas Islam menuntut ketersediaan para pakar dalam seluruh dimensi hidup manusia.

Orbit terakhir yang perlu dilalui adalah Orbit Negara (*mihwar daulah*). Ini adalah Orbit dimana dakwah telah memasuki pengelolaan institusi negara secara penuh dan sekaligus merupakan perluasan dari Orbit Lembaga. Kalau dalam orbit sebelumnya, interaksi dengan sektor negara dalam birokrasi dan lembaga negara lainnya (politik, legislatif, eksekutif dan lainnya) masih dilaksanakan secara individual dan parsial, maka dalam orbit ini interaksi dilakukan secara total.

3.3.5 Fungsi dan Urgensi Wajihah

Kekuatan dakwah sangat memerlukan dukungan masyarakat (Hilmi Aminuddin, 2003). Mereka adalah basis kekuatan bagi para aktivis dan kader dakwah dalam rangka memapankan gerakan perubahan. Bila landasan kekuatan masyarakat ini rapuh, maka akan rapuh pula bangunan

dakwah di atasnya. Umumnya, masyarakat selalu melihat fenomena dakwah dari hal-hal yang kongkrit di depan mata mereka.

Sementara itu kita pahami tidak semua kebijakan dakwah dapat dimunculkan ke permukaan. Oleh karena itu diperlukan payung (*mnizhalah*) atau wajah (*cover*) yang tepat untuk berbagai posisi dan keadaan. Dengan cara ini gerakan dakwah dapat memenuhi tuntutan pembinaan masyarakatnya tanpa harus keluar dari manhaj yang telah digariskan Rasulullah SAW.

Wajah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam gerakan dakwah. Melalui wajah proses transformasi dan perubahan ke arah perbaikan dapat berjalan secara efektif. *Wajah* dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya untuk berbagai tindakan teknis, taktis maupun strategis seperti: menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat, mendidik dan mengembangkan sumber daya umat, melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, menggalang opini umum, menggerakkan dan memobilisasi massa untuk tujuan tertentu, mengajak masyarakat untuk berbuat produktif, meraih dukungan dan simpati publik, melibatkan masyarakat untuk proyek tertentu, mengajukan usul dan saran bagi pemecahan masalah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Wajah dapat berupa organisasi profit atau lembaga nirlaba yang mewujudkan dalam berbagai bidang kerja. Wajah dibentuk untuk kemaslahatan umat, sebagai sarana bagi gerakan dakwah yang memerlukan proteksi. Dengan misi utamanya memberikan layanan, perlindungan, pembelaan, pendidikan, pemberdayaan, dan penerangan

kepada kelompok masyarakat tertentu, maka wajahah menjadi sangat efektif untuk merealisasikan misi Islam yang membawa rahmat bagi semua orang. Dengan adanya wajahah, format dakwah bukan lagi hanya dalam konteks menjelaskan dan mendidik mereka menjadi seorang muslim yang baik, tetapi juga menjadi wahana bagi kader untuk memberikan layanan dan bantuan yang sangat diperlukan umat, sebagaimana yang dipuji oleh Allah SWT: “ *wa man ahsanu qaulan min man da'a ilallah wa 'amila shalihan...* “ (QS Al Fushhilat:33)

Setidaknya ada dua jenis wajahah yang dapat dikembangkan, yaitu *wajahah tanzhim*, yang langsung terkait dengan salah satu struktur partai, yang tidak bertentangan dengan undang-undang kepartaian, sepenuhnya dikelola dan dikendalikan oleh personil-personil yang duduk dalam struktur partai. Jenis wajahah yang lainnya adalah *wajahah amal*, yang secara peraturan perundang-undangan tidak bisa dikaitkan dengan partai, merupakan penjelmaan aktivitas kader dalam suatu institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang garapan tertentu. Dengan kata lain *wajahah amal* dikelola dan dikendalikan sepenuhnya oleh anggota-anggota gerakan dakwah dan dapat melibatkan orang-orang lain yang tidak memiliki hubungan struktural dengan struktur partai dakwah.

Sementara itu, struktur partai hanya memberikan arahan dan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum. Wajahah, baik *tanzhimi* maupun *amali*, dibentuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Grand Strategy dakwah, dan diposisikan serta difungsikan sebagai perpanjangan tangan kebijakan partai dakwah. Wajahah juga dapat memainkan peranan yang

sangat berarti dalam mempengaruhi dan menekan proses pengambilan kebijakan pihak-pihak yang berwenang agar sesuai dengan misi dakwah dan berpihak kepada kebenaran dan kemaslahatan. Peran ini akan semakin efektif ketika wajah-wajah menjalin kerjasama taktis dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Dengan peran yang sedemikian penting dalam kancah dakwah, maka menjadi wajarlah apabila dalam mobilitas horisontal, keberadaan wajah-wajah menjadi ujung tombak bagi percepatan ekspansi dakwah. Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas wajah-wajah di seluruh wilayah dakwah, pesan-pesan dakwah akan semakin efektif menyebar dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Diperlukan suatu rencana aksi yang jelas dan terarah untuk meningkatkan keberadaan wajah-wajah hingga dapat meningkatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat melalui serangkaian pembinaan yang efektif dan berkesinambungan.

Pembinaan difokuskan pada wajah-wajah yang bergerak dalam lingkup layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum dan menyentuh aspek kebutuhan dasar mereka, yaitu dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial dan kemasyarakatan serta bidang seni dan budaya.

Menata dengan mengembangkan keberadaan wajah-wajah dalam dakwah di mihwar *sya'bi* dan terlebih pula di mihwar muassasi merupakan keharusan untuk:

- Mengefektifkan *mu'assasah* dan *wajihah* yang ada sebagai lembaga pemikir strategis dan sarana dalam optimalisasi hubungan dengan lembaga-lembaga eksternal;
- Mengokohkan eksistensi *mu'assasah* dan *wajihah* dalam tingkat nasional, regional dan internasional ;
- Mendirikan LSM-LSM dan mengembangkan aksi-aksi advokasi sosial, hukum dan politik yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah.

3.4 .DIALEKTIKA ISLAM DAN NEGARA

Dalam konteks ideologis, dialektika antara Islam dan negara adalah masalah yang sangat penting bagi Indonesia, karena di sana tersimpan sumber energi bangsa yang menentukan masa depan. Dialektika ini perlu dibedah dari aspek akar sejarah, kondisi kontemporer, serta inti masalahnya sendiri, baru setelah itu dapat diusulkan solusi rasional, dewasa dan permanen yang mungkin dijalankan.

- *Pertama* adalah aspek historis dialektika Islam dan Negara.

Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui Selat Malaka, menuju pulau Jawa di Jepara dan Gresik. Dari sana penyebaran Islam bergerak menuju Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate. Pada gilirannya, secara struktural berdiri Kerajaan Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Goa, Kerajaan Ternate, dan lainnya. Secara damai, dialogis dan kultural, Islam masuk ke seluruh wilayah Nusantara ini.

Sebagai agama populis, egaliter, dengan etos dan budaya dagang; Islam telah membangkitkan semangat wirausaha para pemeluknya yang terutama tinggal di daerah pesisir. Pemeluk awal Islam Nusantara adalah para pedagang kaya, makmur, dan terpelajar. Segera saja hal itu menjadi daya tarik bagi kaum pribumi.

Pengembangan Islam selanjutnya memunculkan apa yang disebut sebagai pusat-pusat lingkaran peradaban, yakni istana, pesantren, dan pasar. Dengan karakter yang tidak membedakan antara kegiatan agama dan politik, bahkan ekonomi, maka agama ini memiliki struktur-struktur tradisional mulai dari pesantren, madrasah, meunasah, majlis taklim, organisasi dagang, sampai tarekat sufi, pengajian, gerakan pemuda, masjid sampai pranata haji. Struktur-struktur sosial ini selanjutnya menjadi wadah bagi upaya untuk menyediakan kader-kader kepemimpinan Islam.

Para pedagang, mubalig, guru-guru agama, raja-raja pribumi, pangeran, ulama, pemimpin tarekat sufi, wali, sufi pengembara, seniman, sastrawan, cendekiawan, tabib, dan sebagainya memerankan diri dalam transformasi sosial dan budaya masyarakat Nusantara.

Pranata-pranata sosial keagamaan dan budaya yang diciptakan oleh komunitas Islam Nusantara serta penulisan kitab keagamaan dalam bahasa Melayu sangat efektif sebagai faktor pendorong bagi terjadinya integrasi bangsa Indonesia. Sejak abad ke-16 praktis kepulauan Nusantara telah diintegrasikan oleh Islam, agama yang relatif baru dan jauh dari wilayah yang selama ini disebut sebagai pusat dunia Islam. Dalam tiga atau empat abad, Islam mampu menjadi agama rakyat yang dipeluk mayoritas

penduduk Indonesia. Betapa sedikit sekali yang tertinggal dari warisan Hindu di masa lalu, bahkan di pedalaman Jawa sekalipun dan memunculkan pertanyaan mengapa kemenangan Islam begitu komplit (*Religion of Java*, Hodgson, 1974).

Ketika kolonialisme datang di bumi Nusantara, agama dan jiwa kebudayaan Islam yang menolak penindasan, ketidakadilan secara langsung telah menggerakkan sikap penentangan terhadap penjajah. Kesadaran nasionalisme umat Islam pada fase awal dalam praktiknya mengambil bentuk yang beragam, mulai dari perlawanan fisik terhadap kolonialisme (paling lambat sejak awal abad ke-19 dalam bentuk apa yang disebut sebagai pre/proto nasionalisme), sikap anti-kapitalisme, perjuangan mengembangkan identitas yang berbeda dari bangsa asing, serta peningkatan kualitas pendidikan, dan ekonomi masyarakat pribumi. Hal itu dimungkinkan, karena munculnya kesadaran sejarah Islam yang panjang di bumi Nusantara. Kesadaran inilah yang memunculkan nasionalisme Islam, yang berbeda dengan nasionalisme sekuler yang lepas dari agama.

Proto nasionalisme itu, menampakkan wajahnya pada konfrontasi langsung dengan kolonialisme Belanda yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 dengan pecahnya Perang Ternate (1635-1646), Perang Makasar (1660-1669), Perang Trunojoyo (1675-1679) di Jawa, Perang Banten (1680-1682), dan terutama dalam perang antikolonial sejak akhir abad ke-18, ketika VOC bangkrut dan menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada pemerintah Hindia-Belanda.

Pertempuran paling sengit dan menimbulkan kerugian besar bagi pihak Belanda adalah Perang Cirebon (1802-1806), Perang Palembang (1812-1816), Perang Paderi (1821-1838) di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Banjarmasin (1859-1862), dan Perang Aceh (1872-1908). Semua aksi bersenjata ini digerakkan oleh raja-raja, pangeran, ulama, pemimpin tarekat serta santri-santri mereka.

Dalam pergerakan modern menjelang kemerdekaan, institusi penting Islam yang menonjol adalah Syarekat Islam (SI) yang bergerak dalam lapangan politik, Muhammadiyah yang bergerak dalam lapangan sosial dan pendidikan, serta NU yang terutama bergerak dalam lapangan pendidikan pesantren. Syarikat Islam yang merupakan organisasi kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi yang memiliki agenda politik selain ekonomi.

Organisasi berskala nasional dan modern ini menghendaki pemerintahan sendiri oleh rakyat Indonesia dan menuntut kemerdekaan sepenuhnya dari penjajahan. Tujuan lainnya adalah untuk membangkitkan semangat dagang pribumi dan membangun kerjasama untuk melawan kaum pedagang asing, yang mendapat perlakuan istimewa dari penjajah Belanda.

Dari fakta historis di atas, maka sangat jelas, bahwa Islam tidak merintangangi nasionalisme, justru melalui rahim Islam, nasionalisme Indonesia dapat tumbuh subur. Pergerakan-pergerakan Islam sudah lama mempunyai ikatan kebangsaan. Dibandingkan organisasi kedaerahan yang masih berbasis etnik, termasuk Budi Utomo (basis kepentingan priyayi

Jawa), gerakan SI justru bersifat nasional. Islam terbukti berfungsi sebagai faktor integrasi, bahkan lebih jauh lagi akar dari nasionalisme dan pembentukan negara-bangsa untuk kasus Indonesia. SI telah berhasil menarik para pedagang, para pekerja di kota-kota, para kyai dan bahkan sejumlah priyayi serta kaum tani ke dalam gerakan politik massal pertama di jaman penjajahan (Benda, 1958).

- *Kedua* adalah fakta dan kondisi kontemporer hubungan Islam dan Negara.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang relatif baru merdeka, banyak yang masih dihantui oleh masalah mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni masalah stabilitas ideologi. Kerap kali konsensus sejarah dalam memutuskan ideologi negara berakhir tanpa penerimaan total dari seluruh komponen bangsa yang bersangkutan. Ketika Ideologi negara yang melandaskan kebangsaan dalam kasus Indonesia dinegosiasikan secara demokratis di panggung politik, terlihat sekali bahwa proses dialektika tersebut berjalan sangat alot. Hal itu terlihat pada dialog tahap pertama selama diskusi di BPUPKI dan dilanjutkan di PPKI pada tahun 1945, maupun dalam dialog tahap kedua pada sidang-sidang Konstituante pada tahun 1956-1958.

Pada fase pertama dialog nasional, Piagam Jakarta yang memuat tujuh kata, "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,*" yang sebelumnya telah disepakati dalam rapat BPUPKI sebelum lembaga ini dibubarkan pemerintah Jepang, berhasil dicoret dalam sidang PPKI.

Sejarah memperlihatkan, bahwa secara politis penerimaan total pada pencoretan Piagam Jakarta itu tidak terjadi. Komponen Islam belum sepenuhnya menerima tafsiran nasionalis sekuler terhadap dasar negara. Maka, perjuangan untuk menjadikan keyakinan agama—penduduk mayoritas negeri ini—sebagai dasar negara tetap dilakukan, baik melalui perjuangan pergerakan oleh NII sejak 17 Agustus 1949 dan secara konstitusional melalui partai-partai Islam nasionalis seperti Mayumi, NU, dan PSII.

Pada dialog tahap kedua, partai-partai Islam dengan komposisi suara 40% di parlemen kembali dengan sangat alot mempertahankan konsep dasar negara berdasarkan keyakinan agama. Ujung akhirnya adalah ketiadaan kesepakatan Konstituante yang menyebabkan Presiden Soekarno menetapkan Dekrit Presiden tahun 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Melalui sistem Demokrasi Terpimpin, persoalan ideologi ditekan di bawah upaya-upaya pembangunan negara. Penumpasan gerakan NII (1949-1965) pun dilakukan.

Sejarah memperlihatkan kedua jalur upaya penegakan dasar negara berdasarkan keyakinan agama gagal. Selama rezim Soeharto berkuasa, trauma ideologis ini mengambil bentuk marginalisasi partai politik dan penekanan pada kuasi-ideologi, yakni pragmatisme melalui pembangunan ekonomi, yang selanjutnya menghasilkan teknokratisme yang bebas ideologi. Kebijakan massa mengambang, kesibukan pembangunan, pengawasan oleh militer sampai tingkat-tingkat terkecil pemerintahan. Puncak dari itu semua adalah pemberlakuan asas tunggal Pancasila bagi

seluruh organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi politik. Maka, lengkap sudah *the end of ideology*.

Namun Islam tetap berkembang di Indonesia, terutama melalui jalur kultural. Fakta sosial, budaya dan politik umat Islam memperlihatkan bahwa umat Islam adalah penduduk mayoritas di negeri ini. Mereka tersebar di seluruh kepulauan Nusantara.

Budaya Islam telah terakulturasi dalam budaya Indonesia. Islam, sebagai faktor budaya telah mempersatukan Nusantara yang terdiri lebih dari 250 etnik menjadi "bangsa baru" bernama Indonesia.

Secara politis, meski negara nasional Indonesia tidak berdasarkan Islam, namun Islam diyakini para Pendiri Bangsa yang nasionalis sekuler sekalipun sebagai agen katalisator bagi nasionalisme dan persatuan kebangsaan; menjadi faktor integrasi dan kohesi sosial; sekaligus menjadi simbol nasional. Islam adalah api, spirit dan jiwa negara Indonesia; menjadi sumber karakter dan landasan moral bangsa dan negara. Hal itu terbukti dan terpatri dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara tekstual berbunyi: "*Atas berkat rahmat Allah*" serta "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" (sila pertama Pancasila) yang memperlihatkan keislaman Indonesia berdasar pada prinsip tauhid. Begitu pula, Dekrit Presiden Juli 1959 pada alinea kelima berbunyi: "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 *menjiwai* Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan *suatu rangkaian kesatuan* dengan konstitusi tersebut".

Sebagai kelanjutan dari capaian politis ini, maka perhatian negara terhadap agama adalah sebuah proses dialogis yang melalui pasang surut

dan pasang naik. Adanya Departemen Agama yang mengatur urusan haji dan pendidikan agama Islam yang menjangkau dari Ibtidaiyah sampai universitas Islam, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, penataan Bank Islam dan Badan Amil Zakat, penetapan pemberlakuan syariat di Aceh melalui UU. No.18/2001, serta penerapan syariah di daerah lain berdasarkan Perda.

Fakta politis menjelang akhir kejatuhan Orde Baru, umat Islam yang semula termarginalisasi mulai mendapat perhatian. Kesan “ijo royoroyo” di parlemen dan terutama adalah pembentukan ICMI dengan ketuanya B.J. Habibie menandakan politik mendekat ke umat mulai dijalankan. Terlihat mobilitas vertikal kaum Muslimin dalam birokrasi, seiring dengan tingkat pendidikan mereka, yang merupakan buah dari gerakan kultural Islam. Namun mobilitas vertikal SDM umat untuk ikut serta menentukan isi dan arah pembangunan kerap dipandang oleh sebagian komponen bangsa lain bukan sebagai suatu kewajaran atau sebagai suatu keniscayaan secara politis, sosial dan ekonomis.

Pasca reformasi, dengan kebebasan yang makin meluas, pendirian parpol yang lebih mudah memunculkan banyak partai berasaskan Islam, apalagi setelah Tap MPR tentang asas tunggal Pancasila dicabut. Penemuan kembali ideologi yang sudah mapan, maupun elemen-elemen ideologi dari butir-butir Pancasila terjadi, termasuk secara nyata muncul partai-partai Islam. Berdasarkan hasil pemilu demokratis di era reformasi memperlihatkan suara umat Islam secara politis menurun dibandingkan hasil pemilu tahun 1955.

Meski Islam politik memiliki kecenderungan meningkat untuk hasil pemilu 2004 dibandingkan dengan hasil Pemilu tahun 1999, namun kenyataan, bahwa mayoritas Islam Indonesia bersifat moderat dan kultural ketimbang politis nampaknya masih valid. Ini mungkin disebabkan, karena mayoritas, sekitar 75% dari masyarakat, Muslim Indonesia berafiliasi ke NU atau Muhammadiyah, dua ormas Islam terbesar yang menganggap NKRI dan Pancasila sudah final bagi umat Islam Indonesia. Karenanya, dapat dipahami mengapa selama empat kali amandemen UUD-1945 di era reformasi, MPR tidak berkehendak untuk mengubah pembukaan UUD-1945.

- *Ketiga* adalah inti masalah sebenarnya.

Berlatar belakang sejarah dan fakta serta kondisi kehidupan umat dalam berbangsa dan bernegara, terlihat bahwa penyelesaian atas krisis ideologis yang telah banyak memakan korban ini, nyatanya tidak bersifat permanen. Api nasionalisme yang meredup oleh pragmatisme, memunculkan separatisme dan radikalisme sebagai akibat ketimpangan pembangunan dan ideologis.

Yang paling menyedihkan adalah menganggunya energi umat dalam pembangunan bangsa dan negara. Umat Islam termarginalisasi oleh trauma politis-ideologis masa lalu. Islam yang secara kuantitatif nominal mayoritas belum representatif dalam aspek sosial-budaya dan sosial-politik. Fakta sejarah yang terpampang adalah mandulnya kebijakan pro-

Islam di tingkat elit. Kebijakan pemerintah, baik era Soekarno maupun Soeharto, cenderung menyingkirkan peran Islam dari wilayah negara.

Semestinya, apabila Islam adalah agama mayoritas, pastilah ia juga merupakan agama mayoritas budaya daerah. Apabila kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah, seperti tertera dalam UUD 1945, maka semestinya semenjak berdirinya Republik ini, Islam menjadi paradigma pembentukan kebudayaan nasional. Kenyataannya, pemerintah mengabaikan fakta antropologis dan kultural yang sangat penting ini.

Dalam Orde Baru, Islam tidak boleh memberikan warna untuk dirinya sendiri dengan leluasa, apalagi kepada yang lain. Yang dipromosikan adalah nasionalisme non-Islam, nasionalisme Gajahmada-Majapahit yang mencontohkan persatuan dengan penaklukan kekerasan, bukan sejarah penyebaran Islam Nusantara yang dialogis, damai dan lebih moderen. Padahal, bangsa Indonesia menegakkan NKRI dilakukan dengan dialog dan jauh dari kekerasan-penaklukan sebagaimana model persatuan Majapahit tersebut.

Proses sejarah yang melahirkan pengaruh Islam di kepulauan Nusantara seringkali direduksi menjadi sekedar "sejarah Islam di Indonesia" dan bukannya "sejarah Indonesia" itu sendiri.

Begitu lama dan luasnya pengaruh Islam di Nusantara, namun dalam kenyataannya tidak dipandang penting dalam konstruksi negara moderen Indonesia. Dalam buku sejarah resmi maupun tidak, Islam diposisikan secara marjinal tidak signifikan dalam bangun pembentukan negara-bangsa. Peran Islam dalam mempersatukan ikatan emosional, dan

heroisme perjuangan mengusir kolonial, serta pembentukan wilayah kepulauan Nusantara menjadi Indonesia pun hendak diabaikan.

Indonesia berhutang budi pada nasionalisme, nasionalisme sendiri dalam konteks Indonesia sebenarnya identik dengan Islam. Nasionalisme sekuler datang terlambat, karena 150 tahun sebelum kedatangannya dasar-dasar suprastruktur nasional telah diletakkan oleh kekuatan Islam dan pemimpin-pemimpin Muslim, yang melahirkan proto-nasionalisme yang unik.

- *Keempat* adalah solusi yang mungkin diambil.

Dalam rangka mencari solusi atas problem ideologis di atas, maka harus muncul kesadaran dasar dari seluruh komponen bangsa termasuk umat Islam sendiri, bahwa masa depan demokrasi di Indonesia sangat ditentukan oleh faktor Islam. Hal itu hanya akan berhasil bila nilai demokrasi eksplisit diartikulasi secara kompatibel dalam doktrin Islam secara ideologis (*Islam in Modern Indonesia*, 2002).

Maju-mundurnya pembangunan nasional Indonesia sangat ditentukan oleh sejauhmana peran umat Islam, karena Indonesia adalah bangsa Muslim, dimana sumberdaya budaya, sosial, politik dan ekonomi negara secara potensial berada dan melekat dalam tubuh umat Islam Indonesia. Energi bangsa Indonesia ada di dalam tubuh umat Islam. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam bertanggung-jawab penuh

terhadap kelangsungan NKRI yang dulu diperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata.

Kolaborasi budaya lokal dengan ajaran Islam yang berlangsung berabad-abad telah meletakkan dasar yang kukuh bagi sebuah bangunan keindonesiaan modern. Keislaman adalah faktor yang paling dominan dalam menopang identitas keindonesiaan. Itulah faktor keislaman Indonesia. Karenanya, memarjinalkan umat Islam Indonesia, sama seperti membonsai kebesaran bangsa Indonesia itu sendiri.

Solusi permanen dari problem ideologis ini perlu diupayakan melalui suatu penyelesaian yang dewasa dan rasional. Arah inilah yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju negara yang stabil, yang berdasarkan penerimaan komponen bangsanya secara rasional, obyektif, tulus dan menyeluruh. Bukan atas desakan represif dibawah moncong senjata atau berdasarkan marjinalisasi sumber daya energi umat yang sangat berlimpah, yang akhirnya hanya memunculkan Indonesia sebagai negara yang lemah (*the weak state*) karena tidak didukung oleh mayoritas warganya. Bila yang diinginkan adalah umat Islam yang kuat dalam negara Indonesia yang kuat, dimana umat Islam menjadi pelaku, yang menentukan arah dan isi jalannya negara, yang menjadi tulang punggung negara dalam konteks Indonesia yang plural secara etnik dan agama, maka format perjuangan umat mestilah bersifat: Islami (damai dan non-kekerasan); rasional dan obyektif; kultural dan struktural, serta konstitusional.

Dengan format perjuangan seperti di atas, maka arah perjuangan umat akan mengambil bentuk:

- *Islamisasi* secara struktural dan kultural.

Umat Islam Indonesia berhak melaksanakan Islamisasi kehidupan baik secara struktural maupun kultural—dalam maknanya yang positif dan obyektif. Karena agama berpengaruh pada manusia—secara individual maupun kolektif—yang kemudian pada gilirannya memberi pengaruh kepada publik dan lingkungan.

Islamisasi secara *kultural* dilakukan melalui berbagai media dakwah dan pranata budaya untuk menguatkan basis kebudayaan dan intelektualitas umat untuk mendorong mobilitas vertikal umat dalam berbagai lapangan baik birokrasi, ekonomi, budaya, intelektual, sosial maupun politik.

Dengan ajaran moralitas Islam universal, maka akan tersedia basis moral yang tangguh yang selanjutnya akan menciptakan sistem ideologis dan politik yang sehat bagi sebuah bangsa. Di samping itu, islamisasi akan semakin cepat bila dilakukan dengan menggunakan kereta peradaban (Iptek). Basis kebudayaan akan menyebar bersama kemajuan peradaban material. Kecepatan penyebaran basis material akan jauh lebih cepat daripada basis kebudayaan, karena penetrasi peradaban material akan merasuk jauh ke dalam kehidupan pragmatis manusia.

Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang,

batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari Syumuliyatul Islam dan risalahnya yang Rahmatan Lil Alamin. Karenanya agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an maupun terorisme.

Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan Syuro, serta Amar Ma'ruf Nahi Munkar, memperjuangkan keadilan dan mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui kegiatan Legislasi dengan menghadirkan undang-undang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya.

Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis agar dapat hadirilah Masyarakat Madani yang dicitakan itu.

Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan *absurd* bahkan *ahistoric*, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional itu sendiri. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan Komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era Reformasi dan lain-lain.

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*, sangat penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotong-royong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dalam *Ukhuwwah Islamiyyah*,

Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan kontemporer.

Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan sikap adil dan bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadirlah hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era Reformasi.

Islam tidak menjadi kekuatan penentang disintegratif atau sebagai ideologi alternatif. Islam menjadi kekuatan integratif bangsa dan negara. Format perjuangan Islam adalah partisipasi penuh dalam membentuk Indonesia yang kuat, adil sejahtera dan bermartabat.

Perjuangan utama umat adalah menjadikan Islam sebagai kekuatan integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya perjuangan umat adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dalam rangka menebarkan rahmat bagi seluruh alam, menjadi guru bagi peradaban, yang dilakukan baik secara kultural maupun struktural.

Obyektifikasi nilai-nilai Islam adalah proses transposisi konsep atau ideologi dari wilayah personal-subyektif ke ranah publik-obyektif, dari ranah internal merambah ke wilayah eksternal, agar bisa diterima secara luas oleh publik.

Secara subyektif, setiap Muslim berkeinginan agar syariat Islam diterapkan oleh negara. Namun keinginan subyektif tersebut agar dapat

dimenangkan di wilayah publik mesti memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti: kesesuaian dengan konteks dari segi ruang dan waktu; mempunyai hubungan rasional-organik; memenuhi *rule of the game*; memenuhi prinsip pluralitas dan kehidupan bersama (non-diskriminatif), dan; resolusi konflik, agar konsep atau ide tadi memenuhi prinsip “keadilan publik”.

Kebajikan universal Islam yang mampu menembus dimensi zaman, teritorial, generasi, dimensi kehidupan, sebagai rahmat bagi semesta alam akan menjadi ide atau konsep yang mudah diterima publik. Dalam titik ini, maka persoalannya bukan terletak pada debat mengenai siapa yang memerintah atau apa bentuk negara, tetapi pada soal bagaimana menegakkan nilai-nilai universal Islam di negeri Muslim terbesar ini.

Dengan demikian, ide *amar ma'ruf nahyi munkar* secara obyektif dapat dirumuskan bukan sekadar upaya untuk memberantas judi, miras, prostitusi dan mengajak ke masjid, infaq, shadaqah, puasa, haji dan sebagainya, tetapi juga upaya memberantas korupsi dan mafia peradilan, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, membela nasib buruh, tani dan nelayan, menegakkan HAM, demokratisasi dan pembangunan ekonomi umat, mengurangi diskriminasi di hadapan hukum, melestarikan lingkungan hidup, membangun Iptek, dan seterusnya. Bila gerakan ini digelorakan, maka sebenarnya yang terjadi di lapangan adalah kita membangkitkan energi dan ruh umat untuk menyelesaikan masalah kita sendiri.

Pendekatan di atas, bila diringkas dan diasosiasikan dengan bentuk perjuangan awal Islam, maka akan serupa dengan konsep *Negara Madinah*

dengan Piagam Madinahnya. Ini adalah basis untuk masyarakat plural religius dalam menjalankan agama juga memeliharanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, mengingat pluralitas keagamaan masyarakat Indonesia adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Bila ini adalah arah yang ingin kita tempuh, maka Islam politik akan bergerak pada rel yang tepat.

Gerakan Islam politik yang kuat dalam sistem demokrasi, maka secara langsung akan mereduksi gerakan radikalisme Islam nonkonstitusional, sesuai skenario. Bila hal itu terwujud, maka stabilitas Indonesia secara politik dan keamanan semakin kokoh, energi umat akan tersalurkan secara positif, dan terjadi sinergi luar biasa di tubuh bangsa ini.

Skenario demokratisasi dan penguatan parpol Islam untuk mereduksi gerakan Islam garis keras di Indonesia.

3.5 KARAKTERISTIK PEMBANGUNAN

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa pembangunan mestilah didasarkan pada tiga karakteristik berpikir yang realistis yakni integral, universal, dan partisipasi total.

- *Pertama*: bersifat integral, dimana program pembangunan di satu sektor tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di sektor lain. Pembangunan ekonomi misalnya, tidak terlepas dari pembangunan SDM yang berkualitas, pembangunan politik yang adil dan jujur serta bersih dari penyimpangan, pembangunan hukum yang berkeadilan, pembangunan iptek yang bertumpu pada kekuatan sendiri dan pembangunan sosial budaya yang berakhlak. Dalam

pandangan ini tidak ada ruang bagi arogansi sektoral yang menyempitkan pembangunan pada satu sektor saja. Sekaligus ini mensyaratkan koordinasi yang harmonis antar sektor pembangunan. Sebab inti dari pembangunan adalah manusia baik sebagai pelaku, obyek dan sekaligus tujuan pembangunan.

- *Kedua*, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa keberhasilan pembangunan tergantung pada cara pandang bangsa Indonesia terhadap berbagai aset yang dimiliki, baik aset SDA, sosial, politik maupun budaya. Pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila berbagai modal dasar yang ada dipandang hanya untuk satu generasi saja. Karenanya perlu dikembangkan pandangan universal, yaitu pandangan yang mencakup lintas generasi, lintas teritorial dan lintas kehidupan, yaitu keberadaan akhirat.

Dengan pandangan lintas generasi berarti pembangunan harus dijaga agar tetap dapat berlanjut (*sustainable*) untuk generasi berikutnya. Begitu pula dengan pandangan lintas teritorial, maka pembangunan di suatu tempat atau pembangunan wilayah Indonesia tidak dilakukan semena-mena dengan mengabaikan pengaruhnya terhadap tempat dan wilayah lain.

Dengan pandangan lintas kehidupan, maka diyakini para pelaku pembangunan akan menjadikan segala aktivitasnya dalam pembangunan sebagai bagian dari ekspresi religiusitas mereka. Bahkan, bangsa Indonesia akan diakui dunia sebagai bangsa yang membawa rahmat bagi seluruh alam karena pandangan yang universal tersebut. Ketiga institusi harus bekerjasama dengan prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya dominasi.

• *Ketiga*, PK Sejahtera menilai bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik pemberdayaan politis maupun ekonomis akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk merumuskan kepentingan bersama. Dengan demikian Partai Keadilan Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan dengan pandangan yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Ketiga komponen negara, pemerintah - dunia usaha - masyarakat, harus bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi. Dalam bingkai tersebut di atas, maka pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi penting dan strategis.

Prinsip-prinsip di atas dilaksanakan dengan jiwa dan komitmen *bersih, peduli dan profesional*, sebagai bentuk moralitas sekaligus integritas PK Sejahtera. Di atas prinsip dan paradigma berpikir inilah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera dirumuskan.

BAB IV

INDONESIA YANG DICITA-CITAKAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4.1 Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera

- *Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.*

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

Pengertian genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.

Perjuangan untuk *mewujudkan masyarakat madani*, baik secara struktural maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam

Anggaran Dasar PK Sejahtera pasal 5 ayat 2 (AD/ART PKS, 2007), menyebutkan bahwa Masyarakat Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai Piagam Madinah.

Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam dari kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di dunia yang sangat modern

dan menghadirkan fakta historis tentang pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan gotong-royong menjaga kedaulatan negara.

Piagam itu juga menghormati pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.

Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bisa disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya; ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang aman dan damai; mengokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat silaturahmi; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt.

Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif, bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil menggelorakan semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998).

Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif dengan beragam realita yang sudah ada di Nusantara, baik ideologi, kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya, dengan semangat agama dakwahnya yang Rahmatan Lil Alamiin, jadilah Islam sebagai agama yang menyebar di Seluruh Nusantara

bahkan menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat berdirinya beragam kerajaan Islam dan hadirnya budaya dan tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang cerdas sampai hari ini sekalipun.

Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang, batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia adalah pengejawantahan kongkret dari *Syumuliyatul Islam* dan risalahnya yang *Rahmatan Lil Alamin*.

Karenanya agenda ini tentu tidak dimaksudkan untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.

Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk dari pengamalan *Syuro*, serta *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, memperjuangkan keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal sholeh. Politik berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islami itu sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga, agar ajaran agama dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas kontrol, maupun Legislasi dengan membuat undangundang, peraturan pemerintah maupun kebijakan publik lainnya.

Dalam konteks ini maka pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah

negara Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan konstitusional dan demokratis, agar dapat hadirilah Masyarakat Madani yang dicitakan itu.

Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang mustahil dan *absurd* bahkan *ahistoric*, bahkan tidak sesuai dengan prinsip dasar berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam UUD NRI 1945.

Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia, menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan Komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era Reformasi dan lain-lain.

Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor utama yang dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan, gotongroyong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dan bersemangat untuk ber-*silaturahmi*

dan *ber-ta'awun* untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan kontemporer dengan segala peluang dan tantangannya.

Karenanya perjuangan Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan alternatif solusi yang lebih baik dan sikap adil dan bijaksana terhadap non-Muslim maupun yang berbeda latar organisasi politik dengan PK Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan demokratis, agar hadirilah hasil perjuangan yang betul-betul dapat merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era Reformasi.

PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui *musyarakah* (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih, peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang religius, sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem: mengurangi dan melebihi (*ifrath* dan *tafrith*).

Islam memandang nilai keadilan dan HAM melekat dengan penciptaan manusia. Keadilan adalah nilai yang bersifat intrinsik, baik dalam struktur ataupun perilaku manusia. Tuhan Yang Mahakuasa menciptakan manusia dalam keadaan adil dan seimbang. Semenetera itu, Islam ditegaskan sebagai agama fitrah kemanusiaan. Situasi-situasi psikis dan sosiologis manusia, sesuai dengan fitrahnya, memerlukan nilai-nilai keadilan. Sebab, dengan tegaknya keadilan di tengah-tengah situasi kemanusiaannya, setiap individu dapat memerankan dirinya sebagai makhluk moral yang merdeka dalam memilih dan berkehendak. Selain itu, keadilan menjadi tonggak utama bangunan masyarakat, apapun agama dan keyakinan yang mereka anut.

Wujud konkret nilai-nilai keadilan pada dalam aspek kemanusiaan adalah sikap "pertengahan" yang telah menjadi salah satu kekhususan umat Islam dan telah menjadi karakteristik metodologi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Para cendekiawan muslim melukiskan sikap itu dengan istilah moderasi, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem.

Keseimbangan hidup merupakan buah dari kemampuan seseorang dalam memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Itulah pangkal kesejahteraan dalam maknanya yang sejati. Kesejahteraan paripurna akan melahirkan kebahagiaan hakiki. Itu sebabnya keseimbangan yang

sempurna di antara kualitas-kualitas moral yang tampak bertentangan hanya mungkin diwujudkan dengan keadilan, sesuai dengan makna asasi keadilan (*'adalah*) yang berasal dari akar yang sama dengan kata keseimbangan (*i`tidal*). Oleh sebab itu, para ulama menegaskan: nilai keadilan sebagai kebaikan yang paling sempurna.

Posisi keadilan dalam kehidupan manusia dan alam semesta amat fundamental. Sebuah hadits Nabi Saw menyebutkan:

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil itu kelak di sisi Allah Swt berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Yaitu, mereka yang bertindak adil dalam pemerintahan, terhadap keluarga, dan terhadap bawahan mereka."

Konsekuensinya, setiap ketidakadilan dan kezaliman harus dipandang sebagai tindakan dosa dan kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan.

Kezaliman itu kegelapan, sedangkan keadilan itu cahaya. Maka, kewajiban menegakkan keadilan dan menumbangkan segala bentuk kezaliman, penindasan, sikap berlebih-lebihan, merugikan orang lain, kebencian, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan harus menjadi bagian dari ideologi Islam. Semangat ini harus mewarnai setiap aksi dan menjadi pola perjuangan otentik manusia sepanjang sejarahnya. Manusia, baik secara individual maupun kolektif, bertanggungjawab menegakkan keadilan dalam seluruh dimensi kehidupan.

Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa lapar, secara fisik sejahtera. Firman Allah Swt menegaskan,

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)-nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS, al-Nahl 16: 112).

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah. Kesejahteraan tidak mencerminkan jumlah alat pemenuhan kebutuhan, tetapi keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal, dan jasad). Kesejahteraan seperti itu yang akan melahirkan kebahagiaan hakiki bagi bangsa Indonesia.

Kesejahteraan menuntut pengelolaan ekonomi berbasis sektor riil yang menitikberatkan pada kesempatan berusaha di sektor riil bukan semata sektor finansial. Prinsip itu menyetarakan peran modal dan usaha (buruh) serta berbasis ekonomi pasar yang memberi kesempatan berkompetisi secara adil. Ekonomi berkeadilan yang mencitakan kesejahteraan untuk semua warga akan terlepas dari penyimpangan moral (*moral hazard*) akibat tindak kezaliman terhadap sesama manusia maupun tindakan eksploitatif yang merusak alam.

Hanya dengan sistem perekonomian yang berkeadilan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) yang menjamin kesetaraan sosial (*social equity*), kelestarian lingkungan (*environmental prudence*), dan efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Semua itu tidak lain

merupakan cita-cita bersama umat manusia sedunia (*Our Common Future*, World Committee for Environment and Development, United Nation, 1987).

Ekonomi yang maju ialah kondisi yang dibangun di atas kesadaran adanya misi peradaban untuk kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, keterpeliharaan moralitas manusia, baik secara individual maupun kolektif, keseimbangan kemajuan ekonomi, kemandirian, kesatuan ekonomi nasional, dan kelestarian alam semesta menjadi patokan utama pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, di tengah dinamika meraih kemajuan ekonomi, maka penyimpangan etika, perilaku eksploitatif, konsumtivisme, dan hedonistik-materialistik harus dapat diminimalisasi. Karena, pembangunan ditujukan bukan untuk kemajuan materi saja, melainkan juga demi tetap terpeliharanya sifat asasi dan martabat seluruh manusia.

Pada titik itu, kemajuan ekonomi harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa, bahkan umat manusia, secara adil. Atas dasar itu perlu ditegakkan prinsip penyatuan moralitas dan etik dalam seluruh aktivitas ekonomi guna meminimalisasi, bahkan menghilangkan, berbagai bentuk kezaliman.

Memprioritaskan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama harus dilakukan di atas keuntungan pribadi dan kelompok, guna menjamin hak-hak ekonomi semua pihak dan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Pengutamaan ini harus menjadi kebijakan yang dipatuhi bersama. Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan

sehingga memunculkan penghormatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang tinggi dapat mewujudkan dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang yang tak ternilai.

Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa lain. Untuk itu semua warga negara dapat mengambil peran dalam membangun negara sehingga menjadi masyarakat madani berdaya dan berkeadilan, masyarakat yang tidak mudah dipatronisasi oleh kekuatan manapun. Sebab, kehidupan sosial manusia di muka bumi akan lebih tertata dengan sistem sosial yang berkeadilan walau masih disertai suatu perbuatan dosa, daripada dengan sistem tirani yang zalim.

Kewajiban individu untuk menegakkan keadilan harus dipandang sebagai prosedur regulatif bagi tindakan sosial dan etik, sehingga akhirnya menghasilkan keadilan sosial yang efek kebaikannya akan dirasakan bersama. Substansi keadilan sosial ialah terciptanya suatu masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi pihak yang dinafikan kebutuhan dasarnya. Setiap individu mendapat hak-hak sosialnya secara penuh dan utuh, memperoleh jaminan sosial secara proporsional, serta manfaat dari sumber-sumber daya alam dan kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Dalam waktu yang sama ia harus melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tanggungjawab sosialnya dalam rangka merealisasikan keadilan menyeluruh dalam kehidupan. Hak-hak ini merangkumi semua hak-hak individual dan sosial manusia Indonesia yang bermartabat. Tegaknya keadilan sosial akan mewujudkan masyarakat yang

egaliter dan menghargai orang berdasarkan keutamaannya dan prestasinya, bukan pada etnisitas, entitas, keturunan, dan faktor bawaan lainnya. Oleh sebab pluralitas kebudayaan merupakan realitas yang melekat dalam sebuah bangsa, masyarakat, atau komunitas, maka perlu kearifan dalam memandang dan menyikapinya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada setiap komunitas atau bangsa dengan cara menghargai kebudayaannya.

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, maka secara budaya dan agama, Islam dapat tampil memberikan model masyarakat yang bisa mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan pluralitas budaya lokal dan sekaligus aspirasi kemodernan dalam sebuah rumah besar bernama Indonesia. Hal itu mensyaratkan pandangan keagamaan yang lebih menekankan aspek substansial yang universal daripada simbolik, dan tumbuhnya sikap saling menghargai serta kearifan di kalangan masyarakat. Dalam kerangka itulah kita memandang dan menyikapi pluralitas kebudayaan hingga pada akhirnya dapat memperkaya kebudayaan nasional menjadi satu sistem yang indah, efektif, dan saling bersinergi. Pluralitas sebagai karunia Tuhan, baik itu terkait dengan ras, budaya maupun profesi, seharusnya dilihat sebagai suatu kekayaan yang patut dikelola dengan penuh keadilan bagi bangsa yang bermartabat.

Semua itu adalah kondisi yang kita citakan sekaligus, kondisi kehidupan berdakwah yang diharapkan, yang bermuara pada terjaminnya manusia dalam memenuhi lima kebutuhan primer hidupnya, yakni perlindungan atas: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Itulah masyarakat Indonesia yang religius, masyarakat madani, yang seluruh komponennya bekerja sama dalam kebaikan,

tolong-menolong dalam mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan keimanan. Masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat, yang melindungi warganya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Suatu masyarakat dan bangsa yang dapat berdampingan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, masyarakat dengan budaya khas takwa. Indonesia yang kita citakan adalah masyarakat yang hidup penuh dengan kasih-sayang, yang muda menghormati yang tua, yang tua menghargai yang muda, lakilaki bahu membahu dengan perempuan, dalam pluralitas kebudayaan.

Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, tatkala keragaman menjadi sumber dinamika bangsa. Para kritikus kreatif-konstruktif memenuhi parlemen, kaum profesional mengisi kabinet, dan orang-orang bijak yang pemberani menjaga benteng peradilan. Para pengusaha menjadi berkah bagi negara dan rakyat, demikian pula para ulama, cendekiawan dan budayawan berdiri di garda depan peradaban bangsa. Prajurit dan perwira TNI dan Polri menjadi pengawal negara dan penjaga keamanan yang profesional, sebuah kekuatan yang menyebarkan rasa aman di hati rakyat tanpa harus kehilangan hak-hak politik yang wajar sebagai warga negara. Kalangan perempuan menjadi saudara kaum lelaki, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan fitrahnya, dan bekerjasama secara setara bagi kemajuan bangsa. Kaum muda mempunyai peran strategis sebagai pelopor peradaban untuk perbaikan.

Setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat

yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

4.2 Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi.

Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan ber negara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas.

Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien.

Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif.

Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta layak bagi kemanusiaan untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan sektor informal. Membangun industri nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi, berbasis SDM berkualitas dan kemampuan inovasi teknologi yang memadai dalam rangka mencapai kemandirian bangsa. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi untuk mewujudkan pembangunan lestari dengan melakukan integrasi antar sektor serta pembangunan berbasis wilayah dan potensi regional yang berbasis pada masyarakat luas. Membatasi tindakan spekulasi, monopoli dan kriminal ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha demi terwujudnya ekonomi egaliterian.
3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera.

Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.

Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi.

Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan.

PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan merupakan hak sekaligus kewajiban masyarakat, bukan hanya negara. Karenanya pemberdayaan masyarakat, baik dalam aspek politis maupun ekonomis, akan mengantarkan rakyat pada posisi sejajar sebagai mitra pemerintah, yang duduk satu meja bersama-sama untuk mencapai situasi saling menguntungkan.

PK Sejahtera memandang partisipasi total masyarakat madani, pengusaha, pemerintah serta kerjasama internasional, yang merupakan lintas komponen dan aktor, adalah sebuah keniscayaan dalam mengelola pembangunan.

Semua itu dilaksanakan dalam kerangk yang bersifat integral, global dan universal menuju keadilan dan kesejahteraan.

Sektor swasta adalah operator pembangunan utama, sementara pemerintah mengambil peran regulasi. Berbagai kekurangan di antara kedua sektor itu ditutupi oleh peran sektor ketiga, kelompok masyarakat madani yang berbasis kompetensi.

Ketiga komponen negara ini adalah aktor pembangunan nasional yang mesti bekerjasama secara egaliter tanpa ada upaya saling mendominasi. Dalam bingkai egalitarianisme, pemerintah sedapat mungkin mengambil fungsi minimalis menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis.

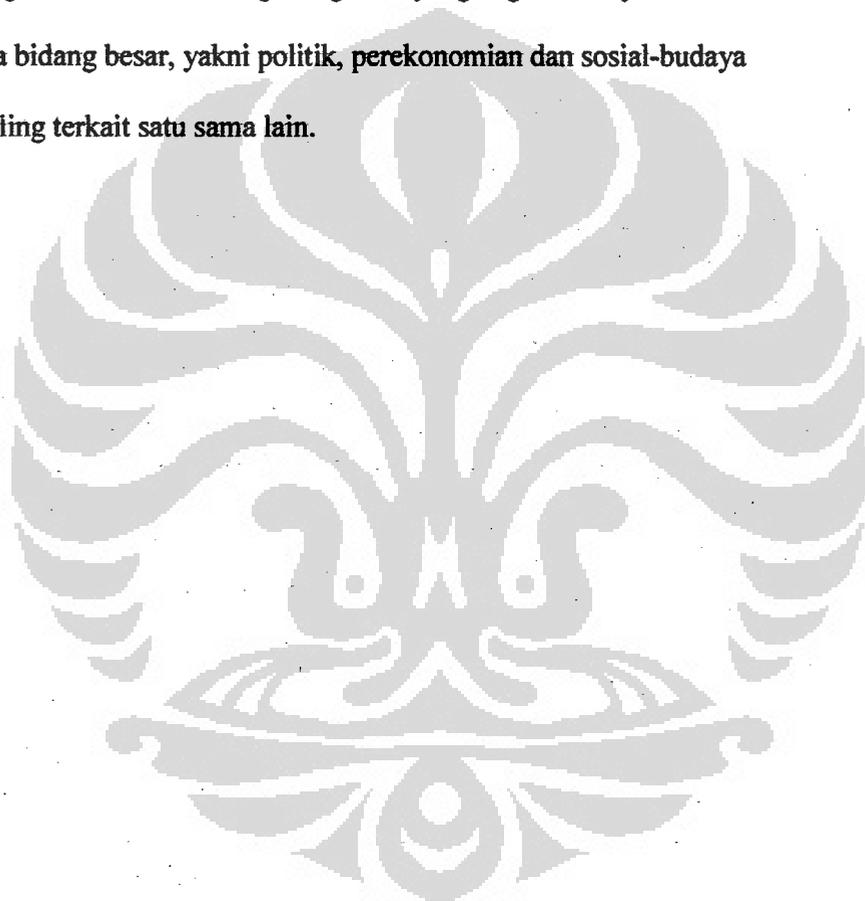
Pemerintah yang berkuasa sebagai entitas politik adalah produk dari amanat rakyat, karena itu tidak boleh menciderai amanat untuk melayani semua warga dari manapun afiliasi sosial-politiknya. Agar roda pembangunan yang digerakkan rakyat (sektor swasta dan sektor ketiga) dapat terlaksana dengan baik, maka pemerintah menyusun regulasi melalui seperangkat peraturan perundangan yang non-diskriminatif.

Berbagai upaya, program dan kebijakan pemerintah secara prinsip adalah cerminan dari platform partai yang memenangkan Pemilu secara demokratis. Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat menjadi fasilitator dan dinamisator melalui berbagai regulasi strategis.

Sebagai wujud dari rasa tanggung-jawab politik PK Sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara, untuk turut serta berperan aktif sebagai bagian dari penyelesaian masalah bangsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat, sebagaimana yang dicitakan PK Sejahtera, maka

disusunlah Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera sebagai arah dan pedoman perjuangan bagi kader dan sekaligus komitmen politik partai.

Komitmen politik ini adalah konsepsi kebijakan pembangunan yang akan diperjuangkan PK Sejahtera. Dengan demikian menjadi jelas posisi Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera ini dengan peran sektor pemerintah dalam pembangunan melalui berbagai regulasi yang digulirkannya. Platform ini terdiri dari tiga bidang besar, yakni politik, perekonomian dan sosial-budaya yang saling terkait satu sama lain.



BAB V

PLATFORM POLITIK PKS

Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer agar tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional).

Reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-hukuman, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskan mereka pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling

menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

5.1 UMUM

Politik adalah “aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan. (Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Al-Siyasah Al-Hakimiyyah).

Secara naluriah manusia tak mungkin lepas dari kegiatan politik. Al- Insan madaniyyun bi thabi'ih (manusia berpolitik secara alamiah). Ungkapan itu sudah menjadi semacam kredo dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, terutama dalam ilmu sosial-politik, dan spektrum maknanya menjadi sangat luas, khususnya dalam pembahasan mengenai hubungan manusia dengan politik. Kendati banyak ragam definisi politik dan aksi manusia secara individu dan kelompok dikemukakan para ahli, namun esensi yang terkandung dalam definisi dan aksi politik manusia tetap menekankan unsur-unsur dalam mewujudkan kemaslahatan bersama, terutama yang menyangkut ketenteraman dan kesejahteraan. Maka setiap aktivitas, upaya, dan perjuangan individu atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan ide individu dan kolektif tersebut secara umum dikategorikan sebagai tindakan politik dalam arti luas.

Dalam literatur Islam, politik didefinisikan sebagai “*aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan*”.

Politik merupakan bagian tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup paripurna. Karenanya, dalam pandangan Islam, aktivitas politik yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai universal, diniatkan dengan ikhlas, dan dilaksanakan dengan akhlak terpuji, akan bernilai ibadah. Secara umum, tujuan utama manusia dalam kegiatan politik berkaitan dengan keinginan untuk menciptakan keteraturan, rasa aman, dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Tujuan itu dicapai dengan menggunakan sistem yang dapat mengorganisir keanekaragaman individu dan kelompok yang memperjuangkannya, serta didasarkan pada watak ideologi yang melahirkan sejumlah nilai-nilai moral dan etika untuk memastikan agar aktivitas politik tidak keluar dari koridor ideologinya. Logikanya, politik harus sarat dengan dimensi moral-etis yang berakar pada ajaran, konsep, dan ideologi Islam. Dengan demikian, dalam jagat politik, moralitas dapat dikategorikan sebagai atribut ontologis yang menegaskan hakikat ideologi politik suatu bangsa.

Politik yang tercerabut dari akar moral-ideologi sama dengan mendegradasi politik itu sendiri, sebab hakikat politik sesungguhnya mengandung keutamaan-keutamaan moral seperti kejujuran, kebijaksanaan, keadilan dan kebenaran, pelayanan, mementingkan orang banyak daripada diri sendiri dan kelompoknya, pengabdian, dan lain sebagainya. Setiap tindakan politik harus menampilkan dimensi-dimensi etis tersebut.

PK Sejahtera, sebagai bagian dari entitas politik nasional, berjuang dengan dasar aqidah dan asas Islam untuk mencapai tujuan universal Islam, yakni menciptakan Indonesia yang aman, adil, sejahtera dan bermartabat, dan dengan cara-cara yang sarat dengan moral-etis Islam tersebut.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, demi menggerakkan roda pembangunan nasional pasca krisis, dibutuhkan iklim politik yang kondusif, yakni terciptanya stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang mantap dan dinamis, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja secara produktif untuk mensejahterakan bangsa. PK Sejahtera sebagai entitas politik Indonesia yang berjuang dengan dasar Islam dan moralitas terpuji berkeyakinan, bahwa berbagai upaya pembangunan di bidang politik, yang meliputi aspek ketatanegaraan, politik nasional, hukum, birokrasi, otonomi daerah dan hankam semestinya diarahkan untuk menciptakan stabilitas yang sehat dan dinamis.

Kondisi stabilitas akan menghasilkan pemerintahan yang efisien dan efektif dalam menjalankan amanahnya demi menciptakan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang memiliki kemampuan untuk menyerap aspirasi publik yang plural dengan spektrum luas dari segi etnik dan ideologis.

5.2 WAWASAN POLITIK

Pertama, berkaitan dengan bentuk negara.

Tujuan didirikannya PK Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, adalah "Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah Swt dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia". PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama dalam masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke.

Dalam realitas kebhinekaan itu, faktor Islam dan kaum Muslimin mengambil peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan maupun upaya

pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka membentuk masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Sebagai fakta historik, Islam dan berbagai manifestasi kebudayaannya telah berakulturasi dalam budaya Indonesia, telah menyatu dan menjadi identitas bangsa Indonesia

itu sendiri. Peran kaum Muslimin yang berjumlah mayoritas dalam mengisi dan mewarnai negeri ini dari Sabang hingga Merauke adalah faktor penentu bagi kohesivitas Indonesia itu. Toleransi dan inklusivitas kaum Muslimin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perekat yang secara faktual bekerja dalam sejarah Indonesia, yang terus menyebabkan Indonesia eksis dalam pentas peradaban mutakhir. Inilah posisi kaum Muslimin dalam bingkai pluralitas bangsa Indonesia yang diyakini PK Sejahtera.

Karenanya, tanggung-jawab terbesar bagi pembangunan Indonesia berada di pundak kaum Muslimin. Maju-mundurnya negara Indonesia berada di tangan kaum Muslimin, kerja pemikiran, serta tetesan darah dan keringat mereka.

Berdasarkan hal itu, pemikiran yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara-bangsa yang bebas agama, yakni negara sekuler, yang memisahkan agama dari negara secara total, adalah pemikiran yang mengingkari fakta sejarah dan budaya Indonesia sebagai bangsa Muslim. Pemikiran yang absurd ini sungguh tidak relevan, karena, Indonesia adalah negara yang mengakui tauhid, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang penduduknya sangat religius. Indonesia adalah negara kesatuan berdasar Ketuhanan Yang Mahaesa.

Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin dalam membangun rumah besarnya yang bernama Indonesia dan panggilan dakwah yang membawa misi rahmat bagi semesta alam, maka PK Sejahtera bahu-membahu

bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan bangsa menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni NKRI yang *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur* (negeri yang aman dan makmur di bawah ampunan Yang Mahakuasa).

PK Sejahtera mencitakan para pemimpin negeri ini termasuk para elit politiknya menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai akhlaqul karimah, yakni bersikap santun, toleran, menepati janji, dan berkompetisi secara positif. PK Sejahtera ingin menjalankan politik keadilan dan menegakkan keadilan politik bagi masyarakat dengan moralitas yang bersih, peduli dan profesional.

Dengan nilai-nilai luhur itu diyakini perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita yang diinginkannya akan semakin cepat dan dekat. Inilah wawasan politik PK Sejahtera dalam memandang realitas plularitas Indonesia dan cita-cita atas negara di masa depan, yang menjadi konsepsi dan cara pandang bagi gerak langkah perjuangannya.

Kedua, berkaitan dengan konsolidasi demokrasi di masa transisi.

Berdasarkan pemahaman yang mendalam atas kondisi perpolitikan Tanah Air dewasa ini, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa “Indonesia Baru” di masa depan mestilah berada pada fase yang sehat dan dinamis. Yakni, terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial yang mapan. Stabilitas politik hadir akibat kedewasaan elit politik dalam berkontribusi bagi tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat serta tingkat

pendidikan politik masyarakat terus meningkat. Stabilitas politik yang sehat dan dinamis muncul karena kesadaran akan konstitusi dan hukum serta peran sejarah seluruh anak bangsa untuk mengukir jalan ke masa depan Indonesia yang lebih baik, bukan stabilitas politik yang dipaksakan secara otoritarian militeristik seperti zaman Orde Baru. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi pembangunan ekonomi dan munculnya kepercayaan pihak luar negeri dalam berinvestasi di Indonesia, karena pembangunan politik bukan hanya ditujukan untuk memberikan ruang publik yang lebar bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan ekspresi diri, serta tegaknya keadilan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga membentuk keterkaitan dengan pembangunan ekonomi dan membuka jalan bagi tumbuhnya kesejahteraan rakyat. Pembangunan politik dan pembangunan ekonomi adalah dua sisi mata uang dalam jiwa rakyat, dimana satu sisi mempersembahkan rasa adil dan sisi lainnya menciptakan kesejahteraan. Suksesnya pembangunan di dua sisi ini akan menumbuhkan perasaan aman dan tenteram bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dalam upaya membangun stabilitas politik bangsa itu, berbagai persoalan yang dapat memicu destabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik, dan etnonasionalisme sikap tegas, dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio-kultural.

ketiga, berkaitan dengan model demokrasi.

Eksperimentasi politik di era transisi reformasi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial.

Sejarah perpolitikan Tanah Air sejak era Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin di zaman Orde Lama, serta Demokrasi Presidensial di zaman Orde Baru, sampai hari ini di era Reformasi dengan sistem Demokrasi Parlemen Multi-Partai memperlihatkan pergerakan "bandul sejarah" dari sistem liberal-otoriter-liberal menuju sistem demokrasi yang lebih substansial dan stabil. Bercermin dari pengalaman sejarah, PK Sejahtera berkeyakinan bahwa sistem presidensial dengan jumlah partai yang terbatas tampak lebih mungkin untuk dicapai. Karena itu, penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu secara bertahap dengan penerapan "batas ambang" adalah langkah yang rasional dan obyektif.

Indonesia yang multi etnik dan agama, dimana masyarakat berekspresi dalam berbagai ormas dan orpol, tetap dapat diintegrasikan dalam sistem politik terkendali tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang beragam untuk menyuarkan keadilan.

Di masa depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sederhana, efisien dan murah. Sebab, saat ini dalam suatu daerah dapat terjadi beberapa kali pilkada/pemilu -- mulai dari level Kabupaten/Kota, Propinsi, kemudian Pemilu dan Pilpres di tingkat nasional. Dengan model demokrasi yang berjalan, maka calon peserta pilkada atau calon anggota legislatif harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk keperluan kampanye politik. Model seperti itu telah mengurangi kesempatan bagi calon berkualitas yang tidak memiliki sumber daya melimpah. Atau dengan kata lain, model demokrasi berbiaya tinggi itu hanya cocok untuk calon yang kaya-raya, terlepas dari bobot kualitas yang bersangkutan. Sudah saatnya dikembangkan model demokrasi yang

lebih sehat dan mampu menjaring calon yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

5.3 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Sebagai negeri yang luas dengan beragam etnik dan budaya, serta sumber daya alam yang berlimpah dan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali pemerintahan di Indonesia demikian luas. Pasca krisis ekonomi, tatanan sosial-politik-ekonomi masih bersifat transisional, sehingga menuntut pemantapan dan redefinisi peran negara secara lebih tegas. Sementara globalisasi merupakan tekanan eksternal karena bersemangat ketidakadilan global yang merupakan tantangan bagi Indonesia sebagai negara berkembang.

Dalam kondisi penuh tekanan, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, kecuali membangun sistem ketatanegaraan yang stabil, mantap dan dinamis. PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa pemerintah mestilah efisien dan efektif dalam mengelola negara. Secara bertahap bersama tumbuhnya kekuatan negara, maka pemerintah mengambil posisi pada pengelolaan fungsi minimal negara, dan membuka fungsi lainnya bagi partisipasi masyarakat. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, penegakan hukum, proteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi-fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk

menegakkannya. Dengan fungsi yang lebih terkendali, maka pemerintah akan bekerja lebih fokus dan tidak terkuras energinya untuk mengurus seremoni, sementara pembinaan negara akan tumbuh kuat.

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah kelembagaan baik dalam aspek politik, hukum, maupun birokrasi dilakukan dengan meningkatkan:

- (1) kemampuan badan pembuat regulasi untuk mengantisipasi perubahan dalam bidang ekonomi dan politik yang berlangsung cepat melalui serangkaian reformasi perundang-undangan, sehingga pembangunan politik dan ekonomi berjalan progresif;
- (2) kesiapan lembaga-lembaga negara untuk berubah dan mentransfer diri ke dalam tata pemerintahan yang baik--dengan karakter utama: berwawasan ke depan, transparan, akuntabel, menerapkan prinsip meritokrasi, kompetitif, dan mendorong partisipasi publik-- melalui serangkaian peraturan, perbaikan tata-laksana, sistem insentif, pembinaan mental dan budaya, serta seleksi SDM berkualitas;
- (3) pengetahuan akan desain organisasi/institusi yang bersangkutan, baik internal maupun dalam hubungannya dengan pihak eksternal organisasi; dan
- (4) menghapus ambiguitas lembaga, sehingga nampak kejelasan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing lembaga negara.

PK Sejahtera berkeyakinan bahwa hubungan vertikal ketatanegaraan dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan dan pembinaan SDM. Hal itu sebagai upaya untuk

mendekatkan perputaran ekonomi dan pembangunan secara umum dengan dinamika masyarakat.

Untuk itu, PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi dengan dan oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah.

PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan virus KKN kepada oknum-oknum daerah yang pada akhirnya menyengsarakan nasib rakyat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting. Sebagaimana tata-kelola dan tata hubungan pemerintahan secara horizontal, maka tata hubungan pemerintahan secara vertikal pun perlu kejelasan dan ketegasan, sehingga dihasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengeksekusi berbagai program demi tercapainya keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta otonomi daerah, sebagai upaya untuk mendekatkan perputaran ekonomi dan pembangunan secara umum dengan masyarakat, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan vertikal ketatanegaraan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan *capacity building*.

PK Sejahtera memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi dengan dan oleh pemerintahan pusat, namun tetap berorientasi pada

semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di pusat, provinsi dan daerah. PK Sejahtera menentang dengan keras segala bentuk praktek otonomi daerah yang hanya menghasilkan konflik otoritas dan menyebarkan racun KKN kepada oknum-oknum daerah yang ujung-ujungnya menyengsarakan nasib rakyat. Karenanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana dekonsentrasi untuk pembangunan daerah menjadi sangat penting. Seperti juga tata-kelola dan tata hubungan pemerintahan secara horizontal, maka tata hubungan pemerintahan secara vertikal pun perlu kejelasan dan ketegasan, sehingga dihasilkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mengeksekusi berbagai program demi tercapainya keamanan dan kesejahteraan rakyat.

PK Sejahtera berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tata kelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. Birokrasi yang bersih, peduli, dan profesional merupakan cerminan “tubuh” bangsa ini sehari-hari yang merefleksikan ruh pengelolaan negara..

Berbagai upaya perbaikan terhadap birokrasi telah dilakukan berkaitan dengan netralitas birokrasi, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta pengembangan sistem pengawasan. Namun, tindakan itu jelas belum cukup. Untuk itu di masa depan PK Sejahtera meyakini, bahwa perbaikan sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan sistem meritokrasi serta pengembangan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai negeri menjadi sangat penting dan

strategis. Jumlah dan komposisi tingkat pendidikan SDM birokrasi perlu ditata ulang, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di pusat maupun daerah, dan dalam bingkai fungsi minimalis negara.

5.4 PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas.

Karena itu, PK Sejahtera bertekad untuk memelopori tegaknya supremasi hukum di Indonesia, dimana: (1) pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum; (2) setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum; (3) kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum; dan (4) keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban.

PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi

yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan telah dirasakan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang rutin, pengadaan barang dan jasa, hingga perumusan kebijakan publik diwarnai dengan gejala penyelewengan. Korupsi legislatif dan pimpinan daerah menjadi fenomena yang makin banyak ditemukan. Virus korupsi yang semula terpusat, bersama dengan penyelewengan otonomi daerah kini menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok negeri, termasuk pula proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif penuh dengan aroma politik uang. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak aspiratif, anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang terpilih tidak representatif, dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal. Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang, sehingga membuat perekonomian negara terkendala berat. Bahkan, virus KKN menyebar hingga lembaga-lembaga hukum dan penegak keadilan. Gejala itu tidak hanya menimbulkan kerugian negara yang amat besar, namun melemahkan sistem pemerintahan yang bersih dan beribawa. Sehingga para koruptor dapat mengontrol sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

PK Sejahtera menilai, bahwa tidak maksimalnya gerak Indonesia untuk maju ke depan menggunakan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bangsa disebabkan terutama oleh virus KKN. Energi negara boros, sumberdaya inefisien, kelambagaan rusak, moralitas SDM semakin terpuruk, dan akibat akhirnya adalah kesengsaraan dan penderitaan masyarakat. Elite kaya semakin kaya, warga miskin semakin miskin; cita-cita Indonesia yang aman dan sejahtera makin sulit terjau.

Karena itu, komitmen PK Sejahtera untuk memberantas KKN tidak dapat ditawar-tawar lagi, dan bahkan menjadi jati diri yang dipertaruhkan di hadapan sejarah. PK Sejahtera yang mendeklarasikan diri sebagai Partai Da'wah dan mengusung prinsip "Bersih-Peduli-Profesional" menjadikan KKN sebagai musuh besar bersama yang harus ditumpas seluruh komponen bangsa dengan komitmen penuh. Langkah nyata yang digariskan PK Sejahtera adalah memberikan contoh dan bukti pada perilaku kader-kadernya, baik yang berada di lembaga-lembaga legislatif maupun eksekutif, disamping komitmen untuk terus mendorong lembaga seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Pengadilan untuk merapatkan barisan dan menkonsolidasikan pikiran dan tindakan.

5.5 MEMBANGUN HANKAM

PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa segala usaha pertahanan negara harus berujung pada upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam, maupun dari luar negeri.

Landasan pokok pembangunan pertahanan difokuskan pada fungsi TNI sebagai faktor penggentar, penindak dan perehabilitasi. Secara umum, seluruh komponen bangsa harus terlibat dalam usaha pertahanan negara. PK Sejahtera berpandangan, kesamaan langkah dan kesatuan gerak antara rakyat dan negara akan memperkokoh pertahanan negara.

Untuk itu, PK Sejahtera merekomendasikan tujuh langkah solusi strategis:

- (1) menjadikan TNI sebagai elemen pertahanan negara yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan dengan meningkatkan kesejahteraan personil, memperbaharui teknologi peralatan kerja, termasuk persenjataan (alutsista), meningkatkan proporsionalitas TNI dengan jumlah penduduk, dan mengubah pengorganisasian tentara dari pendekatan teritorial ke pendekatan tempur;
- (2) mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan kekuatan nasional yang tangguh, terutama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan global yang berniat melemahkan Indonesia dengan politik penjajahan ekonomi, sosial, budaya maupun taktik intelejen;
- (3) pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong penggunaan produk industri dalam negeri, sehingga tumbuh kemandirian dalam bidang peralatan kemiliteran dan tidak tergantung pada produk peralatan militer asing;
- (4) peningkatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat, selain untuk menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional, juga dalam rangka transfer teknologi pertahanan;
- (5) menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara rakyat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 UUD 1945) serta keterampilan pertahanan negara;
- (6) meminimalisir bibit-bibit separatisme dengan mengutamakan proses dialog untuk perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan bagi daerah tertinggal dan terbelakang, sehingga perlu transformasi paradigma

penyelesaian konflik dari aksi militer sporadik menjadi aksi politik dan diplomasi damai;

(7) penegakan disiplin keprajuritan harus dilandasi prinsip keadilan dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Kebijakan tentang keamanan nasional tidak hanya didasarkan pada suatu persepsi tentang kebutuhan dan prioritas keamanan nasional, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, internal, tekanan tanggung jawab dan komitmen.

Untuk itu kebijakan keamanan nasional harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara. Keamanan harus ditempatkan secara seimbang, antara keamanan negara (*state security*) dan keamanan manusia/individu (*human security*). Untuk itu, PK Sejahtera mengemukakan kebijakan: (1) mendorong pemerintah dan aparat kepolisian untuk melakukan perubahan paradigma dalam menyelenggarakan keamanan nasional, yaitu perubahan pendekatan militeristik ke pendekatan civilian; (2) mendorong Kepolisian RI sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban nasional, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, menjadi elemen keamanan nasional yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan; (3) mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan keamanan nasional yang tangguh sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara; (4) mendorong kerjasama pengamanan nasional dengan negara-negara sahabat guna menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional; (5) menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai paham dasar sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta; (6) menghadapi bibit-bibit gangguan keamanan nasional dengan mengutamakan proses perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sebelum ditempuh tindakan keamanan yang bersifat represif.

5.6 LANGKAH PENUNJANG UMUM

Memelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk tetap berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

Perubahan yang berkembang pasca reformasi telah mempengaruhi stabilitas politik domestik dan performa politik luar negeri. Praktek politik di kalangan elite memperlihatkan carut-marut pertentangan dan perebutan kekuasaan. Namun, hal ini tidak mengurangi optimisme perubahan politik yang mendukung terciptanya model demokrasi yang lebih baik. Berbagai momentum demokrasi di masa transisi – Pemilu nasional yang berlangsung dua kali dan Pilkada di sejumlah daerah--, memberikan gambaran politik nasional yang penuh intrik, manipulasi, dan permainan para pemegang kekuasaan. Hal itu membuat stabilitas dalam negeri mengalami kegoncangan dan akhirnya berimplikasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan gerakan penyadaran politik di kalangan elite, disamping terus mengencarkan pendidikan bagi khalayak masyarakat.

Politik memang tak dapat dipisahkan dari kekuasaan, namun tidak selamanya politik bermuatan kekuasaan. Sebab, politik juga bermakna perumusan

kebijakan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Politik akan bermanfaat lebih luas dari sekadar permainan kekuasaan di kalangan elite, jika dikembangkan secara matang bagi pencapaian kemaslahatan bersama melalui rekayasa sosial dalam penguatan isu dan gerakan di masyarakat. Sebagai partai yang terus-menerus belajar memperbaiki kapasitasnya, PK Sejahtera tidak lagi melihat politik dalam arti sempit, sehingga kesempatan untuk 'bersiasat' dengan cerdas dalam menjalankan politik merupakan keniscayaan yang harus dijalani di berbagai sektor.

Arah dan perencanaan PK Sejahtera pada bidang politik adalah:

Pertama, permasalahan separatisme harus dilihat dalam konteks akar masalah. Secara sosioantropologis, separatisme merupakan efek dari hubungan antar pemerintah pusat dengan kekuatan lokal yang didukung sentimen kesukuan dan kedaerahan, sehingga dalam penyelesaiannya harus ditempuh jalan dialogis demi mencapai kedamaian yang lestari.

Konflik sosial antar kelompok harus ditelaah akar masalahnya dan dicari solusinya dengan menggunakan pendekatan psikologisosial. Nilai-nilai yang ada dalam konteks masyarakat tersebut harus dilihat sebagai bagian dari kerangka budaya. Selain itu, kearifan lokal digali dan dipahami sebagai modal berharga untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi, mengontrol aparat keamanan, dan menguatkan operasi intelejen.

Kedua, dalam memelihara potensi kebaikan dalam masyarakat (*ri'ayah al mashalih al ijtima'iyah*), masyarakat sipil, pemerintah, parpol, dan militer harus berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat melalui kerangka

demokratisasi. Hal itu dapat dilakukan melalui penempatan polisi dan militer dalam fungsi pertahanan dan keamanan, dan tidak memasuki wilayah politik praktis.

Ketiga, perubahan secara total dan radikal terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan harus diawali dengan agenda reformasi. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan mengevaluasi jalannya reformasi.

Keempat, permasalahan sosiologis masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politik akan sangat berpengaruh pada pilihan politik masyarakat ketika Pemilu dan penyaluran aspirasi terhadap parpol. Maka, reformasi sistem Pemilu yang jujur dan adil menjadi prioritas, dengan mencegah seoptimal mungkin kecurangan-kecurangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan jabatan. Begitu pula dengan kejelasan dana Pemilu dan parpol dapat disajikan secara transparan.

Kelima, militer adalah bagian dari potensi kebaikan masyarakat, sehingga hubungan antara sipil-militer harus berjalan sinergis. Profesionalitas militer adalah hal terpenting dalam relasi itu, sehingga kontrol sipil atas militer, badan intelejen, dan penempatan posisi TNI dan Polri semakin jelas. Masalah bisnis militer dan pembenahan struktur komando di TNI dapat ditangani dengan prinsip profesionalisme.

Keenam, komunikasi politik untuk mengokohkan kembali nilai spiritual Islam dan ajaran agama sebagai orientasi serta pedoman kerja harus mengungkapkan ide-ide praktis dan keteladanan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, menjalin komunikasi dengan media massa sebagai alat

penerangan dan penokohan adalah bagian untuk memelihara potensi kebaikan, bahkan bisa melakukan perubahan secara total dan radikal terhadap aspek kehidupan.

Ketujuh, masyarakat harus diubah secara mental agar mendapatkan kecerdasan dan kesadaran politik. Hal ini harus didasarkan pada psikososilogis masyarakat, sehingga tercipta kesadaran untuk berpartisipasi politik.

Kedelapan, mengawal proses legislasi berdasarkan pemahaman sosioantropologis masyarakat, sehingga produk legislasi yang dihasilkan sesuai dengan konteks sosial. Fungsi kontrol dan perimbangan kekuasaan (*check and balances*) akan terlaksana secara proporsional, bahkan dapat memelopori pembuatan peraturan perundang-undangan yang mendukung aspirasi rakyat.

Kesembilan, kontribusi dalam pemerintahan melalui kabinet akan berdampak pada terpeliharanya kebaikan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah terutama sektor strategis dengan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kesempatan untuk berkoalisi harus bersifat konstruktif, agar dapat menghasilkan kemanfaatan untuk dakwah dan perkembangan politik partai.

Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, karena sosok pemimpin mensyaratkan keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional).

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan politik nasional sebagai pengarah bagi tercapainya cita-cita bangsa. Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan gejala keterbelakangan kepemimpinan, baik karena faktor pribadi yang tidak konsisten maupun lingkungan yang tidak kondusif. Pada masa awal revolusi kemerdekaan, Soekarno bersama Mohammad Hatta menjadi simbol kebangkitan bangsa, namun duet kepemimpinan itu akhirnya pecah akibat perbedaan sikap politik.

Demikian pula Soeharto pada masa awal Orde Baru memperlihatkan benih kepemimpinan yang memunculkan harapan akan perubahan, tetapi pengaruh kekuasaan yang lama bercokol telah membentuk oligarki yang menekan kebebasan warga. Pada masa reformasi 1998, pasca lengsernya rezim Orde Baru, rakyat mengalami proses transformasi secara menyeluruh, termasuk kondisi kepemimpinan. Dalam rentang waktu yang pendek (1998-2004), Indonesia mengalami proses suksesi beberapa kali dengan konsekuensi krisis kepemimpinan yang dipercaya masyarakat luas.

Dalam sejarahnya, kekuasaan sepanjang Orde Lama memperlihatkan sikap yang otoriter di tengah kondisi sosial yang tercekam anarkisme sebagai akibat dari perlawanan total terhadap nilai-nilai warisan penjajah, sedang nilai-nilai baru keindonesiaan belum terformat dengan mantap. Perjalanan selanjutnya di masa Orde Baru menunjukkan watak kekuasaan yang menuntut keseragaman dan mematikan keragaman, sehingga semangat revolusioner dan kreativitas bangsa yang tumbuh subur sejak masa kemerdekaan terpusus habis. Rakyat dikuasai oleh ketaatan buta dan terjebak pembangkangan dalam diam.

Pada masa reformasi, sekali lagi terjadi tragedi karena para pemimpin pengganti mengalami kegagalan (*disability*) dalam proses belajar dari kepemimpinan sebelumnya. Gejala itu terlihat dalam karakter utama kepemimpinan nasional.

Pertama, dalam pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999) memang ada upaya untuk mengalihkan beban kesalahan kepada pemimpin terdahulu, namun tak juga menarik garis tegas (*clean break*) terhadap penyimpangan perilaku sebelumnya.

Kedua, masa Abdurrahman Wahid (1999-2001). Sikap sederhana dan amat fleksibelnya membuat kedekatan antara pemimpin dengan rakyat, tapi tak mampu menolong proses pemecahan masalah bangsa yang sangat kompleks. Kondisi ini diperparah dengan watak pribadinya yang kontroversial, sehingga lebih tampil sebagai *trouble maker* ketimbang *problem solver*.

Ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dikenal oleh masyarakat dengan kapabilitas yang minimal, sehingga terlihat ketergantungan yang kuat pada lingkaran inti kekuasaan. Ia juga tak mampu mengelola benturan-benturan kepentingan dan sering salah persepsi terhadap umpan balik yang datang dari arus bawah masyarakat.

Terakhir, *keempat*, Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang). Kepercayaan baru yang cukup tinggi dari masyarakat baru dipandang sebagai modal popularitas, namun tidak dikapitalisasi untuk memantapkan legitimasi dengan kerja nyata dalam berbagai aspek. Perubahan fundamental citra masih dihargai lebih tinggi daripada kinerja.

Dalam situasi kekecewaan yang berulang-kali, masyarakat mendambakan tipe kepemimpinan baru. Agar tidak terjebak pada mitos "Ratu Adil" (*messianisme*) yang akan membuah kekecewaan lebih dalam, maka diperlukan proses terobosan penumbuhan kepemimpinan baru dari lapisan generasi muda.

Ada tiga hal yang perlu dimiliki dalam karakter pemimpin.

Pertama Perencana, sosok yang memiliki kapasitas intelektual memadai dan menguasai kondisi makro nasional dari berbagai aspeknya, sehingga dapat menjaga visi perubahan yang dicitakan bersama.

Kedua, Pelayan, figur pekerja yang tekun dan taat pada proses perencanaan yang sudah disepakati sebagai konsensus nasional, menguasai detail masalah kunci kebangsaan dan mampu melibatkan semua elemen yang kompeten dalam tim kerja yang solid.

Ketiga, Pembina, tonggak pemikiran yang kokoh dan menjadi rujukan semua pihak dalam pemecahan masalah bangsa, yang setia dengan nilai-nilai dasar bangsa dan menjadi teladan bagi kehidupan masyarakat secara komprehensif.

Untuk menumbuhkan tipe kepemimpinan nasional generasi baru, maka dibutuhkan proses belajar yang berkelanjutan. Hal ini dibuat dengan beberapa dimensi yaitu,

pertama meliputi dimensi belajar untuk menginternalisasi dan mempraktekkan nilai-nilai baru yang sangat dibutuhkan bagi perubahan kondisi bangsa, sehingga membentuk karakter dan pola perilaku yang positif sebagai penggerak perubahan.

Kedua, belajar untuk menyaring dan menolak nilai-nilai buruk yang diwarisi dari sejarah lama maupun yang datang dari dunia kontemporer, agar tetap terjaga karakter yang otentik dan perilaku yang genuin.

Ketiga, belajar untuk menggali dan menemukan serta merevitalisasi nilai-nilai lama yang masih tetap relevan dengan tantangan masa kini, bahkan menjadi nilai dasar bagi pengembangan masa depan.

Proses belajar kepemimpinan bukan merupakan uji coba (*trial and error*) yang beresiko tinggi, melainkan upaya pengembangan potensi dengan dihadapkan pada kenyataan aktual.

Pertama krisis ekonomi-politik yang masih terus berlanjut menuntut tokoh yang kompeten di bidangnya dan memiliki visi yang jauh untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan. *Kedua*, bencana alam dan sosial yang terjadi silih berganti menegaskan perlunya kehadiran tokoh yang peka dan cepat tanggap terhadap penderitaan rakyat, serta berempati dengan nasib mayoritas korban.

Ketiga, tantangan lintas negara di era informasi membutuhkan urgensi kesadaran akan masalah-masalah dunia yang mempengaruhi kondisi nasional dan jaringan yang luas dalam pemanfaatan sumber daya.

Keempat, guncangan dalam kehidupan pribadi dan sosial mensyaratkan adanya kemantapan emosional dan spiritual dari setiap pemimpin dalam mengatasi problema diri, keluarga dan bangsanya. Walaupun problema nasional membutuhkan tampilnya kepemimpinan nasional sebagai salah satu aspek penting, namun proses pengkaderan dan penumbuhan kepemimpinan generasi baru perlu digarap dari tingkat lokal dan regional.

Selanjutnya kualitas kepemimpinan nasional diuji dalam kancah global, apabila Indonesia ingin memainkan peran yang lebih berarti dalam arena antar bangsa. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik.

Konsekuensi dari konsep negara kesatuan dan sistem demokrasi turut mempengaruhi pilar-pilar lembaga negara yang terbentuk. Pembagian kekuasaan ke dalam tiga lembaga: legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadikan dinamika politik yang tinggi pasca reformasi berlangsung. Berbagai peran dan fungsi lembaga negara di Indonesia menjadi salah satu aspek pendukung jalannya demokratisasi.

Secara obyektif peran dari lembaga negara adalah menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan roda kenegaraan. Di mana tugas masing-masing lembaga negara saling melengkapi dan saling melakukan koreksi, sehingga terjadinya harmonisasi. Sistem ketatanegaraan yang fungsional akan mewujudkan cita-cita reformasi menuju negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan berdemokrasi.

Salah satu tujuan dari negara hukum seperti di Indonesia adalah terciptanya hubungan antar lembaga negara yang independen, tidak saling mempengaruhi dan mengintervensi. Fungsi dan wewenang secara umum, antara lain:

- a. Eksekutif, adalah pelaksana kebijakan negara yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Eksekutif dapat juga dikatakan sebagai lembaga negara yang melaksanakan roda pemerintahan;

- b. Legislatif; sebagai penyeimbang eksekutif dalam melaksanakan kebijakan yang telah diatur bersama. Anggota legislatif merupakan representasi dari masyarakat secara umum karena keberadaan mereka yang dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum, maka legislatif membuat kebijakan dalam bentuk peraturan yang menjadi dasar pijakan dalam kerja pemerintahan;
- c. Yudikatif, merupakan lembaga yang menjamin semua kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Apabila terjadi perbedaan pandangan atau sengketa dalam pelaksanaan kebijakan, maka yudikatif mengambil peran penengah dan penyelesai masalah, Karena itu, suatu keharusan bagi yudikatif untuk bersifat mandiri dan terbebas dari tekanan manapun.

Selama ini penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga negara masih tumpang-tindih dalam hal kewenangan. Seringkali suatu kewenangan diperebutkan sebagai domain lembaga negara yang berbeda. Selain itu, terjadi intervensi antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, sehingga tidak jarang independensi suatu lembaga negara dalam mengeluarkan kebijakannya merupakan hasil kompromi para elit dalam lingkaran kekuasaan.

Tantangan dan kendala lain dipengaruhi oleh peran para aparatur negara, karena mentalitas birokrasi acap tak berubah, meskipun kepemimpinan politik telah berubah berulang-kali. Kelemahan jalannya fungsi dan peranan lembaga negara saat ini terdapat pada: pemahaman hubungan antar lembaga negara yang masih lemah di kalangan para elit; tata laksana hukum yang masih tumpang tindih

dan kurangnya koordinasi; alur birokrasi yang rumit, sulit dan berbelit-belit; serta integritas para aparatur negara.

Pada prinsipnya hubungan antar lembaga negara yang harus dilakukan menurut asas umum penyelenggaraan negara meliputi: asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Namun, saat ini sedikitnya terdapat 50 lembaga atau komisi negara yang bersifat independen di Indonesia. Kehadiran komisi khusus itu sama sekali tidak mengurangi masalah kebangsaan, sebab tugas dan fungsi lembaga negara yang ada malah cenderung tumpangtindih, sehingga konflik antarlembaga negara pun tak terhindarkan. Padahal, keberadaan lembaga negara sangat membebani keuangan negara. Triliunan rupiah uang negara yang bersumber dari utang dan pajak setiap bulan dipakai untuk menggaji anggota dan membiayai operasional lembaga. Bahkan, standar gaji dan tunjangan beberapa komisi berbeda-beda. Institusi birokrasi lembaga negara yang rapih dan kredibel akan mendorong berjalannya perekonomian yang dinamis dan tanpa distorsi.

Birokrasi yang bersih, efisien, dan ramping juga merupakan bentuk pemihakan yang paling berharga bagi rakyat miskin dan usaha kecil-mikro. Besarnya jumlah pegawai negeri membuat sistem penggajiannya menjadi sangat kompleks dan cenderung minimal, karena besarnya gaji yang diterima setiap pegawai hanya cukup untuk menopang hidup selama satu atau dua pekan. Lalu untuk menutupi kekurangan, dicarilah berbagai cara seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya. Praktik-praktik seperti itu membuka peluang terjadinya korupsi. Namun, besarnya pembiayaan untuk meningkatkan gaji

pegawai negeri agar lebih layak ternyata masih jauh lebih kecil, bila dibandingkan dengan nilai uang negara yang menguap karena praktik korupsi. Keputusan berani harus ditempuh untuk menuntaskan reformasi birokrasi.

Ada empat belas karakteristik yang harus ditumbuhkan, bila kita ingin menerapkan wacana tatakelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Berwawasan ke depan (visi strategis);
2. Bersifat terbuka (transparan);
3. Mendorong partisipasi masyarakat;
4. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat (akuntabel);
5. Menjunjung supremasi hukum;
6. Berwatak demokratis dan berorientasi pada konsensus;
7. Berdasarkan profesionalitas dan kompetensi;
8. Bersikap cepat tanggap (responsif);
9. Menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif;
10. Kewenangan terdesentralisasi;
11. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat;
12. Berkomitmen pada pengurangan kesenjangan;
13. Berkomitmen pada lingkungan hidup;
14. Berkomitmen pada pasar yang sehat dan terbuka.

PK Sejahtera memandang bahwa penyelenggaraan lembaga negara yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya menjadi suatu keniscayaan yang harus dijalani, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik.

Pertama, lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berkedudukan sejajar dan seimbang dengan pemisahan antar kekuasaan yang lebih tegas demi terjaminnya perimbangan kekuasaan. Lembaga-lembaga independen diperlukan dalam pelaksanaan kewenangan khusus dengan secara definitif dan tegas membatasi tingkat dan jenis independensinya.

Kedua, lembaga legislatif terdiri dari dua kamar demi tercapainya kualitas putusan yang lebih baik dan tertampungnya jenis perwakilan lain selain perwakilan politik. Dalam prioritas legislasi, PK Sejahtera memfokuskan pada terbentuknya peraturan perundang-undangan yang membuktikan solusi konkret Islam terhadap problematika masyarakat yang paling mendesak.

Ketiga, nilai-nilai universal Islam dan kepribadian islami harus menjiwai seluruh aspek kehidupan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama bagi para aparatur negara yang beragama Muslim.

Keempat, kekuasaan kehakiman harus mandiri dan merdeka. Kekuasaan untuk melakukan *judicial review* menjadi bagian dari kewenangan kehakiman yang harus dijalankan secara terbatas dengan mendasari pertimbangannya bukan saja semata-mata pertimbangan yuridis belaka (*rechtmatigheid*) tetapi juga pertimbangan tujuan diciptakannya hukum (*doelmatigheid*).

Kelima, Presiden merupakan penanggung-jawab utama semua kebijakan negara (*single executive*). Lembaga kepresidenan harus mendapat kontrol dari rakyat dan

lembaga perwakilan rakyat dengan cara pelibatan rakyat secara langsung ataupun lembaga perwakilan rakyat dalam setiap pengambilan putusan secara proporsional.

Keenam, model negara kesatuan menjadi pilihan hubungan antar pusat dan daerah dengan menekankan pada pelaksanaan kewenangan pusat yang lebih efektif dan peningkatan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dengan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien.

PK Sejahtera memandang bahwa kualitas institusi adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lestari. Namun institusi birokrasi negara tampaknya masih lemah, terutama dalam menjalankan prinsip *good governance* dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini tentu saja menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi agenda yang mendesak untuk dituntaskan. Reformasi birokrasi adalah pembenahan berbagai aspek kementerian dan lembaga pemerintah nondepartemen sebagaimana telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Institusi birokrasi yang profesional dan kredibel akan mendorong berjalannya perekonomian yang dinamis dan tanpa distorsi.

Birokrasi yang bersih, efisien, dan ramping juga merupakan bentuk pemihakan yang paling signifikan bagi rakyat miskin dan usaha kecil-mikro. Karena itu, PK Sejahtera memandang bahwa reformasi birokrasi adalah sebuah keharusan untuk pemulihan ekonomi yang cepat dan berdimensi masa depan.

Pelayanan birokrasi sering dikampanyekan, tetapi hingga kini birokrasi negara belum pernah diaudit dari sisi efektifitas struktur organisasi. Betapa gemuknya organisasi pemerintahan terlihat dari jumlah pegawai negeri sipil yang mencapai 4 juta orang. Dengan rasio pegawai negeri yang tinggi untuk setiap penduduk, maka Indonesia bisa disebut 'negeri pegawai' dan banyak potensi pegawai yang mubazir. Keinginan untuk menjadi pegawai negeri telah membentuk kultur kontraproduktif, karena menekan inisiatif berwirausaha. Akibatnya, sektor swasta mengalami keterbatasan tenaga yang berkompetensi tinggi dan tenaga asing menyerbu sektor strategis. Perbaikan birokrasi negara tidak bisa dijalankan secara parsial.

Seringkali kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsinya justru disebabkan oleh faktor internal. Kurangnya integritas pimpinan berikutan jajaran birokrasi dalam menjalankan tugasnya dan lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas birokrasi masih menjadi hambatan utama. Maraknya praktek KKN merupakan isu sentral yang menyebabkan rendahnya kinerja birokrasi dalam mendukung pembangunan. Bahkan, perbaikan hukum dan peradilan juga belum dapat diandalkan sebagai strategi pemulihan kepercayaan pihak luar untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional, Indonesia menemukan fakta bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat dari 2,0

pada 2005 menjadi 2,4 pada 2006. Peningkatan indeks itu menandai persepsi para pengusaha asing yang masih menganggap Indonesia sebagai surga korupsi. Bersenjatakan suap dan lobi-lobi khusus, para pengusaha dengan leluasa menggaet tender dari lembaga publik, standar pelayanan pun amat rendah. Survei itu juga menyimpulkan bahwa lembaga yang bersifat hirarkis dan mengurus penegakan hukum, yakni kepolisian dan peradilan, justru paling bermasalah dan menghambat pemberantasan korupsi.

Sistem penggajian pegawai negeri tidak berdasarkan standar obyektif, sehingga besarnya gaji yang diterima pegawai rendah hanya cukup untuk menyambung hidup satu atau dua pekan. Sebaliknya, pegawai berjabatan tinggi dan pejabat negara mendapat fasilitas melimpah disamping gaji tetap, sehingga amat memboroskan anggaran rutin negara. Rendahnya gaji pegawai menjadi alasan berbagai cara untuk menaikkan tunjangan jabatan dan praktik lain yang membuka peluang korupsi. Padahal, jika dikalkulasi, perbandingan biaya untuk meningkatkan gaji pegawai negeri ternyata masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai uang yang menguap karena praktik korupsi. Karena itu, diperlukan keberanian untuk menetapkan kebijakan reformis yang berdampak luas.

Pada tahun 2003, perkiraan rekapitulasi jumlah uang yang dikorupsi adalah Rp 215 triliun dari perpajakan; pencurian ikan, pasir dan kayu senilai Rp 76,5 triliun; subsidi bank rekapitalisasi yang tidak perlu Rp 14 triliun. Seluruhnya berjumlah Rp 305,5 triliun. Seandainya 30% dari dana itu dapat terselamatkan dengan pemberantasan korupsi, maka pemerintah sudah memperoleh pendapatan tambahan sebesar Rp 92 triliun. Itu dana yang besar untuk peningkatan

kesejahteraan. Dengan mengacu pada praktik-praktik korupsi yang terjadi di tataran birokrasi, maka, pemberantasan KKN dapat dibedakan dalam dua dimensi.

Pertama, pemberantasan KKN kasus per kasus. Pemberantasan ini merupakan bentuk dari penegakan semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Kedua, penciptaan kondisi yang kondusif untuk pemberantasan KKN. Seringkali korupsi didorong oleh pendapatan yang kurang mencukupi, namun banyak juga korupsi yang didorong sifat keserakahan. KKN sudah menjelma menjadi perampokan besar-besaran dari kekayaan rakyat. Karena itu, sukses-tidaknya pelaksanaan reformasi birokrasi juga beriringan dengan keseriusan dalam penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi harus menyentuh perbaikan-perbaikan di institusi hukum, terutama lembaga peradilan. Reformasi hukum adalah sarana untuk menegakkan supremasi hukum yang meliputi prinsip:

- (1) pemerintah dan warga terikat oleh hukum;
- (2) setiap orang di masyarakat diperlakukan sama di hadapan hukum;
- (3) kemuliaan manusia diakui dan dilindungi hukum; dan
- (4) keadilan terjangkau oleh semua.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diandalkan dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban, serta adanya pemerintah yang memiliki legitimasi dan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai partai reformis, PK Sejahtera berkomitmen untuk mengawal jalannya

reformasi birokrasi dan hukum. Komitmen tersebut diwujudkan dalam tiga agenda strategis:

Pertama, menuntaskan reformasi birokrasi. Untuk itu, PK Sejahtera akan menempuh berbagai langkah, yaitu

- (i) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui perbaikan sistem rekrutmen dan promosi berdasarkan *merit-based system*, bukan hanya perbaikan renumerasi;
- (ii) menurunkan jumlah pegawai negeri melalui kebijakan *zero growth* dan memfokuskan mereka pada fungsi pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan medis;
- (iii) meningkatkan koordinasi dan sinergi antar institusi seperti Menpan, BKN, Depkeu, dan Depdagri untuk reformasi birokrasi yang efektif.

Kedua, menghilangkan inefisiensi sektor publik. Inefisiensi sektor publik bersumber dari dua hal, yaitu pemborosan dana dan korupsi. Menghapus kedua penyebab inefisiensi ini membutuhkan kebijakan yang komprehensif, tidak hanya masalah manajemen personal dan anggaran, tetapi juga meliputi aspek moral dan spiritual. Kebijakan itu meliputi:

- (i) mengubah paradigma aparatur negara melalui pembinaan mental dan spiritual yang terus menerus dan sistematis;
- (ii) mengubah budaya organisasi melalui pengenalan budaya organisasi modern;
- (iii) penegakan peraturan dan sanksi yang tegas atas setiap penyalahgunaan jabatan publik.

Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Reformasi lembaga peradilan nasional menjadi titik krusial untuk kepastian hukum, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan efisiensi perekonomian. Kebijakan supremasi hukum meliputi:

- (i) kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk penegakan hukum nasional, baik di tingkat pemerintahan maupun lembaga peradilan;
- (ii) menghapus korupsi dan penyalahgunaan jabatan di institusi peradilan;
- (iii) peningkatan kompetensi aparat penegak hukum.

Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, lalu menyempurnakan substansi hukum nasional dan membangun budaya hukum yang positif.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertera dalam penjelasan UUD 1945. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Kenyataannya, proses penegakan hukum dan perlindungan HAM masih mengalami berbagai tantangan. Secara umum, ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum.

Pertama, tidak maksimalnya institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya.

Kedua, lemahnya budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraan kelembagaan.

Ketiga, belum terpenuhinya kelengkapan perangkat peraturan, baik yang mendukung kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.

Sebagai garda terdepan dalam penegakan keadilan, aparat penegak hukum seyogyanya menjadi kunci penyebaran keadilan bagi masyarakat. Tapi praktek yang ada dilapangan, kinerja aparat justru kontraproduktif terhadap perannya. Penegakan hukum adalah proses memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara prinsip, ketika negara dapat menjamin perlindungan HAM terhadap warganya, maka penegakan hukum akan menjadi langkah pertama yang otomatis dilakukan oleh negara. Berkedudukan dan diperlakukan sama di mata hukum, menjadi indikator sederhana bahwa penegakan hukum berjalan secara sehat.

PK Sejahtera, bersama seluruh elemen bangsa bertekad keras untuk terus memperjuangkan penegakan hukum dan perlindungan HAM ke arah lebih baik dengan tujuh solusi strategis sebagai berikut:

Pertama, strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih baik di kepolisian, kejaksaan,

kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum.

Kedua, mendorong penindakan hukum yang tegas, namun menghormati asas keadilan dan *due process of law* terhadap kejahatan yang merugikan keuangan negara dan moralitas, seperti pembalakan hutan, perpajakan, dan narkoba.

Ketiga, mendukung upaya pemberantasan (penindakan maupun pencegahan) korupsi. Pemberantasan korupsi harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya pencegahan korupsi dan pengembalian kerugian negara menjadi prioritas. Dimensi ini dapat dilakukan dengan cara:

- i) berperan aktif dalam pembentukan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional maupun daerah;
- ii) berperan aktif dalam reformasi birokrasi, terutama di daerah-daerah dimana kader partai memiliki akses kuat kepada birokrasi.

Keempat, memastikan pemerintah memberikan jaminan perlindungan HAM berdasarkan muatan HAM dalam konstitusi yang diwujudkan dengan:

- i) membuat aturan pelaksanaan dalam upaya implementasi seluruh materi-materi HAM dalam konstitusi dan undang-undang menjadi aplikatif;
- ii) melakukan revisi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan materi HAM dalam konstitusi;
- iii) memperhitungkan perlindungan HAM dalam semua kebijakan pemerintah.

Kelima, mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak ekososbud --seperti hak atas pekerjaan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pangan serta hak-hak pekerja dan lain sebagainya. Langkah ini hendaknya menjadi prioritas utama pemerintah terutama dalam rangka membuat kebijakan tentang pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, mengingat terbengkalainya aspek keadilan sosial dan tingkat kemiskinan negara kita yang semakin mengkhawatirkan.

Keenam, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan posisi RI sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam menciptakan perdamaian dunia, serta memastikan terjaminnya perlindungan HAM di tingkat internasional tanpa pandang bulu.

Ketujuh, memastikan pemerintah memberikan ruang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi ini diberlakukan bukan saja sebagai hak asasi warga negara, tetapi juga harus diberlakukan sebagai kewajiban tiap warga negara. Dalam ajaran dan sejarah Islam, *hisbah* (kontrol publik berupa *amar ma'ruf dan nahi munkar*) merupakan bentuk kebebasan berekspresi telah terbukti menjadi alat kontrol yang efektif bagi para penguasa.

Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru.

Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang telah diamandemen. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk memelihara keaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan. Mencermati dinamika domestik, regional maupun global, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan dapat berbentuk ancaman keamanan tradisional dan ancaman keamanan non-tradisional. Kemampuan keamanan tradisional berupa invansi atau agresi militer dari negara lain diperkirakan kecil. Ancaman keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan NKRI. Ancaman yang berasal dari luar kemungkinan bersumber dari kejahatan terorganisir lintas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara, dengan memanfaatkan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif. Perkiraan ancaman dan gangguan yang akan dihadapi Indonesia meliputi aksi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara, pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan/perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan bencana alam.

Dalam rangka pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Meskipun peran sebagai alat pertahanan negara yang utama tetap berada di pundak TNI.

Tantangan utama dalam pengikutsertaan warga negara adalah rendahnya tingkat kesadaran untuk terlibat dalam upaya pertahanan negara. Secara internal, TNI juga menghadapi beberapa kendala. Kelengkapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) belum memenuhi standar. Kondisi ini terjadi karena minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBN. Untuk tahun 2006, hanya dianggarkan US\$ 2,8 miliar atau kurang dari 1% dari Produk Domestik Bruto, sedangkan anggaran pertahanan negara-negara lain berkisar 3% dari PDB, bahkan ada negara yang menetapkan 6-8 % dari APBN. Komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri pun belum dapat dirasakan.

Di sisi lain, tingkat kesejahteraan prajurit sebagai pengemban amanah pertahanan juga mengkhawatirkan. Hal itu merupakan salah satu sebab munculnya berbagai tindak penyelewengan yang dilakukan sejumlah oknum aparat, termasuk bisnis militer. Segala usaha pertahanan negara harus berujung pada upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Landasan pokok pembangunan pertahanan difokuskan pada fungsi TNI sebagai faktor penggentar, penindak dan perehabilitasi.

Secara umum, seluruh komponen harus terlibat dalam segala usaha pertahanan negara. PK Sejahtera berpandangan, kesamaan langkah dan kesatuan gerak antara rakyat dan negara --termasuk TNI di dalamnya—akan memperkokoh pertahanan negara. Untuk itu, PK Sejahtera merekomendasikan tujuh solusi strategis sebagai berikut:

Pertama, menjadikan TNI sebagai elemen pertahanan negara yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan dengan berupaya meningkatkan kesejahteraan personil. Selain itu, memperbaharui teknologi peralatan kerja termasuk persenjataan, meningkatkan proporsionalitas dengan jumlah penduduk, dan mengubah pengorganisasian tentara dari pendekatan teritorial ke pendekatan tempur TNI.

Kedua, mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan kekuatan nasional yang tangguh, terutama dalam menghadapi kekuatan-kekuatan global yang berniat melemahkan Indonesia dengan politik penjajahan ekonomi, sosial, budaya maupun taktik intelejen.

Ketiga, pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong penggunaan produk industri dalam negeri sehingga tumbuh kemandirian dalam bidang peralatan kemiliteran dan tidak tergantung pada produk peralatan militer luar negeri.

Keempat, peningkatan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat, selain untuk menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional, juga dalam rangka transfer teknologi pertahanan.

Kelima, menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara rakyat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, serta keterampilan pertahanan negara. Untuk itu rasa saling percaya dan

semangat kebangsaan baru harus ditumbuhkan, seraya mengendalikan konflik horizontal yang tersisa.

Kéenam, meminimalisasi bibit-bibit separatisme dengan mengutamakan proses dialog untuk perdamaian perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan bagi daerah tertindas dan terbelakang. Dengan demikian perlu transformasi paradigma penyelesaian konflik, dari aksi militer sporadik menjadi aksi politik dan diplomasi damai.

Ketujuh, penegakan disiplin keprajuritan harus dilandasi prinsip keadilan dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan negara dengan menempatkan polisi selaku aparat pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pengayom dan pelindung, serta pelayan masyarakat. Menghadapi gejolak masyarakat dengan metode dialog dan perdamaian, disamping penegakan hukum dan perwujudan kesejahteraan.

Keamanan nasional pada masa kini tidak lagi dipandang secara konvensional, yaitu keamanan yang dicapai dengan memperkuat militer dan mengamankan perbatasan. Konsep keamanan negara dapat dicapai dengan memerangi kemiskinan, mengatasi kerusakan lingkungan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan. Sejatinya isu keamanan nasional tidak dapat dipisahkan dari isu penting lain, seperti HAM dan demokratisasi. Amanat

untuk mengemban tugas keamanan nasional ada di pundak Kepolisian Republik Indonesia. Polisi diamanahi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Namun, penyelenggaraan keamanan nasional sebenarnya merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Ancaman terhadap keamanan nasional berasal dari tiga jenis konflik, yakni: konflik antar negara, konflik dalam negeri, dan konflik lintas negara. Ancaman yang datangnya dari luar negara menjadi domain TNI, sementara keamanan dalam negeri dan terselenggaranya kepentingan umum menjadi bagian dan tugas Polri. Sedangkan bencana alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia menjadi tugas dan kewajiban bersama TNI dan Polri.

Untuk menciptakan keamanan nasional, perlu perubahan paradigma dalam memandang konsep keamanan. Pendekatan yang digunakan tidak boleh dipahami hanya sebagai penggunaan kekuatan militer. Mengubah paradigma pendekatan dan kultur militer dalam tubuh Polri menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Rendahnya perhatian pada kesejahteraan anggota Polri, dapat menjadi lahan subur berkembangnya KKN dan praktek pembekingan dalam melanggengkan kejahatan. Sehingga, tugas sebagai penegak hukum dilanggar.

Ketersediaan peralatan penunjang yang memadai akan meningkatkan kepercayaan diri aparat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Namun pemenuhan sarana dan prasarana ini terhambat karena minimnya anggaran yang tersedia. Kebijakan keamanan nasional tidak hanya didasarkan pada suatu persepsi tentang kebutuhan dan prioritas keamanan nasional, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, internal, tekanan tanggung jawab dan komitmen.

Untuk itu kebijakan keamanan nasional harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara. Keamanan harus ditempatkan secara seimbang, antara keamanan negara (*state security*) dan keamanan warga (*human security*). PK Sejahtera menetapkan sejumlah kebijakan yang akan memperkuat sistem keamanan negara, yaitu:

Pertama, mendorong pemerintah dan aparat kepolisian untuk melakukan perubahan paradigma dalam menyelenggarakan keamanan nasional, dari pendekatan militeristik ke pendekatan sipilian.

Kedua, mendorong Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, menjadi elemen keamanan nasional yang berwibawa, profesional, efisien, dan bersih dari penyelewengan.

Ketiga, mengoptimalkan segenap potensi bangsa untuk mewujudkan keamanan nasional yang tangguh sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi negara.

Keempat, mendorong kerjasama pengamanan nasional dengan negara-negara sahabat guna menciptakan kondisi keamanan kawasan, regional dan internasional.

Kelima, menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai paham dasar sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Keenam, menghadapi bibit-bibit gangguan keamanan nasional dengan mengutamakan proses perdamaian, penegakan keadilan, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sebelum ditempuh tindakan keamanan yang bersifat represif.

Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah Indonesia dulu disebut Nusantara (Kepulauan Antara), karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia, berbatasan dengan Malaysia di pulau Kalimantan, berbatasan dengan Papua Nugini di pulau Papua, dan berbatasan dengan Timor Timur di pulau Timor. Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi, termasuk dua Daerah Istimewa, yakni Nanggroe Aceh Darusalam dan Yogyakarta dan satu Daerah Khusus Ibukota, yakni Jakarta.

Sebelum era reformasi, Indonesia hanya memiliki 27 propinsi, dan kemudian Timor Timur sebagai propinsi ke-27 memisahkan diri melalui

referendum menjadi negara Timor Leste. Pisahnya Timor Timur dan pulau Sipadan Ligitan adalah salah satu contoh rawannya daerah Indonesia dari pemisahan diri. Tantangan lain adalah keterlibatan asing dalam proses pemisahan pulau-pulau dan daerah itu dari Indonesia. Sehingga harus terjadi penolakan kuat dari Indonesia terhadap disintegrasi dalam setiap konflik yang ada. Indonesia terdiri dari 33 provinsi, 458 kabupaten/kota dengan tingkat kemakmuran yang berbeda-beda dan akan terus bertumbuh sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah dan daerah. Kesejahteraan adalah pangkal dari setiap permasalahan kewilayahan Indonesia yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, dan sekitar 6000 di antaranya tidak berpenghuni. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dengan penduduk setengah populasi Indonesia. Ada lima pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra (473.606 km²), Kalimantan (539.460 km²), Sulawesi (189.216 km²), dan Papua (421.981 km²).

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik yang rawan gempa bumi dan dapat menimbulkan tsunami. Negara kesatuan merupakan sikap final dari perjuangan PK Sejahtera, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi segenap wilayah. Segala bentuk ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang akan memecah kesatuan bangsa harus diselesaikan. Ancaman ini bisa dijawab dengan memberi otonomi daerah seluas-luasnya secara proporsional dan tetap memelihara nilai-nilai lokal masyarakat

setempat yang didasarkan atas kesadaran moral. Dengan demikian akan terbentuk negara yang membagi rata kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Banyaknya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI adalah sinyal bahwa Indonesia masih rawan terhadap gerakan separatis. Sehingga perlu untuk menyadarkan segenap komponen bangsa tentang urgensi negara kesatuan. Oleh karena itu, PK Sejahtera menawarkan konsep '*alal wihdah*' (di atas kesatuan). Konsep persatuan dengan ikatan kebangsaan yang saling membantu untuk menggalang pertumbuhan dan pengembangan serta saling melindungi dari kemungkinan terjadinya ancaman dan tantangan baik dari dalam maupun luar. Kesatuan yang memunculkan nilai-nilai kesederajatan dan kemanusiaan, baik dari dimensi agama maupun sosial. PK Sejahtera juga menolak ketidakadilan perlakuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas perbedaan suku, warna kulit, ras dan atau agama.

Untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, PK Sejahtera menetapkan tujuh langkah strategis:

Pertama, setia terhadap NKRI karena sebagai partai dakwah, PK Sejahtera memandang bumi Nusantara disatukan dalam "Bhineka Tunggal Ika" melalui ajaran Islam yang dipeluk oleh mayoritas bangsa dan tercermin dalam "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Persatuan Indonesia".

Kedua, akan selalu bekerjasama dengan seluruh pihak yang berusaha membangun dan memelihara seluruh kekayaan alam Nusantara.

Ketiga, mewujudkan soliditas dan kesetupaduan seluruh propinsi di Indonesia dengan memberikan pendidikan kesatuan bangsa di bawah nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat, memandang perlunya otonomi daerah yang terkontrol dan terkoordinasi serta terkendali yang berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Kelima, memandang perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan yang berwawasan Nusantara di seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Untuk itu, PK Sejahtera akan selalu melakukan pembinaan kewilayahan yang terpadu sesuai dengan nilai-nilai dakwah dan ideologi keadilan.

Keenam, memandang perlunya pemerataan pendidikan cinta bangsa yang berbasiskan nilai-nilai budaya, terutama keyakinan agama yang tumbuh dan berkembang di seluruh Nusantara.

Ketujuh, terus menerus menyadarkan seluruh wilayah dan daerah akan pentingnya kerjasama sosial, karena tidak meratanya kemakmuran dan adanya beberapa daerah yang rawan bencana di Indonesia.

Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling

menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip tersebut dipahami sebagai sikap dasar RI yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara adidaya; menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar.

Akan tetapi, RI tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di kancah internasional, seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD.

Dinamika politik luar negeri membuat sikap dan pandangan negara dipanggung internasional bisa berubah dari waktu ke waktu. Pada dasarnya politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalam negeri; kemampuan ekonomi dan militer; serta lingkungan internasionalnya. Perubahan konteks dalam dan luar negeri telah menghasilkan perbedaan-perbedaan dalam sikap dan pandangan Indonesia terhadap kondisi internasional pada setiap periode pemerintahan.

Pada era Soekarno (1945-1965), politik internasional Indonesia lebih condong ke kiri (komunisme). Meskipun pada tahun 1948 Bung Hatta menyampaikan pidato berjudul "Mendajung Antara Dua Karang" (1948), yang menjadi awal dari prinsip bebas aktif, kondisi dalam negeri telah mempengaruhi sikap pemerintah dalam hubungan internasional. Bangkitnya kekuatan PKI dan

kelompok-kelompok kiri ketika itu, ditambah dengan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, memang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia.

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia bergerak ke kanan (kapitalisme). Ketika itu kepentingan nasional Indonesia memang sangat menonjolkan pembangunan ekonomi. Aspek pembangunan ekonomi tersebut kemudian membuat RI harus berpaling ke Barat. Pada perkembangan selanjutnya, faktor keamanan juga turut mempengaruhi kebijakan luar negeri RI. Faktor ini terutama berkaitan dengan masalah Irian Jaya dan Timor Timur. Politik luar negeri RI semakin aktif pada tahun 1980-an, ketika kemajuan ekonomi dan stabilitas politik mulai terjamin, RI ingin mengambil peranan yang lebih penting di panggung internasional.

Diawali di tingkat regional, RI lebih giat mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara melalui ASEAN, terutama dengan ikut mengupayakan terciptanya perdamaian di Kamboja. Lalu RI tampil menjadi Ketua Gerakan Non-Blok (1992-1995), dan puncaknya menjadi tuan rumah pertemuan petinggi APEC di Bogor (November 1994).

Pada masa peralihan, ketika Habibie menggantikan Soeharto, terjadi perubahan penting dalam perpolitikan dalam dan luar negeri. Kebijakan luar negeri RI memang tidak banyak berubah, tetapi krisis multidimensi yang melanda RI membuat posisinya di panggung internasional mengalami kemunduran. Posisi RI di dunia internasional semakin sulit, tatkala Timtim lepas melalui proses jajak pendapat di bawah PBB, dan TNI dituduh terlibat dalam kekacauan di Timtim, beberapa saat setelah hasil jajak pendapat berakhir dengan penuh kekecewaan.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya. Akan tetapi, dalam setiap kunjungannya tidak ada agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri. Wahid akhirnya diturunkan dari kursi Presiden, namun ternyata Megawati yang menggantikannya tidak memiliki agenda internasional yang fokus. Megawati juga banyak melakukan lawatan keluar negeri, namun, sekali lagi dengan agenda yang tidak kongkrit.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berkeinginan membuat arahan hubungan internasional yang lebih jelas tertata. Setidaknya ada dua catatan penting dari upaya pemerintahan Yudhoyono dalam menjalankan politik internasional Indonesia.

Pertama, aspek pembangunan ekonomi kembali menjadi landasan utama Indonesia dalam membangun hubungan luar negeri. Di awal pemerintahannya, presiden Yudhoyono beberapa kali melakukan lawatan ke luar negeri, termasuk ke AS bersama tim ekonominya. Tujuannya, tidak lain untuk mempromosikan Indonesia kepada calon-calon investor asing. Hanya saja, setelah kurang lebih dua

tahun pemerintahan Yudhoyono berjalan, belum ada perkembangan yang nyata dalam kontribusi penanaman modal asing.

Kedua, faktor keamanan juga masih menjadi isu sentral dalam politik luar negeri Indonesia. Walau demikian, Indonesia juga berupaya mengambil peranan yang nyata dalam berkontribusi dalam membantu perdamaian di Timur Tengah.

Dari evaluasi singkat itu tampak bahwa semenjak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia masih belum berhasil membangun posisi tawar yang signifikan dalam panggung internasional. Kondisi ini diakibatkan oleh konsep hubungan internasional yang tidak terintegrasi dengan perkembangan di dalam negeri, terutama sektor ekonomi dan keamanan.

Politik luar negeri harus berangkat dari perkembangan pembangunan dalam negeri. Upaya membangun citra di luar negeri tidak akan berhasil bila dilakukan dengan diplomasi kosong. Bagaimana mungkin bisa meyakinkan investor asing, bila iklim investasi dalam negeri masih tidak pasti, karena ekonomi biaya tinggi dan citra buruk sebagai surga korupsi. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk kembali mengintegrasikan kebijakan luar negerinya dengan kondisi di dalam negeri. Apabila Indonesia ingin meningkatkan kepercayaan investor, maka iklim investasi yang kondusif serta kepastian usaha di dalam negeri harus diupayakan. Bila Indonesia ingin mengembangkan citra yang positif, maka harus dimunculkan tokoh-tokoh penting dalam negeri yang bertaraf internasional. Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya dalam hubungan

internasional. Krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat ketergantungan terhadap bantuan negara-negara besar sulit dihindari.

Pada awalnya Indonesia terikat dengan komitmen bantuan dari lembaga keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia. Yang didominasi kepentingan negara besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatannya dengan mempercepat kemandirian ekonomi. Segala bentuk ketergantungan terhadap kekuatan asing bisa berdampak buruk bagi penataan kehidupan nasional. Indonesia harus menimba pelajaran dari negeri-negeri yang berhasil melakukan transisi menuju demokrasi secara mantap. Kesuksesan proses transisi akan menjadi dasar perjuangan untuk meraih kehidupan nasional yang stabil, maju, dan berkeadilan. Untuk itu, pengokohan strategi diplomasi sebagai ujung tombak dalam pertahanan negara perlu diterapkan dengan saksama. Pelbagai tekanan pihak-pihak yang akan memecah-belah dan menguasai Tanah Air Indonesia patut diwaspadai, walaupun harus dihindari munculnya sindroma *xenophobia* dan kemungkinan gejala *chauvinisme*.

Secara obyektif dapat diterapkan asas lingkaran konsentrik untuk menakar kedekatan geografis dan prioritas kepentingan nasional dalam kebijakan luar negeri. Perhatian lebih besar wajar diberikan bagi pengembangan hubungan regional di Asia Tenggara, serta Asia Timur dan Kawasan Pasifik. Selanjutnya jangkauan hubungan diperluas meliputi kawasan Asia Selatan dan Timur Tengah, hingga menembus wilayah Eropa dan Amerika. Peran yang lebih bermakna perlu dilakukan dalam skala regional dan internasional, seperti di lembaga ASEAN dan APEC. Begitu pula partisipasi yang kongkrit dalam OKI dan PBB. PK Sejahtera menegaskan kembali, politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif agar

tetap dipertahankan. Segenap aspek hubungan luar negeri diselenggarakan dengan prinsip: kesetaraan, saling menghormati kedaulatan, saling menguntungkan, serta penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Dalam koridor itu, PK Sejahtera meyakini, peran internasional bangsa Indonesia akan menjadi kontribusi yang positif bagi peradaban dunia. Sesuai dengan amanat UUD, Indonesia harus berpartisipasi dalam penciptaan stabilitas regional dan perdamaian dunia. Salah satu agendanya adalah menggalang solidaritas bagi bangsa-bangsa yang tertindas dalam memperjuangkan kemerdekaannya.

Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan politik dan ekonomi yang dominan.

Dunia menjadi satu dengan semakin mudahnya manusia berkomunikasi melalui perangkat teknologi canggih. Kendala jarak tidak lagi menjadi hambatan dalam berhubungan antarmanusia. Setiap hari informasi masuk dan keluar melalui berbagai perantara baik lisan maupun tulisan, lewat media cetak atau elektronik. Derasnya arus informasi dan semakin intensifnya pola komunikasi antar manusia di berbagai tempat memerlukan pola penataan informasi dan komunikasi.

Sejak era reformasi, perkembangan pers di Indonesia mengalamipeningkatan pesat. Di bidang media cetak; koran, majalah, dan tabloid baru terbit dengan semangat meraih pembaca dan iklan sebanyak-banyaknya. Di bidang media elektronik bermunculan stasiun televisi baru yang pada zaman

sebelumnya hampir mustahil dapat mengudara. Perkembangan yang lebih dahsyat terjadi di media internet bersamaan dengan merebaknya teknologi komputer. Munculnya industri media baru sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Intervensi pemilik media ke ruang baca, ruang dengar, dan ruang pandang khalayak praktis tak dapat dibendung. Oleh sebab itu diperlukan filter informasi yang dapat melindungi khalayak dari pengaruh negatif sajian media.

Salah satu tonggak demokrasi adalah kebebasan pers. Namun kebebasan pers seharusnya disikapi dengan arif. Gejala pornografi dan pornoaksi, informasi hedonistik, dan sajian kekerasan di media massa cenderung mendapat ruang gerak yang lebih besar. Perlu segera disahkan UU Anti Pornografi untuk melindungi publik dari pengaruh negatifnya, karena negara-negara maju sekalipun tetap menjaga informasi yang sehat bagi warganya.

Sebaliknya, dalam hal kebebasan berpendapat dan penyampaian opini di media massa, kontrol pemerintah harus diminimalisir. Monopoli kepemilikan media adalah tantangan utama bagi proses demokratisasi. Dominasi pemodal besar akan menutup akses publik untuk mendapatkan opini yang berbeda dan seimbang. Padahal, informasi adalah hak publik, sehingga diperlukan proses pendidikan bagi publik agar mampu menyerap informasi yang mencerahkan. Masyarakat harus diberi keleluasan untuk menembus akses informasi. Penting sekali menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan demokratis. PK Sejahtera memandang kejujuran dan kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan semangat menegakkan etika profesi dan pemberlakuan sanksi hukum bagi yang melanggar. Pelaku komunikasi dan pekerja media dituntut untuk mengedepankan sikap profesional dan nilai etik. Sebagai upaya melakukan pemerataan informasi,

penguatan terhadap pengembangan media komunitas adalah solusi yang strategis. Setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya, UU Kebebasan Informasi harus diprioritaskan sebagai koridor bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak-haknya dan melaksanakan kewajiban kontrol sosial. Pemerintah sebagai fasilitator terhadap media publik (radio dan televisi) harus mengawasi proses restrukturisasi Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) menjadi radio dan televisi publik. Kedua media itu merupakan aset negara dengan infrastruktur yang tersebar di berbagai daerah, selanjutnya harus didorong menjadi media publik yang kredibel dan profesional.

Jangan sampai RRI dan TVRI dikuasai pemilik modal yang berkoalisi dengan kekuatan politik tertentu. Pekerja di sektor media perlu difasilitasi dengan penguatan posisi dan jaminan keamanan dalam melakukan tugas dan profesinya. Tindakan premanisme dan kekerasan aparat negara adalah salah satu bentuk ancaman bagi kebebasan informasi, karenanya harus dilawan bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Sementara itu peningkatan kesejahteraan praktisi media bisa dilakukan dalam bentuk standar gaji yang memadai, pengembangan serikat wartawan dan penyertaan modal dalam bisnis media bersangkutan. Kondisi wartawan yang mandiri dan sejahtera merupakan modal penting untuk pengembangan iklim informasi yang sehat dan terbuka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan baik dari bahan literatur maupun hasil pengamatan di pentas politik nasional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: .

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai politik yang lahir pada momen era reformasi merupakan hasil proses sejarah yang panjang dari pergulatan politik di tanah air. Oleh karenanya eksistensinya tidak bisa diputuskan dari mata rantai perjuangan politik ummat baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Sebagai partai Islam Partai Keadilan Sejahtera memiliki komitmen yang kuat dan teruji dalam realitas perkembangannya hingga saat ini untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai partai Islam yang ada dalam ruang dan waktu Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera tidak menafikan latar belakang ke Indonesian, tapi justru melekat erat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45 dengan menyikapi secara arif pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan aneka ragam aspeknya, seperti agama dan keyakinan, suku, budaya dan lainnya.

Partai Keadilan Sejahtera berhasil keluar dari perangkap ideology sekuler yang ditanamkan kaum colonial lewat penjajahan di segala aspek kehidupan, PKS memiliki Paradigma Baru dalam kehidupan politik di tanah

air yang berbeda dengan partai-partai lainnya. PKS tidak mendikotomikan antara dakwah dan politik sebagai entitas yang diamateral, tapi berhasil mengkompromikanya menjadi sesuatu yang sinergis.

6.2 SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, penulis bermaksud menyampaikan saran sebagai berikut:

6.2.1 Bagi Ummat Islam

Sesuai dengan ajaran Islam, dalam Al-Qur'an bahwa kita hendaknya hati-hati dan teliti dalam setiap informasi, ide dan ajaran dari kalangan orang-orang fasik supaya tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan suatu kaum khususnya kaum muslimin sendiri. Dalami dan aplikasikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lii alamin secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan.

6.2.2 Bagi Politisi Muslim

Merupakan suatu keperluan yang mendesak untuk mencari pengganti cara pandang dan praktek politik yang sekularistik, hedonistic dan kurang mengindahkan fatsun politik apalagi nilai-nilai moral dan agama, dengan kembali mempertegas jati diri sebagai muslim yang memiliki religiusitas yang baik.

6.2.3 Bagi Pemerintah dan Kalangan Non Muslim

Diharapkan lebih memahami ajaran Islam dan realitas ummatnya dalam perspektif Islam itu sendiri, sehingga tidak cepat

curiga dan salah paham terhadap Islam dan ummatnya yang ingin menjalankan Islam secara kaffah, termasuk dalam bidang politik.

6.2.4 Bagi Partai Keadilan Sejahtera

Hendaklah jati partai pelopor yang konsisten dalam penerapan nilai-nilai islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan mampu memimpin bangsa ini kearah kemajuan dan peradaban yang dicita-citakan kaum muslimin dan bangsa Indonesia pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Halim Mahmud. *Wasail At-Tarbiyah 'Inda Al-Ikhwan Al Muslimun*. Kairo: Dar Al-Wafa. 1990.
- Abd Majid. *50 Indikasi Destruktif Demokrasi, Pemilu dan Partai*. terj. Ibnu Mawardi. Lampung : Pustaka Al-Harth. 1995.
- Abdul karim Sharash. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan. 2002.
- Abdul Wakaf Khalaf. *'Ilmu ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Kuwait. 1968.
- Abu Daud. t.t. *Sunan Abu Daud*. Beirut : dar Al-Fikr.
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad*. Maktab Al-Jundi. 1972.
- Abul Hasan Ali Alhasani An-Nadwi. *Islam dan Para Orientalis*. Terj. H.Bey Arifin. Surabaya: Bina Ilmu. 1983.
- Abu Rida. *Saat Dakwah Memasuki Wilayah Politik*. Jakarta: Syamil. 2003.
- _____. *'Amal Siyasi: Gerakan Politik Dalam Dakwah*. Bandung: Syamil. 2004.
- Abul A'la Al-Maududi. *Al-Khilafah wa al-Mulk*. Pakistan : Maktab Lahore. 1992.
- Abul A'la Al-Maududi . *Politik Alternatif Suatu Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1991.
- Abu Zahra. Ed. *Politik demi Tuhan*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1999.
- Achmad Mubarak. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- _____. *Jiwa dalam Al-Qur'an, Solusi Krisi Kerohanian Manusia Modern*. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Afan Gafar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- A.Hasyimi. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: PT.Alma'arif. 1981.
- Ahmad Adaby Darban. *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Cordova. 1990.

- Ahmad Satori Ismail. *Bolehkah Golput?* Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna. 2003.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Cet.ke-1. Bandung: Mizan. 1993.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1996.
- Anis mata. *Menikmati Demokrasi*. Jakarta: Pustaka saksi. 1997.
- Aus Hidayat. *Urgensi dan Aspek Tarbiyah dalam manhaj Islam*. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna. 2002.
- B.J. Roland. *Pergumulan Islam di Indonesia*. terj. Syafoedin Bahar. Jakarta: Grafiti Pers. 1985.
- Bukhari Yusuf (ed). *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Global Media. 2004.
- Cahyadi Takariawan. *Menang dan Menang Songsong Pemilu Tanpa Ragu*. Jakarta: Pustaka Tariatuna. 2002.
- Coulson. *Conflict and Tension In Islamic Jurisprudence*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000
- D.G.E. Hall. *Sejarah Asia Tenggara*. Surabaya: Usaha Nasional. 1988.
- Djoni Edward. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. Bandung : Syamil. 2006.
- DPP PKS. *Dari Kader Untuk Bangsa*. Jakarta: Humas DPP. 2007.
- _____. *AD-ART PK Sejahtera*. Jakarta: Humas DPP. 2001.
- _____. *Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Humas DPP. 2008.
- _____. *Mereka Bicara PKS : Telaah Objektif Perjalanan Dakwah Politik PKS*. Bandung : Fitrah Rabbani. 2007.
- _____. *Sikap Kami*. Jakarta: Humas DPP. 2001.
- _____. *Jati Diri Partai keadilan*. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna. 2002.
- _____. *Kebijakan Dasar PK Sejahtera*. Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna 2002.
- _____. *Tarbiyah Menjawab Tantangan*. Jakarta: Pustaka Tabiatuna. 2002.

- Endang Saifuddin Ansari. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung : Pustaka Firdaus. 1981.
- _____. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*. Bandung: Pustaka Salman ITB. 1983.
- Esposito, John L. *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*. Terj. Rahman Astuti. Bandung : Mizan. 1999.
- Fachry Ali. *Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural*. Bandung: Mizan. 1984.
- Fazlul Rahman. *Islam*. Bandung: Mizan. 1984.
- Francisco Budi Hardiman. *Kritik Ideologi : Pertautan Pengetahuan dan kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- F.R. Ankersmit. *Refleksi Tentang Sejarah*. Terj. Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia. 1987.
- Hartono Ahmad Jaiz. *Di Bawah Bayang-bayang Soekarno dan Soeharto; Tragedi Politik Islam dari Orde Lama hingga Orde Baru*. Jakarta: Dar Al-Falah.
- Hasan Al-Bana. *Tt. Majmu'atur Rasail*. Mesir : Dar Ad-Dakwah Al-Iskandariyah.
- Hilmi Aminudin. *Siyasatu Ad-Dakwah dalam Harakah islamiyah*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. 2001
- Husain Haikal. *Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Husain Hamid Hasan. *Ushul Fiqh*. Mesir: t.p. 1970.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al'-Azim*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1084.
- Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyah. 1996.
- Ignas Kleden. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES. 1987.
- I.J. Brugmans dan Baudet. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1987.
- Irwan Prayitno. *Seri Pendidikan Islam : Panduan Bagi Da'i dan Murabbi*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna.
- Ismail Raji Al-Faruqi. *Islam Sebuah Pengantar*. Terj. Lukman Hakim. Bandung: Pustaka. 1988.

- J.Harry Benda. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Terj. Danil Dhakide. Jakarta: Pustaka Jaya. 1985.
- Jurgen Habermas. *Ilmu dan teknologi Sebagai Ideologi*. Terj. Hasan Basario. Jakarta: LP3ERS. 1989.
- Khalid Muhammad Khalid. *60 Karakteristik Sahabat Rasul*. Terj. Mahyuddin Shaf dkk. Bandung: Diponegoro. 1998.
- Kontowijoyo dkk. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI. 1991.
- Mahfud M.D. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gema Media. 1999.
- Mahfud Sidik. *Dakwah dan Tarbiyah di Era Jahriyah Jamahiriyah*. Jakarta : Pustaka Tarbiatuna. 2002.
- Mahmud Yunus. *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: PT. Alma'arif. 1988.
- Masykuri Abdullah. *Demokrasi di Persimpangan Jalan*. Yogyakarta: Tiara wacana. 1999.
- M.Ali. *Ilmu Sejarah Indonesia*. Jakarta: Bhratara. 1963.
- M.Arifin. *Psikologi Dakwah: Suatu Pengantar Studi*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2000.
- M.Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Muhammad Ihsan Tanjung. *tarbiyah Berkelanjutan*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. 2003.
- Muhammad Imarah. *Islam dan keamanan Sosial*. Jakarta: GIP. 1999.
- Mun'im A.Sirri. (ed). *Dilema Islam Dilema Demokrasi*. Cet-ke-2. Jakarta: Gugus Press. 2002.
- Mutamimul Ula. *Perspektif Penegakan Syari'at di Indonesia*. Jakarta: Puistaka Tarbiatuna. 2002.
- Muzammil Yusuf. *Isu besar Dakwah dalam Pemilu*. Jakarta: Syamil. 2003.
- Nandang Burhanudin. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia Menurut Partai Keadilan*. Jakarta: Al-Jannah. 2004.
- Nashir Fahmi. *Menegakkan Syariat Islam Ala PKS*. Solo: Era Intermedia. 2006.

- Nurcholis Madjij. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan/*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1992.
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1998.
- Roger Garaudy. *Mencari Agama Pada Abad XX*. Terj. H.M.Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang. 1989.
- Ruslan Abdulgani. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Bandung: Prapantja. 1963.
- Sahar L.Hasan, Kwat Sukardiyono dan Dadi M.H.Basri.ed. *Memilih Partai Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1998.
- Sapto Waluyo. *Kebangkitan Politik Dakwah*. Bandung : Harokatuna. 2005.
- Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1982.
- Satria Hadi Lubis. *Yang Nyata dari PK Sejahtera*. Jakarta: Misykat Publication. 2003.
- Sidi Gazalba. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Djambatan. 1989.
- Sholihan M. Manan. *Pengantar Metodologi Penelitian Sejarah Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980.
- Snouck Hurgronje. *Islam di Hindia Belanda*. Terj.S.Gunawan. Jakarta: Bharata Karya Aksara. 1983.
- Sulastomo. *Demokrasi atau Democrazy*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Syamsu Hilal. *Gerakan Dakwah Formal di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Tarbiatuna. 2002.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islam dalam Sejarah dan kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan. 1990.
- Tamsil Linrung. *Panggilan Keadilan*. Jakarta : Hanana Press. 2005.
- Taufik Abdullah. *Ilmu Sejarah dan Histografi*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Taufik Asy-Syawi. *Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1997.
- Taufik Yusuf Al-Wa'i. *Pemikiran Politik Kontemporer Al_Ikhwan Al-Muslimun*. Terj. Wahid Ahmadi. Solo Era Intermedia. 2003.

- Tate Qamaruddin. *Beginilah Cara PK Menerapkan Syari'at Islam*. Jakarta: Pustaka Tarbiatuna. 2002.
- Thomas S.Kuhn. *Peran Paradigma dalam Revolusi Sains*. Terj. Tjun Suiryaman. Bandung: Remadja Karya. 1989.
- Tijani Abdul Qadir Hamid. *Pemikiran Politik Dalam Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Tim Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah. *Manhaj Tarbiyah 1427 H*. Jakarta: LKMT. 2007
- Tim Pustaka Saksi. *Mereka Melawan Korupsi : Jihad Wakil Rakyat PK Sejahtera*. Jakarta: Pustaka Saksi. 2004.
- Untung Wahono. *Penegakkan Syariat Islam dan Koalisi Partai*. Jakarta : Pustaka Tarbiatuna. 2002.
- _____. *Menjawab Tuduhan Terhadap PK Sejahtera* . Jakarta : Pustaka Tarbiatuna. 2003.
- Utsman Abdul Mu'iz Ruslan. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia. 2000.
- Yogesh Atal dan Pieris Ralph. *Kritik Asia Terhadap Pembangunan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial. 1980.
- Ziaudin Sardar. *Tantangan Dunia Islam Abad 21 Menjangkau Informasi* . terj. A.E. Proyono. Bandung : Mizan. 1988.
- _____. *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan. 1991.